

ANALISA

1979 — 5

FOKUS ATAS AFRIKA



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab

Dewan Redaksi

: Kirdi DIPOYUDO

: Daoed JOESOEUF, Rufinus LAHUR,
NAPINGBO, J. PANGLAYKIM,
A.M.W. PRANARKA, M. Hadi SOE-
SASTRO, Harry TJAN SILALAH
dan Jusuf WANANDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, NAPINGBO

STT : S.K. Menpen R.I. No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tgl. 28—8—1978

Harga per eks: Rp. 500,—

Harga langganan 1 tahun (12 nomor): Rp. 6.000,— (bayar di muka), untuk Mahasiswa Rp. 4.800,— sudah termasuk ongkos kirim.

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telepon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR REDAKSI	354
SUATU TERTIB BARU DI AFRIKA	357
TENDENSI-TENDENSI DI AFRIKA DEWASA INI	
<i>B. WIROGUNO</i>	368
KONFLIK-KONFLIK DI TANDUK AFRIKA	
<i>M. SUDIBJO</i>	381
NIGERIA NEGARA TERKEMUKA AFRIKA KULIT HITAM	
<i>Kirdi DIPOYUDO</i>	398
PERTARUNGAN DI AFRIKA TIMUR LAUT	
<i>B. WIROGUNO</i>	416
AFRIKA DAN TALI-TALI PENYELAMAT BARAT	431

PENGANTAR REDAKSI

Afrika bersama sama dengan Timur Tengah dewasa ini adalah di pusat perimbangan kekuatan global Timur — Barat, dan oleh sebab itu perkembangannya perlu diamati dengan saksama. Terdapat sejumlah faktor yang menjadikan benua itu vital bagi negara-negara Barat. Pertama, Afrika adalah sangat kaya akan bahan-bahan mentah strategis yang diperlukan industri modern. Kedua, negara-negara Barat sebagian besar bergantung pada impor bahan mentah strategis dari Afrika itu. Ketiga, sekitar 80% suplai minyak dan 70% suplai bahan mentah strategis itu diangkut lewat jalur pelayaran Tanjung Harapan. Dengan demikian keamanan suplai dan pelayaran lewat jalur itu merupakan kepentingan-kepentingan vital bagi negara-negara industri Barat.

Tahun-tahun belakangan ini terjadi suatu perkembangan yang dapat mengancamnya. Krisis minyak dunia, yang timbul pada tahun 1973 sebagai akibat pengurangan produksi minyak dan embargo minyak Arab terhadap Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, rupanya memperkuat keyakinan Uni Soviet bahwa ketergantungan akan impor minyak dan bahan mentah strategis serta jalur pelayaran Tanjung Harapan itu merupakan titik kelemahan negara-negara Eropa Barat. Apabila berhasil mendapatkan kemampuan untuk menguasai suplai dan jalur pelayaran itu, Uni Soviet akan dapat menundukkan Eropa

Barat tanpa melepaskan satu tembakan pun. Sesuai dengan itu, dia meningkatkan usahanya untuk memperluas pengaruhnya dan memperbaiki kedudukannya di benua Afrika.

Dengan maksud itu Uni Soviet memanfaatkan peluang yang terbuka baginya dalam perang saudara di Angola (1975-1976) dan dalam pertarungan antara Ethiopia dan gerakan-gerakan pembebasan Eritrea serta Ogaden yang didukung Somalia (1977-1978). Berkat bantuan militernya dan pengerahan ribuan pasukan Kuba, MPLA yang berorientasi Marxis berhasil keluar sebagai pemenang dan sebagai imbalan memberikan fasilitas-fasilitas kepada AL Uni Soviet. Pada tahun 1976 Uni Soviet mengadakan perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan Angola, dan tahun berikutnya dengan Mozambik. Kemajuan yang sama dicapai pada tahun 1978 di Ethiopia berkat bantuan militer besar-besaran Uni Soviet dan Kuba yang memungkinkan Pemerintah Mengistu mengalahkan gerakan-gerakan pembebasan Somalia Barat dan Eritrea. Dalam proses itu Uni Soviet kehilangan Somalia tetapi sebagai gantinya mendapatkan sebagai sekutu suatu negara yang jauh lebih penting, Ethiopia. Secara demikian Uni Soviet sejauh ini berhasil mendapatkan tempat berpijak di Angola, Mozambik, Ethiopia, Libia, Guinea dan Kongo Brazaville, yang dapat digunakannya sebagai pangkalan untuk memperluas pengaruhnya di Afrika dan kawasan Laut Merah.

Intervensi Uni Soviet secara besar-besaran di Angola serta Ethiopia dan sukses yang dicapainya itu telah membuka mata Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya atas ambisi Soviet di benua Afrika dan bahaya yang mengancam kedudukan serta kepentingan-kepentingan Barat. Khususnya mereka melihat kemajuan Soviet itu sebagai ancaman terhadap keamanan suplai minyak serta bahan-bahan mentah strategis tertentu dan keamanan jalur pelayaran Tanjung Harapan. Sebagai tanggapan mereka' menyusun suatu program politik baru dengan maksud untuk membendung perluasan pengaruh Soviet dan mengamankan kepentingan-kepentingan mereka. Dalam rangka itu mereka berusaha memperkuat kedudukan negara-negara Afrika moderat yang pro Barat, mencegah masalah rasial meningkat menjadi perang rasial yang luas, dan memper-

juangkan pembentukan pemerintahan mayoritas di Rhodesia, Namibia dan Afrika Selatan.

Dengan demikian Afrika menjadi medan perebutan pengaruh antara Timur dan Barat, yang masing-masing berusaha untuk memperbaiki kedudukannya sambil membendung atau mengurangi pengaruh lawan. Hasil pertarungan ini bukan saja akan mempengaruhi hari depan negara-negara Afrika yang bersangkutan, melainkan juga perimbangan kekuatan global antara Blok Timur dan Blok Barat. Seperti kita lihat di atas, kelangsungan hidup negara-negara Eropa Barat sebagian besar bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah dan bahan-bahan mentah industri dari Afrika yang hampir seluruhnya diangkut lewat jalur pelayaran Tanjung Harapan.

Benua Afrika itulah fokus kita kali ini. Sehubungan dengan itu ANALISA menurunkan beberapa tulisan yang membahas kawasan ini dari berbagai segi. Karangan yang pertama mengulas tertib politik baru yang muncul di Afrika sesudah Perang Dunia II. Yang kedua membahas tendensi-tendensi yang kini terdapat di benua itu dan akan ikut menentukan arah perkembangannya. Dalam karangan yang ketiga dibicarakan konflik-konflik yang sejak beberapa waktu mengganggu keamanan dan kestabilan Tanduk Afrika. Pembahasan berhenti dengan kemenangan Pemerintah Ethiopia dalam perang Ogaden. Perkembangan selanjutnya untuk sebagian dibahas dalam karangan yang kelima, yang mengulas pertarungan yang sedang berlangsung di Afrika Timur Laut antara Mesir dan Sudan yang didukung Amerika Serikat di satu pihak dan Ethiopia, Uganda dan Libia yang dibantu oleh Uni Soviet serta sekutu-sekutunya di lain pihak. Tema karangan yang keempat adalah Nigeria, negara terkemuka Afrika Kulit Hitam, yang rupanya akan memainkan peranan yang semakin besar baik di benua itu maupun di forum-forum internasional. Dalam karangan yang keenam dan terakhir dibicarakan arti penting Afrika Selatan untuk negara-negara Barat dan akibat-akibat buruk yang akan menimpa mereka kalau Uni Soviet berhasil menguasai kekayaan alamnya.

Mei 1979

REDAKSI

SUATU TERTIB BARU DI AFRIKA*

Lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak negeri-negeri jajahan di Afrika bergerak menuju kemerdekaan. Proses dekolonisasi itu mulai dengan Sudan, Tunisia, Maroko dan koloni-koloni Inggris di Afrika Barat, disusul koloni-koloni Perancis dan kemudian, biarpun kerap kali dengan banyak kesulitan dan pertumpahan darah, Aljazair dan negeri-negeri yang masih dikuasai Italia, dan koloni-koloni Belgia, Spanyol dan Portugal. Separuh negeri-negeri ini telah mencapai sasaran itu pada tahun 1960 dan kebanyakan lainnya pada 1965. Proses dekolonisasi kemudian dilanjutkan pada tahun 1974 dan 1975 dengan pembubaran sistem kolonial Portugis.

Pada awal 1976 yang masih dijajah hanyalah Somalia Perancis, yang kemudian disebut Wilayah Afar dan Issa dan kini lebih dikenal sebagai Jibouti, setelah Spanyol melepaskan Sahara. Selain itu sistem kolonial atau para-kolonial berakhir kecuali di Zimbabwe di mana pemberontakan terhadap Inggris memasuki tahun ke-11, di Namibia di mana Afrika Selatan tetap menolak sistem perwalian PBB, dan di Afrika Selatan itu sendiri di mana rakyat bukan kulit putih tetap dijajah seperti sediakala.

* Saduran karangan Basil Davidson, "A New Political Order in Africa", dalam *Africa Guide 1977* (Saffron Walden, Essex, 1977)

Tahun-tahun pertama perubahan status itu umumnya adalah waktu kegembiraan dan harapan tinggi. Inggris dan Perancis merintisnya dengan janji-janji kebahagiaan yang akan tiba. Mereka mengatakan mereka telah menyelesaikan tugas kolonial dan telah tiba waktunya bagi orang-orang Afrika akan memetik hasilnya. Mereka dari pihak Afrika yang menanggapi umumnya merasa puas untuk mengiyakan semuanya itu, pertama karena banyak di antara mereka yang condong untuk menerima kenyataan tugas Eropa untuk membawa peradaban ke Afrika, dan kemudian juga karena sopan santun dan akal sehat memberitahukan bahwa bermanfaat untuk mengatakannya. Bendera-bendera imperialis diganti bendera-bendera nasional dalam upacara-upacara saling memberi selamat. Orang-orang yang baru dibebaskan dari tahanan politik beramah-tamah dengan kaum ningrat Inggris, sedangkan lain-lain melalui permadani Istana Elysee dengan iringan terompet.

Kesulitan-kesulitan yang membarengi proses dekolonisasi ini cepat meningkat, pertama-tama di Kongo Belgi dan Afrika Timur Inggris, dan kemudian di Afrika Tengah Inggris, sedangkan bangsa-bangsa jajahan Portugis seperti orang-orang Aljazair hanya dapat merebut kemerdekaan berkat bertahun-tahun peperangan sengit. Dengan meningkatnya kesulitan-kesulitan, meningkat pula keragu-raguan tentang efisiensi apa yang dilakukan atau lebih tepat cara melakukannya. Mereka di negeri-negeri penjajah yang berjuang menentang "politik bunuh diri" menjadi condong untuk mengatakan bahwa huru-hara dan kekacauan Afrika yang menyusulnya hanya membuktikan bahwa mereka benar: kebanyakan rakyat Afrika adalah tidak mampu memerintah atau belum siap untuk itu, seperti kini seharusnya diakui setiap orang.

Banyak orang di Afrika memberikan keterangan lain dan mulai mengatakan bahwa kondisi baru mereka tidak banyak berbeda dengan kondisi mereka sebelumnya, dan kemerdekaan politik mereka hanya sedikit lebih daripada versi pemerintahan kolonial yang baru dan tidak langsung. Pada tahun 1965, kalau tidak sebelumnya, kegembiraan telah digantikan kemarahan dan skeptisisme. Dan pada 1970, kalau tidak sebelumnya, muncul

suatu trend pemikiran radikal yang mempersoalkan segala struktur dan lembaga dengan mana negara-negara nasional baru itu memulai kehidupan mereka, dan dengan mana kebanyakan masih meneruskannya.

Menengok ke belakang dari 1970, biarpun lama sebelum sejarah dapat memberikan putusannya, situasi umum nampak suram. Negara-negara baru itu, kecuali beberapa yang mendapatkan kemerdekaan mereka berkat perjuangan bersenjata dan oleh sebab itu bebas untuk memilih lembaga-lembaga mereka sendiri, diperlengkapi dengan sistem parlementer menurut pola Inggris, Perancis, Belgia atau Italia. Dengan sedikit pengecualian, tiada dari rezim-rezim parlementer ini bertahan lebih dari beberapa tahun. Banyak negeri cepat jatuh di bawah rezim nonparlementer dan kadang-kadang bahkan diktatorial. Lain-lain mempertahankan parlemen dan partai-partai, tetapi banyak mengubah artinya. Tidak sedikit yang secara ngawur berpindah dari satu jenis rezim ke jenis lain, dan kadang-kadang kembali ke jenis yang pertama. Di sana-sini, seperti di Zaire dan Uganda, muncul tirani yang nekat. Wabah ketidakstabilan telah melanda Afrika dan rupanya juga akan tetap dominan.

Secara hati-hati dapat dikatakan bahwa hal itu adalah akibat berbagai kelompok faktor. Kelompok pertama berhubungan dengan semua akibat yang mengalir dari berubahnya negeri-negeri koloni menjadi negara-negara nasional menurut pola Eropa. Negara-negara ini misalnya mewarisi perbatasan-perbatasan yang ditetapkan secara sewenang-wenang oleh Eropa imperialis tetapi kini dianggap suci. Perbatasan-perbatasan itu mencerminkan kompromi dan konvensi di Eropa: tiada yang masuk akal dari segi etnis atau ekonomi kecuali di sana-sini secara kebetulan. Dari 47 negara muda tahun 1976 hanya tiga memiliki kesatuan etnis, yaitu Somalia, Lesotho dan Swaziland. Semua negara lainnya mencakup sejumlah bangsa yang berlainan kebudayaan, sejarah dan sifat-sifat kedaerahan. Sementara adalah sangat kecil dan sukar hidup sebagai bangsa-bangsa tersendiri. Negara-negara ini dan lain-lain

lebih baik bergabung dengan negara-negara tetangga, paling tidak dalam bentuk federasi. Akan tetapi nasionalisme yang telah mendorong mereka mendapatkan kemerdekaan sudah barang tentu tidak mengijinkan peninjauan kembali perbatasan-perbatasan itu. Dan adalah suatu fakta bahwa tiada cara damai untuk mendapatkan kemerdekaan.

Warisan yang lebih bersifat ekonomi tidak lebih mudah, karena terpaksa menerima kemerdekaan menurut model nasionalisme yang tiba dengan kaum penjajah, negara-negara baru itu juga terpaksa menerima implikasi-implikasi ekonominya. Sebagai koloni mereka memenuhi kebutuhan bahan mentah penjajah mereka. Ini berarti bahwa seluruh perkembangan adalah dalam rangka peningkatan ekspor komoditi tambang dan primer. Negeri-negeri yang tidak mampu menghasilkan komoditi itu dipaksa-mula-mula dengan paksaan fisik kemudian dengan pajak tunai — untuk menyumbangkan tenaga kerja ke negeri-negeri yang mampu, dan sebagian besar sejarah pedesaan Afrika jaman kolonial adalah sejarah tenaga kerja migran. Sementara itu bangsa-bangsa yang mampu menggali mineral dan menanam komoditi ekspor seperti kakao, kacang tanah, kopi dan sebagainya menjadi tergantung pada pasaran luar negeri. Dan atas pasaran luar negeri ini mereka tidak mempunyai pengaruh apa pun mengenai kebijaksanaan maupun penetapan harga-harga.

Lewat suatu perkembangan yang terlalu kompleks untuk dibahas di sini, semuanya itu bersama-sama mengakibatkan suatu krisis sosial yang mendalam. Krisis ini pertama kali nampak menyusul depresi besar pada awal tahun 1930-an dan kemudian dalam akibat-akibat usaha kolonial yang intensif untuk meningkatkan produksi mineral dan hasil pertanian komersial selama Perang Dunia II, dan meningkat pada tahun 1940-an dengan terjadinya urbanisasi massal. Daerah-daerah pedesaan luas kini nampak kehilangan kestabilan hidup swadaya, sedangkan kota-kota besar banjir penghuni-penghuni gubug-gubug yang semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Inilah krisis dasar yang merupakan inti model Eropa: suatu kombinasi masalah-masalah struktural yang tak dipecahkan yang ditem-

patkan dalam kepincangan ekonomi, baik antara daerah-daerah maupun antara "kota dan desa", dengan jenis dan tingkat yang tidak dikenal Afrika sebelumnya.

Masalah-masalah untuk ke luar dari krisis ini dengan sistem-sistem parlementer impor menjadi lebih sulit karena berbagai faktor. Faktor-faktor ini berasal dari hidupnya kembali secara kuat ide-ide dan lembaga-lembaga dari jaman sebelum periode kolonial : dari pola organisasi masyarakat Afrika. Tidak hanya bahwa kebanyakan rakyat masih hidup dan bekerja dalam sistem-sistem teknologi sederhana dibandingkan dengan sistem-sistem negara-negara nasional Eropa yang lembaga-lembaganya diandaikan akan ditiru. Tetapi juga, dan bahkan lebih, bahwa bagian-bagian penduduk yang besar dan penting tinggal di bawah pengaruh perkembangan politik mereka sendiri, sehingga lembaga-lembaga parlementer baru itu kerap kali dan dengan cepat menjadi kulit lembaga-lembaga pribumi yang sangat berbeda.

Yang muncul adalah suatu kompromi kurang enak dari dua pola, pola impor dari Eropa dan pola Afrika. Campuran ini sukar berfungsi dengan baik, tetapi hanya dapat berfungsi jika orang-orang dengan pendidikan Barat menguasainya. Orang-orang serupa itu hanya sedikit. Mereka mengambil alih pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab yang dikosongi oleh pejabat-pejabat kolonial yang pergi, dan segera menjadi elite dengan privilesi-privilesi tinggi. Sama cepatnya jurang antara mereka dan rakyat banyak menjadi nampak dan dibenci secara luas. Pemisahan tajam sedikit orang dengan rakyat ini, baik berdasarkan kekuasaan maupun kekayaan atau keduanya, segera menjadi bisul dalam organisme setiap negara baru. Waktu dan mobilitas sosial kehidupan Afrika mungkin dapat mengurangi atau bahkan menyembuhkannya. Tetapi kenyataannya suatu faktor lain membuat bisul itu lebih parah dan dapat mengakibatkan ledakan politik.

Faktor ini berasal dari segi lain pola yang diterima itu. Tidak ada hal yang dianggap lebih penting oleh negara-negara kolonial dari tekad mereka bahwa negara-negara baru ini tetap dalam or-

bit kapitalisme internasional. Mereka boleh mengubah segala sesuatu seperti bendera, lagu kebangsaan, adat-istiadat dan sikap, tetapi tidak boleh mengubahnya. Adalah ideal kalau negara-negara baru itu menjadi demokrasi-demokrasi parlementer yang dipimpin kelas-kelas menengah pemilik modal. Atau jika hal itu terlalu sulit, negara-negara itu harus dipimpin orang-orang yang bermaksud menjadi kapitalis.

Dari negara-negara baru itu tiada yang mempunyai sistem kapitalisnya sendiri. Tiada yang mempunyai suatu kelas menengah yang menanam modal. Tetapi elite yang memerintahnya tidak menjumpai kesulitan untuk mengerti alasan-alasan dan sasaran-sasaran dari apa yang diharapkan dari mereka. Kebanyakan menganggapnya jelas dan benar. Tugas mereka ialah berkembang menjadi golongan borjuis yang dominan, dan secepat mungkin. Hanya satu jalan bagi mereka untuk melakukannya, seperti ditunjukkan kaum borjuis Inggris dan Perancis selama lebih dari 100 tahun. Yaitu mengumpulkan kekuasaan dan kekayaan dengan segala cara yang tersedia. Dan mereka segera memulainya. Mereka ternyata sangat mahir dalam hal ini. Tidak lama kemudian manipulasi kekuasaan negara untuk memperkaya diri mulai menunjukkan suatu kelihaian yang kerap kali sangat menyolok dan dapat dikagumi calon-calon. Tetapi rakyat banyak tidak dapat melakukannya dan menjadi semakin mual terhadap apa yang mereka lihat. Korupsi pegawai negeri meningkat menjadi suatu wabah. Korupsi ini memperlebar jurang antara kelompok kecil dan rakyat banyak, dan kelompok kecil itu lebih memperlebarnya lagi dengan pameran kekayaan yang sembrono.

Cara-cara itu subur di Inggris dan Perancis berkat industrialisasi dan implikasi-implikasinya. Di negeri-negeri itu pencuri menjadi penjaga. Di Afrika, pada dasawarsa 1960-an, tiada kesempatan serupa itu, biarpun hal itu mungkin di hari depan. Sementara itu sistem-sistem parlementer mereka retak dan roboh di bawah tekanan itu. Karena elite sipil tidak mengenal alternatif lain yang dapat ditawarkan, kekuasaan pindah ke tangan golongan militer, yang paling tidak dapat menjamin kelangsungan pemerintah. Pada akhir tahun 1960-an pemerintah

Afrika yang khas ialah rezim militer. Politik lenyap sebagai suatu gangguan yang tidak perlu. Kecuali di Aljazair dan Somalia, rezim-rezim militer itu melihat sebagai tugas mereka memerintah dalam susunan sosial ekonomi yang sama seperti sebelumnya. Masalah-masalah dasar secara demikian disembunyikan. Tidak dapat dipecahkan.

Tujuan membangun sistem-sistem kapitalis pribumi kiranya bisa dicapai di beberapa negeri yang sangat kaya, seperti Nigeria. Namun bahkan bagi mereka ini sasaran itu menjadi dubius. Di negeri-negeri lain, rezim militer yang paling baik sekedar bertahan dan berjuang seperti di Ghana untuk melawan akibat-akibat korupsi, sedangkan yang paling buruk, seperti di Uganda, Zaire dan Afrika Tengah, mengisi peti uang mereka. Ketidakstabilan menjadi penjara. Rakyat mungkin menjadi bungkam tetapi penjara-penjara penuh.

Sudah barang tentu dapat dikatakan lebih banyak tentang dasawarsa 1960-an. Afrika hidup kembali baik dalam kebudayaan maupun lain-lain. Isolasi yang dipaksakan dalam periode kolonial telah menjadi sejarah. Dalam politik seperti dalam ilmu pengetahuan, aliran-aliran baru muncul, sarana-sarana baru untuk mengerti giat beraksi, dan bentuk-bentuk kritisisme baru muncul. Semuanya ini mulai pada bagian kedua tahun-tahun 1960-an. Dilontarkan kecaman-kecaman terhadap pola Eropa, pola kapitalis, pola elitis dengan semua pertengkaran dan frustrasi yang inheren di dalamnya. Mula-mula di beberapa negeri, semuanya miskin menurut ukuran Afrika kecuali Aljazair. Mereka dibebani dengan negara nasional seperti bangsa-bangsa lain. Tetapi negara nasional mungkin masih mempunyai suatu tugas kreatif asal dapat berhenti sebagai suatu tiruan negara kolonial. Dengan keyakinan itu atau paling tidak karena terpaksa, mereka mulai memikirkan masalah-masalah pembangunan jenis lain negara nasional.

Sejarahnya adalah kompleks dan masih pada bab pertama. Tetapi pada garis besarnya negeri-negeri pembaru ini mempunyai gagasan-gagasan yang sama. Dengan belajar dari kenyataan-kenyataan dalam negeri maupun negeri-negeri Afrika lainnya,

pemimpin-pemimpin mereka mulai membatasi sebagai masalah sentral masalah menemukan bagaimana mengganti bentuk-bentuk pemerintahan elitis dengan bentuk-bentuk partisipasi rakyat dalam perubahan kebudayaan, politik dan ekonomi. Karena anti elitis mereka adalah juga anti kapitalis dan pro kapitalis, paling tidak pada umumnya. Mereka ingin melihat transformasi di dalam struktur-struktur dan oleh sebab itu melihat ketidakstabilan sebagai bagian proses yang sadar dan oleh sebab itu juga terkendalikan dan sudah barang tentu juga dapat diterangkan, menuju penyatuan bangsa-bangsa secara yang masuk akal dan peningkatan kebudayaan dan produksi.

Pengalaman mereka sampai tahun 1976 menunjukkan bahwa banyak variasi sukses dan kegagalan, tetapi dalam suatu trend yang nampaknya menjadi semakin luas dan secara ideologis semakin pasti. Banyak hal yang masih harus dipahami, dipecahkan dan diubah. Tendensi-tendensi setiap birokrasi ke arah pembentukan elite bersama-sama dengan kesukaran-kesukaran lain menghambat transisi struktural. Demikian pun kelemahan umum organisasi buruh dan oportunisme kelas petani. Di sana-sini seperti di Guinea, kemunduran kelihatan lebih banyak daripada kemajuan. Semuanya ini mungkin tak terhindarkan. Namun mutu perubahan konstruktif, pemikiran dan aksi independen dan inovasi kreatif juga hadir dengan kuat, baik di Tanzania maupun di Somalia, Aljazair dan negara-negara lain.

Pembaru-pembaru ini pada tahun 1974 dan 1975 diperkuat oleh rezim-rezim yang tampil ke muka dari gerakan-gerakan pembebasan di koloni-koloni Portugis : Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Cape Verde, Sao Tome dan Principe. Bagi mereka ini tiada pilihan lain kecuali menempuh jalan baru. Karena terpaksa berjuang untuk kemerdekaan melawan negara kolonial, mereka sejak semula harus mencari pola lain. Mereka terpaksa menjadi revolusioner dan oleh sebab itu menemukan alternatif dalam partisipasi massa yang muncul dari perjuangan politik dan militer yang melibatkan mereka melawan diktator Portugis. Tugas pokok mereka, seperti mereka lihat pada hari

kemerdekaan, ialah meneruskan pembangunan struktur partisipasi rakyat, yang menurut keyakinan mereka merupakan satu-satunya jaminan bagi penyatuan dan modernisasi masyarakat-masyarakat yang mereka wakili. Bagi mereka seperti bagi rezim-rezim sealiran di lain tempat, stabilitas positif hanya dapat muncul dalam suatu proses perubahan berencana di segala bidang kehidupan.

Jika ketidakstabilan tersebar luas di Afrika dewasa ini, artinya berbeda dari tempat ke tempat. Terdapat huru-hara yang tidak banyak berarti tetapi ada juga huru-hara yang sangat berarti. Bilamana huru-hara serupa itu terjadi dalam pola negara Eropa nasional yang diterima, betapa pun dibarui oleh persaingan-persaingan dan tekanan-tekanan lokal, huru-hara itu tidak dapat berbuat banyak selain menghasilkan campuran seperti sebelumnya dan tidak dapat menyelesaikan apa pun. Membangun kapitalisme berarti membangun elite; dan membangun elite berarti membangun persaingan intraetnis di antara elite-elite; sehingga model nasionalisme ini selalu memajukan pewarisnya, yaitu nasionalisme mikro atau tribalisme. Di negeri-negeri besar seperti Nigeria dapat dilakukan sesuatu mengenai tribalisme ini dengan pembentukan federalisme yang lebih besar. Di negeri-negeri kecil tidak dapat dilakukan apa pun kecuali dengan penindasan yang sistematis.

Semuanya ini pada tahun 1976 sudah mulai dimengerti secara yang lebih luas, mungkin tidak karena paling sedikit suatu perangkat faktor lain. Diantaranya ialah gejala bahwa kebanyakan rakyat Afrika kini berkembang dengan laju hampir 3% setahun, sehingga akan menjadi dua kali lebih besar dalam waktu kurang dari 30 tahun. Kecuali jika produktivitas pangan dan kebutuhan-kebutuhan lain/setempat dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan terus-menerus, tarap hidup pasti akan statis atau bahkan menurun di bawah taraf yang sangat rendah sekarang ini. Kecuali jika angsuran tahunan pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang meningkat dapat dikurangi, tidak ada rezim yang akan mampu mencegah benih-benih gandum dihabiskan. Kecuali jika gangguan-gangguan tribalisme antar elit dapat dihentikan, suatu ketidakstabilan akan menguasai situasi di Afrika.

Faktor-faktor serupa itu mengganggu setiap negeri Afrika. Tetapi di mana huru-hara berarti suatu langkah menjauh dari program-program politik dan ekonomi yang menguntungkan terbentuknya elite menurut model kapitalis dan suatu langkah maju ke arah demokrasi partisipasi rakyat yang anti kapitalis, maka semuanya itu menunjukkan bahwa orang-orang Afrika akan berhasil mengatasi krisis di bawahnya yang mereka terima dari masa lampau dekat ini.

Sementara orang di luar Afrika melihatnya di bawah bayang-bayang "konfrontasi Timur Barat" dan mereka mempunyai pengikut di banyak tempat di Afrika. Namun pada 1976 telah menjadi jelas bahwa pengikut-pengikut serupa itu menjadi semakin sedikit, dan alasannya juga tidak sulit diketemukan. Karena adalah jelas bahwa nasionalisme perubahan struktural konsisten yang revolusioner tidak banyak berkaitan dengan perang dingin, tetapi adalah inheren pada masalah-masalah Afrika itu sendiri. Dan sedikit kaitan itu, paling tidak sehubungan dengan orang-orang Afrika, hanya nampak sebagai sampingan kemungkinan mewujudkan perubahan itu.

Gerakan-gerakan revolusioner di koloni-koloni Portugis menunjukkan hal itu kepada kalangan Afrika yang luas dan sangat berkepentingan. Mereka menerima banyak bantuan militer dan material lain dari Uni Soviet dan negara-negara komunis lain; tetapi mereka juga akan menerima bantuan serupa itu dari dunia Barat jika dunia Barat yang berusaha menyelamatkan kepentingan-kepentingan kapitalisme asing di Afrika, tidak lebih suka mendukung diktator Portugis dan tentara-tentara kolonialnya. Dengan demikian siapa bermusuhan dengan siapa? Pertanyaan ini diajukan karena telah lampau saatnya untuk melihat kepentingan kapitalisme asing di benua ini secara otomatis sama dengan kepentingan-kepentingan Afrika. Tahun-tahun sisa dasawarsa ini akan menerangkannya dan mengulas jawabannya.

BENUA AFRIKA



TENDENSI-TENDENSI DI AFRIKA DEWASA INI

B. WIROGUNO

Masalah-masalah dasar Afrika bersumber pada percaturan faktor-faktor intern dan ekstern, historis dan baru. Tendensi-tendensi yang diselidiki dan diulas secara singkat dalam pengantar ini menyentuh hakikat dan sebab-sebab masalah-masalah ekonomi dan sosial domestik dan antar Afrika, pusat-pusat sengketa, hakikat radikalisisasi dan akibat negara-negara, OAU dan lain-lain usaha kerjasama atas urusan-urusan Afrika. Tendensi-tendensi itu sudah barang tentu berkaitan dalam asal mula maupun wataknya sekarang.

Pertama, bidang-bidang sengketa yang aktif dan laten, baik dalam maupun antara negeri-negeri, berpangkal pada "Perebutan Afrika" oleh negara-negara kolonial Eropa Barat yang pertama. Dalam arti ini masalah-masalah itu adalah fait accompli seperti perbatasan-perbatasan kolonial dan perpecahan-perpecahan politik bahasa. Masalah-masalah itu hanya dapat ditangani secara pragmatis dan tidak lengkap untuk tidak mengacaukan seluruh susunan politik Afrika.

Kedua, "Perebutan Afrika" kedua langsung menyusul kemerdekaan, pada awal 1960-an ketika Timur dan Barat

berebut mendapatkan pengaruh di negeri-negeri itu. Pada pertengahan 1960-an perebutan itu sudah berakhir, dan hampir selama satu dasawarsa, sampai 1974, negara-negara besar dalam banyak hal mengabaikan Afrika. Kelalaian dalam alokasi sumber-sumber daya dan perhatian politik ini ikut mempersulit masalah-masalah, baik ekonomi sosial maupun politik, yang terakhir khususnya di Afrika bagian selatan.

Ketiga, "Perebutan Afrika" ketiga dalam banyak hal adalah akibat langsung pengaruh sebelumnya negara-negara atas perkembangan di Afrika maupun pengabaianannya. Sejak 1974, menyusul pembongkaran imperium Portugis di Afrika, yang menciptakan kekosongan kekuasaan di Afrika bagian selatan, dan revolusi di Ethiopia yang mengubah situasi di Tanduk Afrika, keterlibatan negara-negara besar di benua meningkat secara dramatis. Uni Soviet berusaha menguasai kedua kawasan benua yang dari segi strategis sangat penting itu. Pameran kemampuan Soviet untuk mengangkut kekuatan pada skala global dan meluncurkan usaha-usaha bantuan militer masif — termasuk bantuan kuasa Kubanya — adalah perkembangan strategis belakangan ini yang menonjol di benua. Kelemahan dan perpecahan aktor-aktor lokal, dan khususnya sengketa-sengketa antara mereka, mempermudah usaha Soviet itu, dan akhirnya menarik Barat dan negara-negara moderat Afrika dan lain-lain untuk membela kepentingan-kepentingan mereka. Perkembangan ini merupakan bahaya yang besar bagi Afrika pada titik sejarah sekarang ini. Pada waktu yang sama beberapa keuntungan bagi Afrika juga bersumber pada kejadian-kejadian itu, yaitu meningkatnya tekanan Barat atas rezim-rezim minoritas kulit putih dan bertambah besarnya kesediaan Barat untuk memberikan bantuan ekonomi.

Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh kebanyakan negeri Afrika telah mengambil proporsi kontinental. Perpindahan dari desa ke kota, pertumbuhan penduduk dan

keterbelakangan ekonomi telah menciptakan masalah-masalah pengangguran dan kemiskinan yang luas di kota-kota yang umumnya diperkirakan akan menjadi semakin buruk pada tahun-tahun mendatang. Keterbelakangan prasarana pendidikan dan komunikasi yang menjadi dasar pembangunan pertanian dan akhirnya juga industrialisasi, merupakan kelemahan besar di banyak negeri Afrika, dan pada tahun-tahun belakangan ini menjadi lebih sulit akibat jatuhnya harga komoditi-komoditi mineral, meningkatnya harga minyak (tanpa reparasi bantuan yang memadai dari negeri-negeri minyak kaya) dan laju pertumbuhan ekonomi serendah 1% di seluruh benua. Meningkatnya kesadaran dalam negeri untuk menangani masalah-masalah itu, bersama-sama dengan keinginan untuk menanggapi tekanan-tekanan Barat akan demokratisasi sebagai syarat bantuan, di sana-sini merangsang diskusi intern mengenai pendekatan-pendekatan alternatif terhadap manajemen bidang sosial ekonomi (lebih banyak daripada diskusi di bidang politik seperti pada tahun-tahun pertama menyusul kemerdekaan). Ada tanda-tanda kesediaan — khususnya di Afrika Barat (Nigeria, Senegal, Ghana dan Kamerun) — untuk berkembang, biarpun secara ragu-ragu, menuju gaya pemerintahan pluralistis yang liberal dengan partisipasi rakyat yang lebih besar. Juga negara-negara radikal seperti Angola dan Guinea menjadi semakin sadar akan kemampuan Barat untuk memberikan bantuan pembangunan besar-besaran yang efektif, sedangkan negara-negara yang melakukan eksperimen-eksperimen "Afrikanisasi" dalam perekonomian kini umumnya mengakui kegagalan mereka. Namun tidak terjadi banyak kemajuan dalam menyerap bantuan secara produktif karena kurangnya tenaga terlatih dan prasarana maju. Hal ini berlaku bagi negeri-negeri miskin maupun kaya seperti Nigeria yang mengalami bencana-bencana kekayaan-kekayaan relatif.

Perpecahan-perpecahan antara negeri-negeri benua secara konsisten menghambat usaha integrasi, termasuk integrasi di bidang ekonomi. Pembagian radikal-moderat yang berpangkal pa-

da blok-blok Casablanca-Monrovia meningkat. Perbedaan-perbedaan antara negeri-negeri bekas jajahan Perancis dan Inggris umumnya tetap. Aspirasi-aspirasi sejumlah negeri seperti Nigeria sekarang ini untuk menjadi pemimpin regional atau kontinental menimbulkan kecurigaan antara tetangga-tetangga mereka. Dan dalam negeri-negeri Afrika perbedaan-perbedaan suku, etnis dan agama tetap merupakan faktor ketidakstabilan.

Berbagai usaha kerjasama militer dan ekonomi antar Afrika, biarpun hasilnya umumnya mengecewakan, menunjukkan jalan menuju penyelesaian masalah-masalah Afrika secara Afrika. Dalam bidang ekonomi, usaha-usaha organisasi regional di Afrika Barat seperti ECOWAS dan CEAO Frankofon, dan usaha-usaha untuk mengembangkan sumber-sumber daya sungai mencapai hasil terbatas. Di Afrika Timur masyarakat Kenya-Uganda-Tanzania yang pernah memberikan banyak harapan kini macet. Salah satu hambatan bagi kerjasama efektif itu ialah kurangnya modal; dalam hubungan ini sangat terbatasnya lingkup usaha kerjasama Arab-Afrika harus ditandaskan. Negeri-negeri penghasil minyak Arab tidak memberikan cukup dana, sedangkan negeri-negeri Arab radikal di Afrika lebih memikirkan untuk membuat radikal daripada membantu. Perpecahan radikal-moderat yang memotong Afrika Arab maupun Negro juga menghambat kerjasama. Pasukan Intervensi Militer Pan-Afrika yang diusulkan bisa mengatasi kelemahan serius lain banyak negeri, yaitu tiadanya kekuatan militer yang efektif. Kelemahan ini dalam banyak hal merupakan suatu undangan invasi suatu pasukan terlatih baik yang kecil. Invasi-invasi propinsi Shaba dari Angola merupakan contoh baru seperti juga intervensi Maroko di Shaba dan campur tangan Libia dan Perancis di Chad. Perimbangan Afrika diubah oleh beberapa ribu pasukan. Namun pembentukan pasukan Pan-Afrika dihambat oleh perpecahan-perpecahan Afrika, khususnya perpecahan-radikal moderat.

Buyarnya imperium kolonial di Afrika yang terakhir, yaitu imperium Portugis, menjurus pada munculnya rezim-rezim radikal di Angola dan Mozambik, memperbaiki posisi strategis Soviet, mengubah hakikat perjuangan radikal di Afrika bagian

selatan dan meningkatkan ancaman bagi kestabilan Zambia dan Zaire. Lain-lain kawasan percaturan antara kepentingan radikal Soviet dan sengketa-sengketa regional ialah Tanduk Afrika (dan sengketa di Jazirah Arab bagian selatan yang berkaitan), Chad dan Sahara Barat.

Konflik Angola dalam banyak hal dapat dilihat sebagai awal strategis "Perebutan Afrika" baru. Konflik itu menunjukkan ketidakpastian Amerika Serikat mengenai tujuan-tujuan strategis nasionalnya menyusul Vietnam, tersedianya pasukan-pasukan kuasa (Kuba) bagi Uni Soviet dan kesediaan Soviet untuk mengerahkannya, dan untuk pertama kalinya menyadarkan negeri-negeri moderat Afrika dan Asia (Maroko, Mesir, Saudi, Iran, Sudan, Senegal dan lain-lain) dan Perancis, bahwa tangkisan-tangkisan dapat dan harus dilakukan lepas dari dukungan kuat Amerika Serikat. Dia juga menandai akhir usaha "detente" Afrika Selatan yang tak berusia panjang. Berikut Angola kekuatan-kekuatan dari luar merupakan penggerak utama dalam memantapkan atau menggoyahkan rezim-rezim Afrika.

Sekalipun sengketa-sengketa di Afrika bagian selatan — Zimbabwe, Namibia dan Afrika Selatan — pada dasarnya adalah perjuangan pembebasan, sengketa-sengketa itu juga dibatasi dan dipersulit oleh perpecahan radikal-moderat maupun kompetisi dan keterlibatan langsung negara-negara besar. Di negeri-negeri tetangga maupun dalam gerakan-gerakan pembebasan nasional terlihat adanya tendensi radikal kiri. Barat, didorong oleh keterlibatan Soviet Kuba, meningkatkan tekanannya atas orang-orang kulit putih. Terdapat dua trend yang sulit dilihat cirinya : trend menuju kerjasama hitam-kulit putih di Rhodesia dan Namibia, dan trend menuju sengketa antara kekuatan-kekuatan kulit hitam yang militan. Sedangkan bagi Uni Soviet setiap penyelesaian damai adalah suatu kemunduran, orang-orang Afrika moderat dan Barat, jika mereka ingin menghindari radikalisasi lebih lanjut, harus menciptakan saling percaya dan saling pengertian dengan dan antara orang-orang Afrika dan antara mereka (Afrika). Pengertian yang baru-baru ini dicapai mengenai Namibia menunjukkan bahwa ketekunan dalam usaha

politik Afrika-Barat dapat menciptakan kondisi untuk kemajuan-kemajuan ke arah penyelesaian sengketa.

Di Zaire Shaba I dan II mengungkapkan terus berlangsungnya warisan kolonialisme; sengketa suku Katanga, dengan manipulasi asing untuk maksud-maksud ekonomi strategi, selalu mengganggu Zaire sejak kemerdekaan. Sengketa itu mempunyai berbagai dimensi yang berkaitan: daerah Shaba-Kasai yang strategis penting berkat mineralnya dan posisi Zaire di pusat Afrika dekat lain-lain situasi konflik yang penting menjadi incaran Uni Soviet dan kaum radikal; dalam negeri Zaire mendapatkan lebih dari bagiannya dalam kesulitan-kesulitan ekonomi dan sosial yang mengganggu Afrika — tiadanya identitas nasional, gerakan-gerakan separatis, pemerintahan tidak efisien, perekonomian yang mengalami depresi dan dibebani banyak hutang, hasil-hasil yang merosot harganya (tembaga), banyak organisasi oposisi militan, dan kelemahan militer yang ekstrem. Berhadapan dengan invasi beberapa ribu orang "gendarme", rezim Mobutu hanya bisa bertahan berkat intervensi asing yang dilancarkan tanpa gairah, antara lain karena sifat rezim Mobutu; namun belum nampak alternatif lain yang realistis kecuali mungkin suatu alternatif di bawah kekuasaan Soviet.

Di Tanduk Afrika empat faktor utama menciptakan ketidakstabilan gawat: penggulingan rezim kekaisaran usang oleh suatu kelompok militer radikal; perpecahan-perpecahan etnis-keagamaan-nasional di Ethiopia; ekspansionisme Somalia, dan campur tangan negara-negara besar dan lain-lain negara. Adalah dukungan yang diberikan kepada Somalia oleh Barat dan beberapa negara Timur Tengah yang akhirnya mendorong Dergue untuk mendatangkan orang-orang Uni Soviet dan Kuba. Peranan-peranan di sini dibalik : Barat dan sekutu-sekutunya mendukung faktor pengganggu dan secara demikian membantu Uni Soviet, yang kehilangan Somalia tetapi dengan bantuan Kuba berhasil hadir secara masif di Ethiopia. Klaim-klaim irredentis Somalia dan dukungannya bagi kegiatan-kegiatan gerilya di Ogaden, maupun sengketa Eritrea, mengabadikan dan meningkatkan ketergantungan Ethiopia pada Moskwa. Uni

Soviet kini menggunakan kedudukan militernya untuk menekan Dergue dan Eritrea agar berunding. Mereka bermaksud untuk membentuk suatu federasi Ethiopia-Eritrea yang Marxis dan terikat pada Uni Soviet, dan mungkin juga suatu blok yang mencakup seluruh Tanduk, sedangkan kedudukannya di Yaman Selatan, yang baru-baru ini menjadi lebih kuat, mengukuhkan kekuasaannya atas kawasan yang vital dari segi strategis itu. Uni Soviet juga berusaha meningkatkan kekuasaannya atas Addis Abeba dengan menekan Dergue agar membentuk suatu partai Marxis. Namun situasi konflik yang bermuka banyak itu dan faktor-faktor seperti nasionalisme Ethiopia masih bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi Uni Soviet dan memungkinkan kekuatan-kekuatan anti Soviet memulihkan kedudukan mereka.

Sekalipun Chad tidak mempunyai arti strategi seperti Tanduk, munculnya suatu rezim radikal pro Soviet di negeri itu bisa mengganggu perimbangan radikal-moderat di seluruh bagian utara benua, dan mengancam kedudukan Sudan dan Mesir. Namun bukanlah negara-negara Afrika moderat yang berkepentingan tetapi Perancis yang dengan 1.500 tentara untuk sementara berhasil membendung arus dan memberikan pukulan berat kepada Frolinat yang berorientasi kiri, dan secara demikian menyelamatkan rezim Malloum pada saat terakhir. Di Chad sekali lagi kita menjumpai gejala, bahwa suatu sengketa yang pada dasarnya adalah religius/etnis, mendapatkan segi tambahan berbahaya dalam perpecahan radikal-moderat yang mengundang negara-negara besar, termasuk Uni Soviet, lewat Libia. Klaim Libia atas bagian utara negeri yang praktis didudukinya adalah segi lain situasi sengketa itu, dan sekalipun Tripoli membantu mereka, pemberontak-pemberontak Trolinat, sama sekali tidak senang dengan klaim-klaim wilayah Libia.

Sengketa Sahara Barat adalah lain jejak kolonialisme dan dalam padang gurun luas yang sedikit penduduknya, melibatkan kekayaan mineral, segi strategi, pertumbuhan-pertumbuhan politik intern negeri-negeri yang terlibat dan prestasi nasional.

Banyak situasi konflik yang tidur bisa meledak — mungkin

dengan stimulans radikal-Soviet: ketegangan-ketegangan perbatasan, suku, ekonomi serta politik di segi tiga Afrika Timur antara Kenya, Uganda dan Tanzania; klaim-klaim irredentis Somalia atas Djibouti dan sebagian Kenya; persaingan Afar-Issa di Djibouti; perbatasan Libia dengan Mesir, Tunisia dan Niger; klaim-klaim Zaire dan Kongo atas kantong Angola Cabinda maupun gerakan kemerdekaan lokal; status pulau-pulau Mayotte dan Comorro, dan klaim-klaim gerakan-gerakan kemerdekaan atas kedaulatan di Azores dan Kepulauan Canari.

Rezim-rezim radikal telah ada di Afrika sejak 1960-an. Tetapi pada akhir 1950-an dan awal 1960-an bapak-bapak pendiri negara-negara Afrika baru tidak mau mengambil alih ideologi-ideologi asing, kapitalis maupun komunis, dan berusaha membimbing perkembangan bangsa-bangsa mereka yang baru muncul, paling tidak sampai batas-batas tertentu, menurut nilai-nilai dan norma-norma pribumi. Tanzania, Guinea, Ghana dan lain-lain, biarpun menganut suatu pendekatan sosialis terhadap pembangunan, bermaksud mengembangkan suatu jalan Afrika sendiri ke sosialisme. Juga dalam politik luar negeri mereka, negara-negara radikal lama biasanya menekankan orientasi non-blok mereka. Namun sejarah sosialisme Afrika adalah mengecewakan. Sejak awal 1970-an suatu jenis radikalisasi lain menggantikannya.

Rezim-rezim radikal baru mengaku menganut "sosialisme ilmiah". Baik bagi rezim-rezim militer — Somalia, Benin (Dahomey), Kongo, Malagasi dan Ethiopia — maupun bagi rezim-rezim sipil radikal model Soviet menegakkan dan mempertahankan suatu sistem kekuasaan efektif, mobilisasi dan perubahan sosial ternyata menarik. Model itu juga memberikan legitimitas kepada rezim-rezim yang tidak didukung rakyat.

Sejak tahun 1973 jumlah rezim radikal tambah besar menyusul buyarnya imperium Portugis. Gerakan-gerakan pembebasan di Angola, Mozambik dan Guinea Bissau mengembangkan trend-trend radikal akibat hubungan mereka dengan negeri-negeri komunis — Uni Soviet dan RRC — dalam perjuangan anti kolonial mereka. Hal ini terutama berlaku bagi

MPLA di Angola, yang pimpinannya (sebagian besar terdiri atas orang-orang mestis) selalu mempunyai suatu komitmen ideologi kiri yang kuat. Sikap pro Soviet Angola sekarang ini meningkat akibat ketergantungan totalnya pada dukungan militer Kuba. Gerakan-gerakan pembebasan yang beroperasi di Rhodesia, Namibia dan Afrika Selatan merupakan tanah subur bagi penetrasi Soviet.

Libia dan Aljazair aktif membantu dan mengkoordinasi perjuangan-perjuangan radikal tertentu di Afrika, yang praktis menunjang kepentingan Soviet. Libia misalnya, di samping kegiatan-kegiatannya di Chad, melakukan kegiatan-kegiatan subversi melawan Mesir, Sudan, Ethiopia dan Niger, turun tangan di Tanduk Afrika, dan baru-baru ini aktif menghimpun suatu blok radikal Afrika, dan umumnya bertindak sebagai agen radikalisasi, sambil menyimpan senjata Soviet dalam jumlah yang luar biasa.

Prospek jangka panjang rezim-rezim radikal baru di Afrika tidak begitu jelas. Negeri-negeri itu umumnya sangat miskin dan diragukan apakah suatu pendekatan sosialis terhadap pembangunan akan berhasil, khususnya mengingat kecilnya bantuan ekonomi Soviet. Kesulitan ekonomi mereka lebih menonjol dibandingkan dengan kemakmuran relatif negeri-negeri kapitalis yang berorientasi ke Barat seperti Kenya dan Pantai Gading. Zambia dan Guinea baru-baru ini berpaling ke Barat untuk mendapatkan bantuan ekonomi; Guinea juga ke Arab Saudi. Di lain pihak, negara-negara radikal mungkin akan menikmati "keuntungan-keuntungan" rezim-rezim totaliter, khususnya dalam bidang mobilisasi massa dan bidang-bidang sosial seperti pendidikan. Pada analisa terakhir, untuk ikut membendung arus radikal di benua, negeri-negeri Afrika moderat harus bersaing dan menunjukkan bahwa mereka bisa mencapai hasil yang lebih besar.

Kembali ke negara-negara besar, konsentrasi strategis Uni Soviet di Tanduk dan di Afrika bagian selatan telah disebutkan. Di Afrika, seperti di lain-lain tempat, Uni Soviet membangun pengaruhnya dengan memanfaatkan sengketa. Makin berkepan-

jangan suatu situasi sengketa makin baik kesempatan bagi Uni Soviet untuk membuat radikal negeri-negeri atau gerakan-gerakan sasaran dan mengukuhkan pengaruh mereka. Itulah situasi sekarang ini di selatan di mana Uni Soviet berkepentingan untuk mengulur sengketa-sengketa, tidak untuk mencapai suatu pemerintahan mayoritas. Hanya kalau merasa bahwa penyelesaian sengketa bisa mengukuhkan kekuasaannya atas kawasan, dia akan menunjangnya tetapi hanya dengan syarat bahwa kepentingan-kepentingannya terjamin. Itulah dewasa ini halnya dalam sengketa Ethiopia-Eritrea seperti kita lihat di atas.

Di Afrika, seperti di Timur Tengah, setelah mengalami serangkaian kemunduran dalam usahanya untuk mengukuhkan pengaruhnya lewat kerja sama dengan rezim-rezim "borjuis nasional" (seperti di Mesir, Sudan, Ghana dan belakangan ini juga Guinea), Uni Soviet kini memusatkan usaha pokoknya untuk membantu kaum komunis yang berorientasi padanya merebut kekuasaan dan memperkuatnya, jika perlu dengan intervensi langsung tentara Kuba, yang didukung oleh penasihat-penasihat Soviet. Kekuasaan atas rezim-rezim itu lebih lanjut diperkuat dengan mengabadikan sengketa-sengketa yang membuat perlu bantuan Soviet dan/atau kehadiran Soviet Kuba seperti di Angola dan Ethiopia. Pada waktu yang sama Uni Soviet meneruskan usahanya mencari pengaruh di lain-lain negeri dengan menggunakan sarana-sarana yang diterima umum (hubungan diplomasi dan suplai militer), tetapi besarnya tidak mau memberikan kredit.

Sejak intervensi Kissinger di Afrika bagian selatan tahun 1976, Amerika Serikat, sesudah lama mengabaikannya, kembali ke benua, biarpun pelan-pelan dan berhati-hati, berbeda dengan usaha tegas Soviet. Trauma Vietnam dan kesibukan dengan masalah-masalah lain yang lebih mendesak seperti Cina dan Timur Tengah telah mendorongnya menempuh pendekatan serupa itu. Untuk sebagian Amerika Serikat didesak oleh negeri-negeri regional lain seperti Arab Saudi, Mesir dan Iran, khususnya sehubungan dengan Tanduk.

ANALISA

Tujuan strategi utama Amerika Serikat di benua ialah menghentikan Uni Soviet. Dalam rangka itu Amerika Serikat umumnya berusaha menyelesaikan sengketa-sengketa dan ikut menunjang stabilitas politik. Amerika Serikat hanya menyimpang dari politik ini di Tanduk dengan akibat-akibat buruk seperti kita lihat di atas. Dalam sengketa-sengketa kulit hitam — kulit putih di Afrika Selatan, Amerika Serikat jelas memperjuangkan tercapainya suatu penyelesaian secepat mungkin yang menguntungkan mayoritas kulit hitam; perubahan dalam politik Amerika Serikat ke arah itu sehubungan dengan Afrika Selatan terjadi pada tahun 1976. Belakangan ini Amerika Serikat juga menunjukkan kesediaan memberikan bantuan ekonomi dan senjata kepada negeri-negeri Afrika dan trend ini rupanya akan berlangsung terus.

Shaba II, di samping intervensi masif Uni Soviet dan Kuba di Tanduk, menempatkan Afrika untuk sementara waktu di pusat perhatian Amerika, dan politik Amerika di benua dibicarakan secara luas. Uni Soviet diancam dengan kemungkinan "pengaitan" dalam tanggapan Amerika antara tingkah laku Soviet di Afrika dan persoalan-persoalan global dan bilateral (SALT, suplai teknologi Barat, gandum Amerika dan sebagainya), tetapi lawan-lawan "pengaitan" itu rupanya menang. Amerika Serikat juga tetap tidak mau melakukan intervensi militer, tetapi mendukung intervensi sekutu-sekutunya, dan dalam krisis Shaba II memberikan bantuan logistik kepada mereka.

Sejauh mana Amerika Serikat bisa diharap menganut suatu politik yang konsisten dan lebih tegas di Afrika belum dapat dikatakan.

Perancis telah memperluas keterlibatan militernya di Afrika, tepatnya di negeri-negeri "Frankofon". Selain menempatkan pasukan-pasukan di Djibouti, Perancis juga mengerahkan pasukan untuk bertempur melawan Polisario di Sahara, Frolinat di Chad dan penyerbu-penyerbu Katanga di Zaire — semuanya itu atas permintaan pemerintah-pemerintah yang sah. Sambil memperjuangkan kepentingan-kepentingannya di benua, Peran-

cis juga ingin bertindak di Afrika sebagai wakil Eropa dan secara demikian meningkatkan posisi internasionalnya. Namun apa pun kepentingan-kepentingan "egoistis"-nya, Perancis kebanyakan bertindak atas pengertian dengan negara-negara Afrika dan Timur Tengah maupun dengan Barat, dan memainkan peranan sentral dalam usaha membendung arus radikal Soviet-Kuba. Adalah berarti bahwa pada KTT Franko-Afrika bulan Mei 1978 ikut serta negeri-negeri Frankofon yang bukan bekas jajahan Perancis — Zaire, Burundi, Ruanda, Guinea Bissau, Sao Tome dan Principe, Cape Verde, Mauritius dan Sychelles —. Intervensi Perancis seperti intervensi setiap negara asing di Afrika jelas mempunyai segi-segi negatifnya; namun dalam situasi-situasi sengketa tertentu yang menentukan tidak ada pilihan lain yang efektif.

Politik Cina di Afrika mudah dibatasi: memerangi pengaruh Soviet dan mendukung kekuatan-kekuatan anti Soviet manapun tanpa mempedulikan warna politiknya. Dengan demikian kepentingan Cina sekarang ini dalam segi yang paling penting itu sejalan dengan kepentingan negara-negara moderat Afrika dan Barat. Kemampuan-kemampuan Cina di Afrika jelas terbatas dan dia terdesak oleh Uni Soviet seperti di Tanzania. Namun karena kepentingan anti Soviet adalah sangat pentingnya, dan oleh sebab di Vietnam dia terdesak oleh Uni Soviet, Cina rupanya kini bermaksud meningkatkan usahanya untuk bersaing dengan Moskwa secara global; hal ini pasti juga akan terasa di Afrika, dan mungkin khususnya di benua itu.

Akhirnya kembali ke gelanggang antar Afrika: OAU menjelang KTT tahunannya tidak lebih berhasil memajukan persatuan daripada sebelumnya. OAU mau tidak mau mengungkapkan perpecahan-perpecahan Afrika, dan konsensus hanya dapat dicapai pada denominator bersama terendah. Efisiensi OAU dibatasi oleh faktor obyektif yang di luar tanggung jawab negara-negara Afrika. Tidak dapat diharapkan bahwa 49 negara akan menemukan banyak kepentingan bersama dan mendahulukan kepentingan bersama itu atas kepentingan masing-masing. Kedua, OAU juga kekurangan sumber-sumber daya pribumi — ekonomi, sosial dan militer—; karena alasan ini

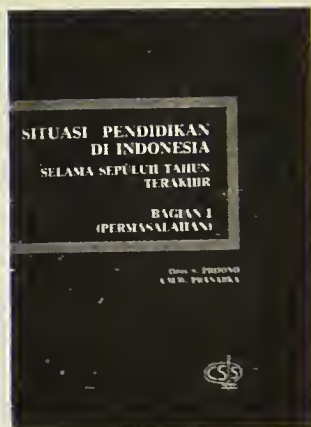
saja OAU tidak akan dapat menjadi seperti NATO, EEC atau COMECON, ataupun melakukan fungsi-fungsi seperti badan-badan PBB. Kenyataannya dapat dikatakan bahwa OAU dapat bertahan karena bapak-bapak pendirinya mengakui batas-batas Afrika yang inheren dan oleh sebab itu membentuk suatu organisasi selemah itu. Umumnya OAU lebih mengungkapkan perpecahan-perpecahan Afrika daripada mengatasinya; namun pembicaraan-pembicaraan persoalan-persoalan Afrika pada pertemuan-pertemuannya itu sendiri adalah berharga seperti eksistensinya sebagai satu-satunya forum seluruh Afrika. Dalam kedudukannya ini dia harus dipertahankan. Mengingat perpecahan-perpecahan politiknya itu OAU mungkin bisa meningkatkan statusnya dan lebih menunjang kesejahteraan anggota-anggotanya jika dia lebih memperhatikan soal-soal sosial ekonomi.

SUDAH TERBIT :



**SITUASI PENDIDIKAN
DI INDONESIA
SELAMA SEPULUH TAHUN
TERAKHIR
BAGIAN I (PERMASALAHAN)**

**Onny S. PRIJONO
A.M.W. PRANARKA**



Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS),
tebal 176 hal., kertas HVS, harga @ Rp. 1.750,00

"Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir" akan dikemukakan di dalam tiga bagian. *Bagian Pertama* telah terbit dan membahas masalah-masalah penting selama 1968-1978. Bagian Pertama ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai pendidikan nasional, terutama yang dikeluarkan oleh lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengungkapkan permasalahan pendidikan nasional selama periode tersebut. *Bagian Kedua* akan terbit dalam waktu singkat dan akan membahas mengenai langkah-langkah kebijakan pendidikan nasional selama periode tersebut. Sedangkan *Bagian Ketiga* sebagai bagian terakhir merupakan evaluasi.

Persediaan terbatas! Dapatkan segera di toko-toko buku atau pesan langsung disertai pembayaran tambah ongkos kirim 15% ke :

BIRO PUBLIKASI CSIS, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telp. 349489

KONFLIK-KONFLIK DI TANDUK AFRIKA

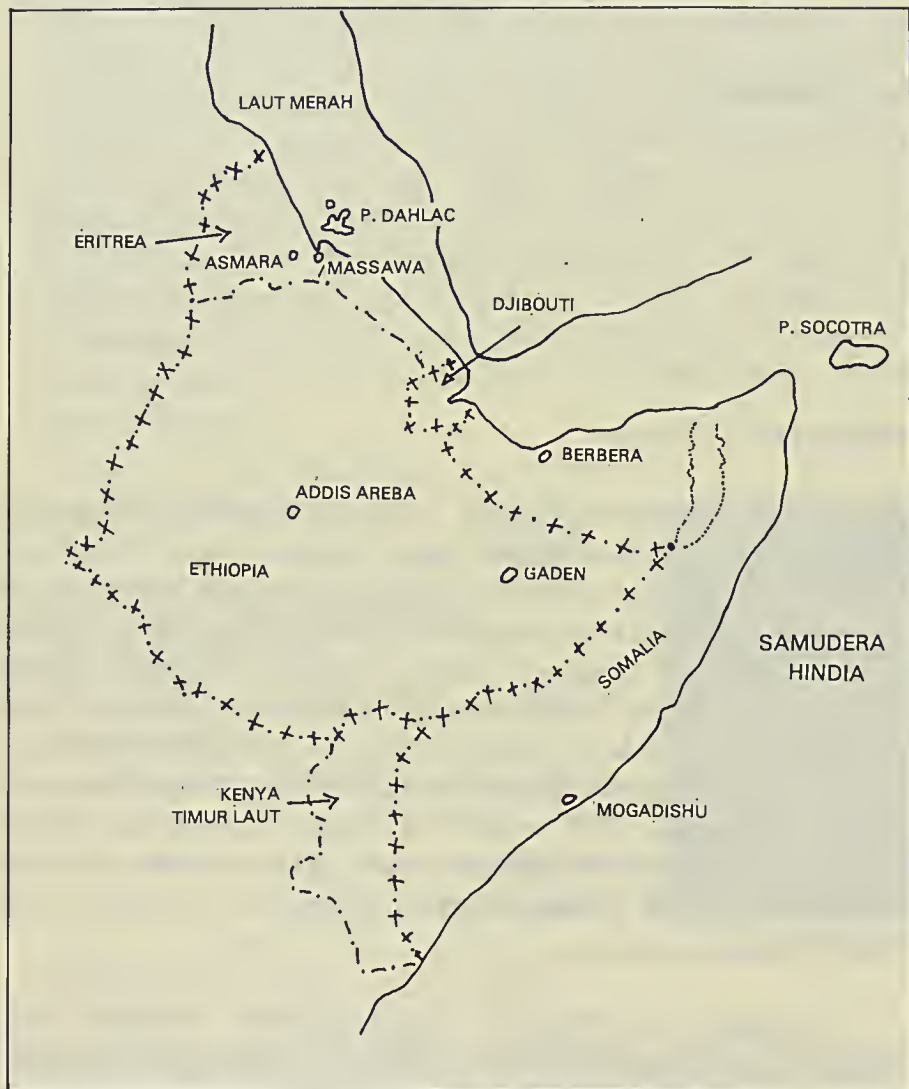
M. SUDIBJO

PENDAHULUAN

Situasi di kawasan Tanduk Afrika pada tahun 1975 sampai awal tahun 1978 makin hari makin panas. Tiga wilayahnya, yakni Ogaden, Djibouti dan Eritrea, telah menjadi simpul-simpul persengketaan yang juga mengundang campur tangan asing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan ataupun terlibatnya banyak negara, termasuk Uni Soviet, Kuba dan negara-negara Arab, telah mengubah sifat konflik di wilayah itu, dari konflik lokal menjadi konflik regional dan bahkan konflik internasional. Oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa perubahan ataupun penyelesaian yang akan tercapai akan ikut menentukan masa depan dan warna kawasan Tanduk Afrika (lihat Peta).

Karangan ini berusaha mengungkapkan masalah yang sedang berkembang di Tanduk Afrika itu, tetapi akan membatasi diri pada persoalan-persoalan yang menimbulkan persengketaan di kawasan itu dan pada alasan-alasan yang mendorong negara-negara asing untuk berebut pengaruh justru di Tanduk Afrika, suatu kawasan yang kering dan tandus. Secara berturut-turut akan dibahas sengketa atas Ogaden, perebutan pengaruh di Djibouti dan masalah Eritrea. Sebagai penutup akan diajukan beberapa kesimpulan.

TANDUK AFRIKA



0 200 400 600 800 Km

1. PERSENGKETAAN DI OGADEN

Sengketa atas daerah Ogaden antara Ethiopia dan Somalia pada bulan Juni 1977 telah meningkat menjadi suatu peperangan yang akhirnya dimenangkan oleh Ethiopia berkat bantuan militer Uni Soviet dan Kuba. Akan tetapi sengketa itu berlangsung terus. Somalia tidak bersedia melepaskan klaimnya atas Ogaden dan para pejuang Front Pembebasan Somalia Barat meneruskan perjuangan mereka.

a. Sengketa Ethiopia—Somalia

Dari bulan Juni 1977 sampai pertengahan Maret 1978 terjadi pertempuran di daerah Ogaden antara pasukan Ethiopia dan pasukan Front Pembebasan Somalia Barat (WSLF) yang dibantu oleh pasukan Somalia. Pada bulan Desember 1977 90% lebih dari wilayah Ogaden dapat dikuasai oleh WSLF dan Somalia. Tetapi pada akhir bulan Januari 1978 situasinya berbalik, pasukan Ethiopia yang mendapat bantuan moral, personal, termasuk teknisi dan militer, serta senjata-senjata dari Uni Soviet, Kuba dan beberapa negara anggota Pakta Warsawa berhasil mendesak pasukan Somalia dan setiapak demi setiapak menguasai kembali daerah Ogaden.

Selama berkecamuknya perang di Ogaden itu timbul pendapat-pendapat yang bertentangan satu sama lain dan menyalahkan pihak-pihak yang berperang. Tetapi ditilik dari pertikaian-pertikaian yang kini masih berlangsung di Tanduk Afrika itu, pada hemat kami sedikit-dikitnya ada tiga masalah pokok yang saling berkaitan dan memperuncing konflik di wilayah tersebut. Masalah itu adalah persengketaan-persengketaan antara Ethiopia—Somalia, Somalia—Kenya, dan Ethiopia—Djibouti, terutama persengketaan antara Ethiopia dan Somalia; arti strategis kawasan itu baik sebagai jalur pelayaran perekonomian maupun pangkalan militer; dan campur tangan asing dalam konflik-konflik di kawasan itu.

Persengketaan antara Ethiopia dan Somalia berpangkal pada ambisi para pemimpin Somalia untuk merealisasi negara

”Somalia Raya”, yang meliputi wilayah Somalia sekarang ini, Kenya Timur Laut, Ethiopia Timur (Somalia Barat = Ogaden) dan Djibouti. Wilayah-wilayah itu diklaim oleh Somalia, karena sebagian besar penduduknya sebangsa dengan rakyat Somalia. Dengandalih membantu Front Pembebasan Somalia Barat, pada pertengahan tahun 1977 Somalia memberanikan diri untuk mengerahkan pasukannya ke daerah Ogaden. Tetapi tujuan utamanya adalah merealisasi ambisinya untuk membentuk Somalia Raya. Sebagai akibat intervensi Somalia ini bentrokan senjata antara Somalia dan Ethiopia tidak dapat dielakkan lagi.

Ditilik dari sebabnya, konflik ini merupakan kelanjutan dari pertentangan yang telah berlangsung sejak tahun 1960. Bila demikianlah halnya, maka persoalannya kembali ke kasus klasik, yakni warisan jaman kolonial di Afrika. Benih sengketa itu ditanam ketika Inggris membagi-bagi Afrika Timur menjadi bagian Ethiopia, Somalia dan Kenya tanpa memperhatikan macam suku bangsa yang tinggal di daerah-daerah tersebut. Sebagai akibat politik Inggris itu, pada tahun 1960 Somalia mengklaim Djibouti, Somalia Barat (Ogaden) dan Kenya Timur Laut, untuk merealisasi gagasan Somalia Raya. Persoalan ini akhirnya menjadi sumber pertentangan Somalia-Ethiopia, yang mengakibatkan terjadinya pertempuran sampai tahun 1964. Tetapi penyelesaiannya tidak kunjung datang juga.

Masalah yang menarik di sini adalah keberanian Somalia untuk menyerbu Ethiopia. Ditinjau dari jumlah penduduk maupun pasukan dan perlengkapannya, Somalia adalah jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Ethiopia. Oleh sebab itu, Somalia tidak dapat disamakan dengan Israel yang telah begitu tinggi mutu tempurnya dan begitu mutakhir perlengkapan militernya. Sebagai bahan pertimbangan, menurut *The Military Balance 1977—1978* terbitan The International Institute for Strategic Studies tahun 1977 jumlah penduduk Ethiopia dewasa ini adalah sekitar 29.330.000 orang, sedangkan penduduk Somalia hanya 3.335.000 orang; dan seluruh tentara reguler (AD, AL dan AU) Ethiopia meliputi 53.500 orang, sedangkan tentara Somalia hanya 31.500 orang.¹ Kekacauan dalam

¹ *The Military Balance 1977-1978* (London, The International Institute for Strategic Studies, 1977), hal. 44 dan 46

negeri Ethiopia seperti pergolakan dalam tubuh DERG, pemberontakan yang sedang berlangsung di Eritrea, Gondar, Tigrasi dan Sidamo serta oposisi bawah tanah di kota-kota, merupakan salah satu sebab mengapa Somalia berani mengadakan intervensi ke Ogaden. Kekacauan itu memang sangat membantu intervensi Somalia, sehingga sampai kira-kira pertengahan Januari 1978 sebagian besar wilayah Ogaden dapat dikuasainya. Di samping itu, sikap Somalia yang menjauhi Uni Soviet dan mulai berpaling ke Barat diperkirakan merupakan usaha untuk mendapatkan bantuan, termasuk bantuan senjata, dari AS dan sekutu-sekutunya serta beberapa negara Arab yang moderat, yang diperlukan untuk mendukung intervensinya ke Ogaden. Tetapi bantuan senjata itu tidak kunjung datang, sedangkan bantuan besar-besaran dari beberapa negara komunis mengalir ke Ethiopia. Hal inilah yang merupakan faktor utama kekalahan Somalia di Ogaden. Besarnya bantuan negara-negara komunis dapat dilihat dari data berikut ini : 400 tank buatan Uni Soviet, termasuk T—62, 60 pesawat tempur MIG—17, MIG—21 dan MIG—23, 7.000 sampai 8.000 tentara Uni Soviet dan 10.000 sampai 12.000 tentara Kuba kini berada di Ethiopia.¹ Bahkan sumber-sumber dari medan pertempuran menyebutkan bahwa bekas penasihat pertama Uni Soviet di Somalia, Jenderal Gregori Gregorovich, kini juga berada di Ethiopia untuk ikut memimpin serangan balasan ke Ogaden.² Juga Jenderal Vasily Ivanovich Petrov (Deputy I Kasad Uni Soviet) dan Jenderal Arnaldo Ochoa (Deputy Menteri Pertahanan Kuba) berada di Ethiopia untuk maksud yang sama.³ Demikian juga pada awal April 1978 jumlah tentara Kuba di Ethiopia terus meningkat dan diperkirakan mencapai 16.000 — 17.000 orang sedangkan bantuan Uni Soviet kepada Ethiopia telah mencapai US\$ 1 milyar.⁴ Menurut Bulletin Satuan Pembebasan Somalia, Danab, tanggal 18 April 1978, jumlah tentara Kuba di Ethiopia bahkan telah mencapai 37.000 orang.⁵

1 *Kompas*, 27 Pebruari 1978

2 *Antara*, 13 Pebruari 1978/B

3 *Newsweek*, 20 Maret 1978, hal. 13-14

4 *Suara Karya*, 9 Pebruari 1978

5 *Antara*, 19 April 1978/A

b. Campur Tangan Asing

Soal lain yang memperuncing konflik Tanduk Afrika karena mengundang campur tangan asing, adalah arti strategi Tanduk Afrika, baik secara ekonomis maupun militer. Lagi pula dengan semakin meningkatnya persaingan AS dan Uni Soviet di Samudera Hindia dan Timur Tengah, arti kawasan itu menjadi semakin penting. Dari situ dapat dikontrol ke luar masuknya kapal-kapal musuh di Laut Merah, perkembangan armada di Samudera Hindia dan keamanan di kawasan Laut Arab. Di samping itu, Laut Merah adalah vital bagi Eropa Barat sebagai jalur pelayaran minyak dari Teluk Persia dan komoditi-komoditi lain dari Asia. Sebaliknya laut itu merupakan salah satu jalur pelayaran hasil-hasil industri Eropa Barat ke Asia. Jadi bolehlah dikatakan bahwa keamanan di kawasan itu adalah perlu bagi kelancaran hubungan ekonomi antara Asia dan Eropa Barat.

Karena arti strategis Tanduk Afrika, setiap persengketaan di wilayah itu mengundang campur tangan asing, yang melibatkan kedua super-power, terutama Uni Soviet. Sasaran utama campur tangan itu kiranya ialah melindungi kepentingan-kepentingan mereka masing-masing dan menguasai tempat-tempat strategis.

Bantuan secara besar-besaran dari Uni Soviet dan Kuba sedikit banyak sudah barang tentu mempunyai tujuan tersendiri. Ditinjau dari persaingan antara Uni Soviet dan AS, bantuan negara-negara komunis itu merupakan bagian dari usaha Moskwa untuk memperluas pengaruh ideologinya di Afrika dan untuk menguasai tempat-tempat strategis di Tanduk Afrika, yang sangat penting bagi pangkalan armada laut. Tujuan selanjutnya mungkin adalah memperoleh kemampuan untuk memutuskan jalur minyak dan komoditi-komoditi lain ke Eropa Barat, guna mematikan atau paling tidak mengacau perekonomian Eropa Barat. Dengan demikian diharapkan Eropa Barat hancur tanpa melalui peperangan, tetapi melalui penghancuran ekonomi. Bahkan beberapa pendapat ekstrem mengatakan bahwa tujuan Uni Soviet memperkuat pengaruhnya di Tanduk Afrika bukanlah untuk menguasai Somalia, tetapi ladang-ladang minyak di Arab Saudi.

Bantuan yang sedemikian besar dari negara-negara komunis itu telah memancing reaksi AS dan sekutu-sekutunya. AS dan Eropa Barat yang selama ini menahan diri mulai memperingatkan akan memberi bantuan senjata kepada Somalia, bila pasukan Ethiopia berani memasuki wilayah Somalia. Bahkan Presiden Jimmy Carter menyatakan bahwa bantuan Uni Soviet kepada Ethiopia itu akan mempengaruhi perundingan SALT. Memang pada tahap permulaan perang Ogaden tahun 1977, AS tidak mengindahkan permintaan Somalia, karena AS menganggap Somalia melakukan intervensi ke wilayah Ethiopia. Akhir perang Ogaden Maret 1978 dapatlah dikatakan sebagai hasil peringatan AS dan sekutu-sekutunya. Untuk sementara waktu diperkirakan bahwa bantuan negara-negara komunis itu akan berhenti pada tingkat yang sekarang ini. Uni Soviet akan bersikap hati-hati dalam memberi bantuan kepada Ethiopia, mengingat pengalaman hubungannya dengan Mesir dan Somalia yang telah mengusir seluruh personal militernya dari negara mereka. Pada hemat kami, Uni Soviet akan meminta bahkan cenderung untuk menekan Ethiopia untuk tidak melakukan intervensi ke Somalia. Karena intervensi semacam itu dapat melibatkan AS secara langsung di Tanduk Afrika. Dengan kata lain intervensi Ethiopia ke Somalia akan mempercepat bantuan senjata AS dan negara-negara Barat kepada Somalia dan mendorong Somalia untuk memutuskan segala hubungan dengan Uni Soviet.

Pada hemat kami, bantuan negara-negara komunis akan mengalir terus ke Ethiopia sampai pasukan Somalia terusir dari daerah Ogaden. Sehabis itu bantuan negara-negara komunis akan mulai seret dan berganti mereka akan meminta konsesi-konsesi sebagai imbalan. Pernyataan Moskwa pada awal Pebruari yang memberi jaminan bahwa Ethiopia tidak akan memasuki Somalia belum dapat kita percayai 100%, tetapi setidaknya-tidaknya telah memberi gambaran mengapa Uni Soviet berkata demikian. Beberapa hal rupanya merupakan sebab atau mempengaruhi sikap Uni Soviet yang sedemikian itu, termasuk keterikatan atas detente. Dikuatirkan bantuan negara-negara komunis yang sedemikian besar kepada Ethiopia akan mengalihkan pandangan Ethiopia dari masalah dalam negeri ke

masalah luar negeri dan mendorongnya untuk menyerang Somalia. Hal yang demikian ini akan semakin memperuncing konflik di Tanduk Afrika dan meningkatkannya menjadi konflik internasional. Bila terjadi perkembangan semacam ini, tiada jalan lain bagi AS kecuali memperlihatkan kekuatannya di Tanduk Afrika. Hal semacam inilah yang sangat tidak diinginkan oleh Uni Soviet.

Situasi hubungan antara Uni Soviet dan beberapa negara Arab juga merupakan alasan bagi Uni Soviet untuk tidak memberi perlengkapan militer secara besar-besaran dan rutin kepada Ethiopia. Uni Soviet tidak akan menginginkan hubungan dengan beberapa negara Arab yang telah renggang menjadi semakin renggang, atau yang masih erat menjadi renggang. Pernyataan-pernyataan Iran, Yordania, Keemiran Arab, Kuwait dan Arab Saudi yang mendesak negara-negara Liga Arab agar memberi bantuan kepada Somalia (karena Somalia merupakan salah satu negara anggota Liga Arab) untuk mempertahankan kedaulatannya, merupakan salah satu petunjuk bahwa negara-negara Arab menolak dominasi Uni Soviet di Tanduk Afrika. Beberapa negara Arab sampai sekarang berpendapat bahwa Uni Soviet merupakan salah satu negara yang memberi bantuan kepada pemberontak-pemberontak di dalam negeri dan bahwa pengaruhnya membahayakan kebudayaan Arab. Bila Ethiopia berani menyerbu Somalia, dapat dipastikan bahwa Uni Soviet akan menjadi bulan-bulanan dan bahan caci-maki negara-negara Arab yang moderat, karena Uni Soviet-lah yang berada di belakang Ethiopia. Uni Soviet tidak akan gegabah mengizinkan Ethiopia menyerbu Somalia, karena intervensi semacam ini justru akan merugikan politik luar negeri Moskwa di kalangan negara-negara Arab.

Demikian pula, Ethiopia tidak akan gegabah untuk menyerang Somalia, karena DERG menghadapi banyak persoalan dalam negeri. Di samping itu, Ethiopia tidak menginginkan image yang lebih jelek di luar negeri dengan menyerang Somalia. Sejak tahun 1974 ketika kaisar Haile Selasie meninggal, pemerintah militer Ethiopia mendapat kecaman-kecaman dari luar negeri. Bahkan akhirnya AS memutuskan untuk menghentikan bantuan senjata kepada Ethiopia sampai kemelut dalam pemerintah di negara

388

Afrika ini berakhir. Untuk sementara waktu, bila tidak terjadi hal-hal yang terlalu mendesak, Ethiopia akan cukup puas jika pasukan Somalia telah terusir dari wilayah Ogaden. Pernyataan DERG pada awal Maret 1978 dapatlah menjadi salah satu petunjuk atas sikap Ethiopia yang demikian itu.

Satu hal yang juga menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa AS dan sekutu-sekutunya Eropa Barat tidak segera mengirimkan bantuan senjata besar-besaran yang sangat diminta oleh Somalia untuk menandingi pasukan Ethiopia yang telah diperlengkapi dengan senjata-senjata dari beberapa negara komunis, meskipun AS dan sekutu-sekutunya telah menyatakan untuk mengirim senjata ke Somalia. Mengenai masalah ini terdapat banyak pendapat, tetapi pada hemat kami hal ini erat hubungannya dengan politik AS sendiri, yang pada akhir-akhir ini lebih menitikberatkan masalah dalam negeri (domestik) daripada masalah luar negeri. Hal-hal lain seperti anggapan beberapa pemimpin AS yang menyatakan Somalia sebagai pihak penyerang dalam masalah Ogaden; keterikatan AS pada detente serta kemungkinan pendapat AS yang menyatakan bahwa bantuan Uni Soviet belum begitu mempengaruhi keamanan jalur pelayaran di Laut Merah, kiranya juga mempengaruhi sikap AS tersebut di atas. Di samping itu, AS masih mempunyai armada yang cukup kuat di Laut Tengah dan Samudera Hindia yang sewaktu-waktu dapat segera dikerahkan ke Tanduk Afrika, bila keadaan di kawasan itu mengganggu kelancaran pengiriman minyak ke Eropa Barat. Selain itu, AS juga masih mempunyai teman-teman dekat yang kaya minyak seperti Arab Saudi, Iran dan beberapa negara di Teluk Persia yang sama-sama sangat berkepentingan dengan keamanan kawasan Tanduk Afrika, demi kelancaran ekspor minyak, yang sewaktu-waktu dapat memberi pertolongan ataupun dukungan kepada AS. Akan tetapi, bantuan senjata dari AS dan negara-negara Barat lainnya baik secara langsung, sedikit demi sedikit tentu akan masuk ke Somalia. Hal ini memang sangat perlu, setidaknya-tidaknya untuk mengimbangi pengaruh Uni Soviet di Ethiopia.

Suatu hal lain yang sangat menarik dalam persengketaan di Tanduk Afrika adalah sikap Israel yang membantu Ethiopia.

Bila ditilik dari persengketaan di Timur tengah, Israel boleh dikata hampir selalu bermusuhan dengan negara-negara Arab yang mendapat senjata dan bantuan lainnya dari Uni Soviet, tetapi dalam konflik di Tanduk Afrika Israel justru membantu satu negara Afrika (Ethiopia) yang dewasa ini mendapat bantuan senjata dan moral dari Uni Soviet. Israel menyatakan bahwa bantuannya bagi Ethiopia itu diberikan berdasarkan persahabatan yang telah lama terjalin antara Israel dan Ethiopia. Memang sebelum perang Arab-Israel tahun 1967, pengaruh Israel di beberapa negara Afrika, termasuk Ethiopia, adalah sangat besar. Tetapi rupanya bukan itulah alasan utama Israel untuk memberikan bantuan senjata kepada Ethiopia. Bantuan itu dimaksud untuk memperkuat Angkatan Perang Ethiopia agar dapat membasmi pemberontakan Eritrea (tetapi mungkin juga senjata-senjata itu dipergunakan oleh pasukan Ethiopia dalam perang Ogaden), sehingga Ethiopia dapat tetap menguasai Eritrea, termasuk wilayah, laut dan pangkalan-pangkalan Angkatan Laut di Laut Merah. Dengan demikian Laut Merah tidak seluruhnya dikuasai oleh negara-negara Arab, yang memang berkeinginan untuk menjadikan Laut Merah sebagai "Danau Arab". Keinginan negara-negara Arab ini kiranya akan selalu ditentang oleh Israel, karena Laut Merah merupakan salah satu laut yang sangat vital baginya. Jadi bolehlah dikatakan bahwa bantuan Israel itu bukan dimaksud secara langsung untuk menghadapi Somalia, tetapi untuk membantu membasmi pemberontakan di Eritrea, agar Israel tetap dapat mempergunakan pangkalan-pangkalan laut Ethiopia demi kepentingannya di Laut Merah.

2. PEREBUTAN PENGARUH DI DJIBOUTI

Djibouti, yang pada tanggal 27 Juni 1977 mendapat kemerdekaan dari Perancis, juga merupakan salah satu bahan sengketa antara Somalia dan Ethiopia. Djibouti merupakan salah satu wilayah yang diklaim oleh Somalia sebagai bagian Somalia Raya, yang sangat didambakan oleh para pemimpin Somalia. Di samping itu, dukungan penduduk Issa (suku terbesar di Djibouti yang masih sebangsa dengan rakyat Somalia) dan Front Pembebasan Pantai Somalia (FLCS), yang berusaha menyatukan dirinya dengan Somalia, merupakan salah satu dasar semakin

meningkatnya usaha Somalia untuk memasukkan Djibouti ke dalam negara Somalia Raya.

Tetapi sebaliknya Djibouti juga sangat penting bagi Ethiopia; di samping ada kaitan historis, Djibouti merupakan satu-satunya ujung jalur kereta api dari Addis Abeba, yang sangat penting bagi pengangkutan barang-barang ekspor maupun impor Ethiopia. Serangan balasan Ethiopia ke Ogaden yang menyusur perbatasan Ethiopia-Djibouti, rupanya juga merupakan usaha Ethiopia untuk mencegah terjadinya infiltrasi besar-besaran pasukan Somalia ke Djibouti. Jadi bolehlah dikatakan bahwa keamanan dan perkembangan selanjutnya dari Djibouti sangat penting bagi perekonomian Ethiopia. Oleh sebab itu, Ethiopia sangat menentang keinginan Somalia untuk memasukkan Djibouti ke dalam wilayah Somalia Raya.

Keinginan para pemimpin Somalia untuk merealisasi gagasan Somalia Raya itu juga ditentang oleh pemerintah Djibouti yang berkat bantuan keamanan Perancis mampu membela kemerdekaannya.

3. MASALAH ERITREA

Masalah lain yang mengganggu kestabilan di Tanduk Afrika ialah sengketa atas Eritrea antara Pemerintah Ethiopia dan kaum nasionalis Eritrea. Karena negara ini mempunyai arti strategi yang penting berkat letaknya di tepi Laut Merah, maka sengketa itu mudah mengundang campur tangan asing yang membuatnya lebih kompleks.

a. Arti Strategis Eritrea

Eritrea adalah suatu negeri Afrika yang terletak di tepi Laut Merah antara Sudan dan Djibouti yang pada tahun 1950 mendapat otonomi dari PBB, pada tahun 1952 digabungkan dengan Kekaisaran Ethiopia sebagai negara bagian dan pada tahun 1962 dijadikan propinsi. Sebagaimana halnya dengan wilayah-wilayah di Tanduk Afrika, wilayah ini tidak subur dan miskin akan barang-barang tambang. Tetapi bukan kekayaan daerah inilah yang menjadi alasan mengapa daerah

yang kering dan miskin ini menjadi bahan sengketa yang mengobarkan suatu peperangan yang sekarang belum menampakkan tanda-tanda kapan berakhir. Berkat letaknya di tepi Laut Merah Eritrea penting artinya bagi Ethiopia. Hanya melalui dan di wilayah inilah Ethiopia mempunyai jalan ke laut. Pelabuhan Massawa dan pulau-pulau di sekitarnya sangat penting artinya bagi perkembangan Angkatan Laut dan perdagangan luar negerinya.

Di samping itu, meningkatnya persaingan antara AS dan Uni Soviet, terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, meningkatkan arti penting wilayah tersebut, karena di pelabuhan-pelabuhan Eritrea dan beberapa pulaunya dapat didirikan pangkalan-pangkalan militer untuk mengawasi ataupun memonitor kapal-kapal musuh yang lewat Laut Merah. Karena arti strategis wilayah itu sengketa antara pemerintah Ethiopia dan para pejuang Eritrea mudah mengundang campur tangan asing baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Persengketaan antara Ethiopia dan Eritrea

Perang di Eritrea antara pasukan pemerintah Ethiopia dan para pejuang Eritrea pada awal tahun 1978 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Perang itu mulai pada tahun 1962, ketika Parlemen Federal Ethiopia-Eritrea mengesahkan usul Parlemen Eritrea untuk menghapuskan federasi Ethiopia-Eritrea dan menjadikan Eritrea propinsi Ethiopia yang ke-14. Aneksasi Eritrea oleh Ethiopia itulah yang menjadi akar persengketaan yang kemudian menimbulkan perang Eritrea.

Besarnya jumlah pasukan Ethiopia yang tewas, luka-luka dan ditawan, serta besarnya jumlah pasukan sukarelawan Ethiopia yang terdiri dari kaum tani dan buruh yang diterjunkan dalam pertempuran itu merupakan petunjuk betapa hebatnya perang dan sulitnya pasukan Ethiopia untuk menguasai Eritrea.¹

¹ Lihat laporan korban perang Eritrea, *Antara* : 7-2-1975/B; 22-2-1975/A; 19-4-1976/B; 15-6-1976/A; 11-4-1977/A; 25-9-1977/AB; *Berita Yudha*, 28 Desember 1976; *Sinar Harapan*, 10 Januari 1977; *Berita Buana*, 3 Juni 1977; *Suara Karya*, 28 Desember 1977

Hal ini disebabkan oleh hebatnya perlawanan para pejuang Eritrea. Pasukan Ethiopia dapat menguasai beberapa kota, tetapi daerah-daerah di sekitarnya ataupun desa-desa di Eritrea praktis dikuasai oleh para pejuang Eritrea. Di samping bertempur melawan gerilyawan-gerilyawan Eritrea, pasukan Ethiopia juga menghadapi hampir seluruh rakyat Eritrea. Sekitar 20.000 orang Eritrea yang bekerja di Addis Abeba pada awal tahun 1975 kembali ke negeri mereka untuk membantu para pejuangannya. Mereka tidak bersedia untuk hidup di bawah kekuasaan orang-orang Ethiopia. Medan pertempuran yang ganas dan kualitas pasukan milisi yang baru saja memasuki dinas militer juga mempersulit gerakan pasukan Ethiopia, tetapi menguntungkan para pejuang Eritrea. Perang itu bisa berakhir dengan kekalahan tentara Ethiopia karena pasukan milisi bukan tentara yang sungguh-sungguh, persenjataannya kuno dan perbekalannya sangat kurang, sedangkan pasukan-pasukan Eritrea yang mendapat bantuan negara-negara Arab sangat tangguh. Di samping itu iklim yang kering di Eritrea merupakan medan yang sangat berat bagi kaum milisi.¹

Kendati besarnya jumlah korban dalam perang Eritrea, besarnya bantuan negara-negara Arab kepada gerilyawan di wilayah itu serta derasnya desakan-desakan dunia agar Ethiopia segera menyelesaikan konflik Eritrea secara damai, Ethiopia tidak bersedia melepaskan wilayah di tepi Laut Merah itu seperti terungkap dalam pernyataan-pernyataan DERG. Addis Abeba rupanya justru akan meningkatkan usahanya untuk mempertahankan kekuasaannya di wilayah tepi Laut Merah tersebut. Hal ini dapat kita maklumi, karena kemerdekaan Eritrea berarti bahwa Ethiopia akan kehilangan propinsinya yang ke-14 dan satu-satunya jalan ke laut, sehingga menjadi negara daratan yang tertutup.

Kunjungan para pemimpin Ethiopia ke beberapa negara Arab, Uni Soviet dan Kuba, pada tahun 1975, 1976, 1977 dan 1978, merupakan usaha diplomasinya untuk mendesak negara-negara tersebut agar tidak memberi bantuan kepada para

1- *Indonesia dan Dunia Internasional 1977*, (Jakarta, CSIS, 1977) hal. 661

pejuang Eritrea, sebaliknya agar mendukung usahanya untuk tetap menguasai wilayah di tepi Laut Merah itu. Desakan-desakan dunia serta keengganan Uni Soviet dan Kuba untuk melibatkan pasukannya di dalam perang Eritrea, untuk sementara waktu mungkin dapat mengerem operasi-operasi militer Ethiopia di Eritrea atau sedikit meredakan peperangan di wilayah itu, tetapi usaha Ethiopia untuk tetap bertahan di Eritrea akan masih terus dilaksanakan. Usul sembilan pasal yang diajukan oleh pemerintah Addis Abeba dapat memberi petunjuk mengenai kemauan Ethiopia tersebut.¹

Para pejuang Eritrea menuntut kemerdekaan berdasarkan Resolusi PBB tahun 1950 mengenai otonomi negeri Eritrea, dan akan berjuang terus untuk menegakkan kembali hak-hak nasionalnya. Sebaliknya dalam usahanya mempertahankan wilayah Eritrea itu Ethiopia berpegang teguh pada Resolusi PBB tahun 1951 mengenai penggabungan Eritrea sebagai negara bagiannya dan pada keputusan formal tahun 1962 yang mengesahkan Eritrea sebagai propinsinya.

Kemungkinan-kemungkinan akan berbentuk atau menjadi wilayah siapakah Eritrea itu, belum jelas. Suatu federasi, yang diusulkan oleh pemerintah Ethiopia pada tahun 1976, rupaya sulit untuk dilaksanakan, karena ditolak oleh rakyat Eritrea. Begitu pula kemerdekaan penuh seperti yang diperjuangkan oleh rakyat Eritrea, karena Addis Abeba berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah itu. Tetapi kemerdekaan Eritrea rupanya semakin mendapat angin. Desakan-desakan negara-negara nonblok atas Kuba agar tidak melibatkan pasukannya dalam perang Eritrea; keengganan Uni Soviet untuk melibatkan pasukannya dalam perang Eritrea; dukungan negara-negara Arab dan beberapa negara Afrika terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Eritrea serta desakan-desakan dunia, termasuk AS dan Uni Soviet atas Ethiopia agar menyelesaikan masalah Eritrea secara damai, semuanya itu memperkuat perjuangan rakyat Eritrea untuk kemerdekaan.

¹ *Ibid.*

c. **Campur Tangan Asing**

Bila konflik di Eritrea itu diperhatikan dengan saksama, tampak adanya kekuatan-kekuatan ketiga yang berusaha mengambil keuntungan dan mendapatkan pangkalan-pangkalan atau setidaknya-fasilitas-fasilitas di pelabuhan-pelabuhan Laut Merah.

Dari perkembangan-perkembangan yang telah berlangsung serta banyaknya negara yang terlibat adalah jelas bahwa konflik di Eritrea itu telah berkembang dari konflik lokal menjadi konflik regional dan bahkan konflik internasional. Konflik itu telah menimbulkan persoalan (persengketaan) baru antara Ethiopia dan negara-negara tetangganya di sekitar Laut Merah, khususnya negara-negara Liga Arab. Bantuan negara-negara Arab kepada gerilyawan-gerilyawan Eritrea, yang berupa senjata, amunisi, uang (US\$ 2 juta) dan dukungan diplomatik, mengakibatkan renggangnya hubungan antara Ethiopia dan negara-negara Arab. Bantuan negara-negara Arab itu dan usul mereka untuk memasukkan Eritrea sebagai salah satu anggota Liga Arab memang memberi angin kepada perjuangan Eritrea. Tetapi bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan merupakan usaha negara-negara Arab untuk menjadikan Laut Merah sebagai Danau Arab.

Sementara itu keengganan Uni Soviet dan Kuba untuk melibatkan pasukannya dalam perang di Eritrea telah merenggangkan hubungan antara Ethiopia dan dua negara komunis itu. Hal itu merupakan salah satu sebab diusirnya Duta Besar Kuba dan wakilnya dari negara Afrika tersebut. Keengganan dua negara komunis itu sedikit banyak dapatlah dikatakan sebagai hasil desakan-desakan negara-negara nonblok dan AS atas Uni Soviet agar tidak meningkatkan keterlibatannya di Afrika. Tetapi kami lebih cenderung mengatakan bahwa sikap Uni Soviet dan Kuba yang demikian itu memang disengaja, pertama untuk lebih mudah mendapatkan fasilitas-fasilitas pelabuhan di Eritrea, bila wilayah ini sungguh-sungguh mendapat kemerdekaan, kedua untuk mencegah hubungannya dengan negara-negara Arab menjadi lebih buruk lagi. Uni Soviet mengetahui bahwa gerakan kemerdekaan Eritrea itu didukung

oleh negara-negara Arab dan oleh sebab itu tidak gegabah melibatkan pasukannya di Eritrea.

Jadi jelaslah bahwa bantuan dan bahkan campur tangan asing di wilayah pantai Laut Merah ini bukan hanya merupakan bantuan cuma-cuma yang diberikan kepada Ethiopia atau Eritrea, tetapi mempunyai maksud-maksud tertentu, yakni menguasai wilayah yang strategis itu.

PENUTUP

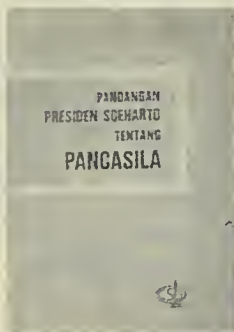
Untuk sementara waktu ini konflik di Tanduk Afrika mereda, tetapi hal itu belum berarti bahwa masalah Ogaden selesai. Gerakan kemerdekaan yang diorganisir dan dipimpin oleh WSLF masih berlanjut. Meskipun de jure masuk wilayah Ethiopia, Ogaden secara etno-linguistik lebih dekat dengan Somalia dan menurut konstitusi Somalia juga merupakan bagian dari Somalia. Selama para pemimpin Somalia berambisi untuk merealisasi Somalia Raya, maka pertentangan-pertentangan di antara negara-negara di Tanduk Afrika akan berlanjut terus. Dan bila rasa nasional masing-masing negara tersinggung, maka bara di Tanduk Afrika akan menyala dan mengobarkan bentrokan senjata.

Demikian juga, bila pernyataan gerilyawan Eritrea bahwa mereka telah menguasai 95% wilayah Eritrea itu benar, maka perjuangan rakyat Eritrea untuk menegakkan kembali hak-hak nasionalnya telah diambang pintu keberhasilan.¹ Akan tetapi belum ada kepastian karena rezim militer Ethiopia berusaha sekuat tenaga untuk menumpas gerakan itu.

Di samping itu, perebutan pengaruh antara kedua super-power berjalan terus dan belum menampakkan tanda-tanda untuk mereda, meskipun telah ada detente. Di mana Uni Soviet mengembangkan sayap pengaruhnya, di situ pulalah AS akan menandinginya, baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Begitu pula sebaliknya. Khususnya di kawasan Tanduk Afrika, yang sangat penting bagi jalur pelayaran minyak dan

1 *Pelita*, 3 September 1977

komoditi-komoditi lain ke Eropa Barat serta sangat strategis, AS maupun Uni Soviet kiranya akan terus berusaha mempertahankan dan memperkuat pengaruhnya. Kesepakatan bersama antara Perancis dan negara-negara Afrika Francophon tanggal 24 Mei 1978 untuk membentuk pasukan Pan Afrika dan kesepakatan antara AS, Inggris, Jerman Barat, Belgia dan Perancis tanggal 6 Juni 1978 untuk memberikan bantuan logistik kepada negara-negara Afrika dan memperkuat perekonomian Zaire semakin memperjelas tekad AS dan sekutu-sekutunya untuk secara sungguh-sungguh membendung perluasan pengaruh Uni Soviet di Afrika.



Masih tersedia:

Buku **PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA**, disusun dan diterbitkan oleh CSIS, tebal 95 halaman.
 Edisi biasa (kertas koran) a Rp. 350,—
 Edisi lux (kertas HVS) a Rp. 1.200,—

Juga masih tersedia Analisa-Analisa tentang:

- "Pancasila Arti dan Penerapannya" (A3/78);
 memuat karangan tentang '*Negara dan Ideologi Negara (Suatu Pengantar)*' '*Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*' ; '*Pancasila Moral Bangsa Indonesia*' (Suatu Pengantar)' - ' Menuju Sistim Ekonomi Pancasila'
 a Rp. 700,—
- "Beberapa Segi Pembangunan" (A3 + 4/77); a.l. memuat karangan tentang '*Demokrasi Pancasila*'
 a Rp. 700,—
- "Beberapa Segi Pembangunan Nasional" (A7/78);
 a.l. memuat karangan tentang '*Pancasila Moral Bangsa Indonesia-Arti Materilnya*'
 a Rp. 700,—
- "Sumpah Pemuda dan Persatuan Indonesia" (A10/78)
 a.l. memuat karangan tentang '*Pancasila dan Kebudayaan Nasional Indonesia*'
 a Rp. 700,—
- "Pembinaan Generasi Muda" (A12/78); a.l. memuat karangan tentang '*Manusia Pancasila Sasaran Pembinaan Generasi Muda*'
 a. Rp. 700,—

Pesanlah segera ke BIRO PUBLIKASI CSIS, Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telepon 349489

NIGERIA NEGARA TERKEMUKA AFRIKA KULIT HITAM

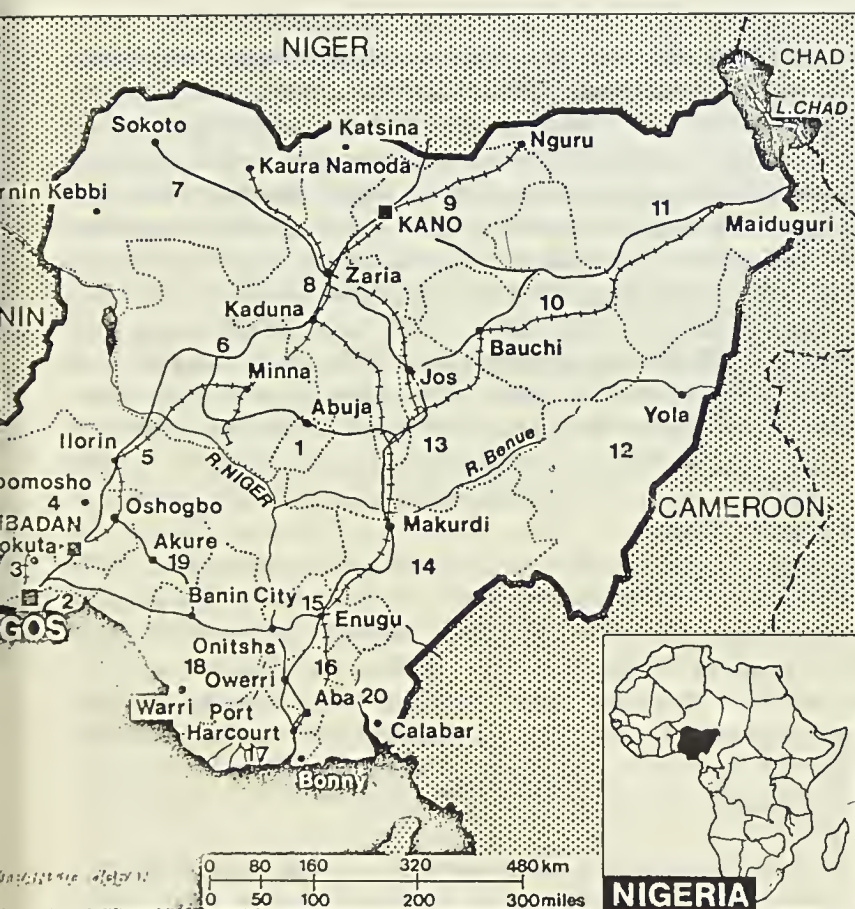
Kirdi DIPOYUDO

Kunjungan kenegaraan Presiden Carter ke Nigeria pada 31 Maret—4 April 1978 tidak hanya mengukuhkan rujuknya kembali Amerika Serikat dan Nigeria tetapi juga dimaksud untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara kedua negara itu baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik internasional. Khususnya Presiden Carter berusaha mendapatkan dukungan Nigeria bagi politik Afrika-nya karena menyadari bahwa tanpa dukungan Nigeria politiknya itu sulit dilaksanakan. Dalam waktu singkat Nigeria berhasil menyembuhkan luka-luka perang saudara (1967—1970) dan tampil ke muka sebagai negara yang terkemuka dan dominan di Afrika kulit hitam dan di Dunia Ketiga. Dengan demikian kunjungan Carter itu menggarisbawahi pentingnya kedudukan Nigeria dan perlunya memperhitungkannya.

NEGARA PENTING DI AFRIKA

Dewasa ini Nigeria adalah negara yang paling penting di Afrika kulit hitam, tidak hanya karena paling banyak penduduknya — sekitar 80 juta orang — tetapi juga karena paling besar potensi ekonominya. Nigeria masih merupakan suatu negeri agraris dan sekitar 75% penduduknya bergerak dalam sektor pertanian, yang selain cukup pangan untuk keperluan

NIGERIA



Federal Capital Area
Kaduna State
Kano State
Kogi State
Kwara State
Lagos State
Niger State
Ogun State
Ondo State
Osun State
Oyo State
Plateau State
Rivers State
Sokoto State
Zamfara State

9 Kano State
10 Bauchi State
11 Borno State
12 Gongola State
13 Plateau State
14 Benue State
15 Anambra State
16 Imo State

17 Rivers State
18 Bendel State
19 Ondo State
20 Cross River State

Source: *Africa Guide 1978* (Affron Walden, 1977), hal. 219

dalam negeri juga menghasilkan berbagai komoditi ekspor, tetapi sejak 1960 tekanan dipindahkan ke sektor industri dan pertambangan, terutama perminyakan. Eksplorasi menunjukkan bahwa Nigeria mempunyai cadangan minyak bumi yang cukup besar, yaitu sekitar 17.500 juta barrel, yang dengan tingkat produksi sekarang ini akan bertahan selama 25 tahun. Sampai tahun 1960 sekitar 70% ekspor Nigeria terdiri atas hasil-hasil pertanian seperti kakao, kacang tanah, minyak nabati, kapas dan karet. Kini ekspor utamanya adalah minyak. Produksi minyaknya telah meningkat dengan cepat, dari 140.000 barrel sehari tahun 1968 menjadi 2.000.000 barrel sehari tahun 1972 dan 2.300.000 barrel sehari tahun 1978. Dari setiap barrel yang dijual dengan harga US\$ 14,50 Nigeria menerima US\$ 12,60 termasuk pajak dan royalti. Minyak Nigeria mendapatkan harga setinggi itu karena rendah kadar belerangnya dan mudah dicapai oleh langganan-langganan Baratnya. Sekitar 60% produksinya diekspor ke Amerika Serikat. Ekspor minyaknya kini menghasilkan 95% pendapatan valuta asingnya dan 87% seluruh pendapatan nasionalnya.¹ Menurut *The Military Balance 1977 — 1978*, GNP Nigeria tahun 1975 adalah US\$ 24.300 juta. Dengan demikian Pemerintah Nigeria dapat meningkatkan anggaran pembangunannya dan mempercepat prosesnya. Pada 1 April 1975 mulai dilaksanakan rencana pembangunan lima tahun ke—3 dengan anggaran sebesar US\$ 46.000 juta.

Pemerintah militer yang dibentuk setelah pemerintah Jendral Gowon digulingkan pada akhir 1975 dan sejak bulan Pebruari 1976 dipimpin oleh Jendral Olusegun Obasanjo tidak hanya berhasil mengukuhkan hasil-hasil positif yang dicapai pemerintah Gowon, tetapi juga memberantas atau mengurangi kepincangan-kepincangan sosial yang mengganggu Nigeria seperti meluasnya korupsi di kalangan pejabat-pejabat tinggi, boom konsumsi mewah golongan kecil yang kaya raya di tengah-tengah rakyat banyak yang miskin, semakin menonjolnya jurang kaya-

1 Tentang arti penting Nigeria lebih lanjut lihat John Howe dan Richard Syngé, "Nigeria: Economic Perspectives", *Africa Guide 1978* (Saffron Walden, 1977), hal. 219-231; karangan "Nigeria: The First Black Power", *Newsweek*, 4 Maret 1974; dan Jean Herskovitz, "Nigeria, Africa's New Power", *Foreign Affairs*, Januari 1975, 314-333

miskin itu, dan sebagainya. Dia juga berhasil menertibkan aparat pemerintah, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.¹ Antara lain dapat dipercepat perluasan dan peningkatan prasarana, diatasi atau dikurangi kemacetan-kemacetan perhubungan dan kongesti pelabuhan Lagos, stagnasi pertanian dan laju inflasi, dan dicapai kemajuan-kemajuan dalam industri-industri strategis seperti industri besi dan baja, semen, pengilangan minyak, pengolahan gas bumi, petrokimia, dan dalam industri-industri ringan serta sedang seperti assembling kendaraan bermotor, tekstil, pengolahan kulit, minuman, tembakau dan sebagainya. Dengan demikian dapat diletakkan dasar yang sehat bagi pembangunan industri selanjutnya. Untuk sebagian besar semuanya itu dapat dicapai berkat kekayaan minyak Nigeria.²

Boom minyak itu mempunyai banyak akibat atas perekonomian Nigeria, antara lain laju pertumbuhan 9% setahun, cadangan valuta asing sebesar US\$ 5.000 juta tahun 1977, surplus perdagangan. Hutang luar negerinya tinggal US\$ 400 juta dan Pemerintah Nigeria kini sedang merundingkan suatu hutang baru sebesar US\$ 1.000 juta dengan suatu konsortium yang dipimpin Chase Manhattan untuk membiayai beberapa proyek pembangunan. Boom minyak juga menciptakan banyak kesempatan kerja baru. Pemerintah Federal, yang pada tahun 1966 hanya mempunyai 50.000 orang pegawai, pada tahun 1976 memberikan pekerjaan kepada 200.000 orang. Pengangguran di kalangan cendekiawan tidak berarti. Kebanyakan mahasiswa kini mendambakan ijazah dan sekolah-sekolah bisnis sangat laku. Akibat lain ialah bahwa kekayaan tradisional menjadi lebih kuat dan telah muncul suatu kelas menengah baru yang sadar akan uang. Namun boom minyak itu juga mempunyai akibat-akibat yang kurang baik. Perimbangan-perimbangan tradisional diganggu karena struktur-struktur sosial, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah berabad

1 Tentang keberhasilan pemerintah militer yang berkuasa sekarang ini lihat J.F. Ade Ajayi, "Nigeria: Recent History", *Africa South of the Sahara 1976-1977* (London, 1976), hal. 627.

2 Lihat Ojetunji Aboyade, "Nigeria: Economy", *Africa South of the Sahara 1976-1977* (London, 1976), hal. 628-634

abad berubah. Selain itu boom minyak mendatangkan boom konsumsi yang memberi angin kepada spekulasi dan pasar gelap. Uang sewa dan harga tanah industri sangat meningkat, dan pembatasan impor tidak banyak membantu menekan inflasi, yang menurut perkiraan resmi adalah 24% setahun, tetapi mencapai 100% untuk sementara kebutuhan pokok.¹

POLITIK LUAR NEGERI

Sesuai dengan kekayaan baru itu pemimpin-pemimpin bangsa merasa bahwa Nigeria wajar menjadi pemimpin Afrika. Dr. Okoi Arikpo sewaktu menjabat sebagai Menlu dalam Pemerintah Gowon pernah berkata: "Kami ingin menggunakan kekuatan politik dan ekonomi kami untuk menggalang persatuan Afrika. Kami ingin memungkinkan negara-negara Afrika mengembangkan kepercayaan akan diri sendiri dan lebih mengandalkan dirinya, agar suara mereka dalam soal-soal internasional menjadi lebih efektif. Selain itu kami ingin melihat Nigeria menduduki tempatnya dalam percaturan politik dunia yang seimbang dengan besarnya".² Terdapat petunjuk-petunjuk bahwa Pemerintah Jendral Obasanjo yang berkuasa sejak Pebruari 1976 sependapat. Nigeria tidak hanya bermaksud memegang peranan politik yang penting di Afrika melainkan juga bergerak di gelanggang internasional atas dasar persamaan dengan negara-negara besar lainnya.

Tahun yang lalu (1977), setelah keadaan mantap kembali menyusul usaha kudeta yang berhasil menewaskan Kepala Negara Jendral Murtala tetapi gagal merebut kekuasaan, Pemerintah Nigeria mulai mengambil berbagai prakarsa dalam politik luar negeri, antara lain usaha penengahan dalam sengketa Angola-Zaire sehubungan dengan krisis Shaba; tawaran untuk menjadi penengah dalam sengketa perbatasan Chad-Libia; partisipasi dalam perundingan-perundingan untuk

1 Lihat karangan Jean Pierre Langellier, "Nigeria: The Apprenticeship of Power", *The Guardian*, 26 Maret 1978; lihat juga S.A. Madujibeya, "Oil and Nigeria's Economic Development", *African Affairs*, 75 (1976), hal. 284-316

2 Wawancara yang dimuat dalam *Newsweek*, 4 Maret 1974

menyelesaikan masalah Rhodesia dan Namibia; kunjungan Kepala Negara Jendral Obasanjo ke Washington yang mengukuhkan rujuknya kembali Nigeria dengan Amerika Serikat; dan usaha yang berhasil untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Nigeria juga menjadi tuan rumah berbagai pertemuan dan kejadian penting seperti festival kesenian kulit hitam sedunia, pertemuan anti apartheid dan pameran perdagangan internasional.¹ Kebanggaan Nigeria itu mendapat angin dari perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Nigeria. Karena merasa bahwa Nigeria ingin dimengerti, dihormati dan diajak berunding, Amerika Serikat menanggapi dengan tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan bersahabat. Bulan Pebruari 1977 Andrew Young secara istimewa menyebutkan Nigeria sebagai kunci masalah-masalah Afrika dan calon sekutu Amerika Serikat yang paling kuat di Afrika. Dan ketika Jendral Obasanjo berkunjung ke Washington, Presiden Carter tidak hanya menyambutnya sebagai sahabat dan penasihatnya, tetapi juga memujinya sebagai seorang pejoang kemerdekaan yang berani.

Tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan itu berhasil memulihkan hubungan baik kedua negara yang menjadi terasing satu sama lain akibat perbedaan pendapat dalam perang saudara di Nigeria. Walaupun Pemerintah Amerika Serikat mengambil sikap netral, pendapat umum di negara itu sangat mendukung gerakan separatis Biafra, dan pada tahun 1973 Washington, yang sedang dilanda skandal Watergate, membatalkan rencana kunjungan Jenderal Gowon. Munculnya Jendral Murtala sebagai Kepala Negara Nigeria mengobarkan kembali sikap anti Amerika di Nigeria. Dengan mengakui pemerintah MPLA sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di Angola dan mempengaruhi kebanyakan anggota OAU untuk mengikuti jejaknya itu, Nigeria merong-rong pengaruh Washington dan menggagalkan politiknya mengenai Angola. Bulan April 1976 Menlu Kissinger bermaksud

1 Tentang politik luar negeri Nigeria lebih lanjut lihat James Mayal, "Oil and Nigerian Foreign Policy", *African Affairs*, 75 (1976), hal. 317-330; lihat juga Jean Pierre Langellier, "Nigeria: The Apprenticeship of Power", *The Guardian*, 4 April 1978

mengunjungi Nigeria dalam diplomasi kelilingnya di Afrika untuk menyelesaikan masalah-masalah Afrika bagian selatan, tetapi Pemerintah Nigeria menolaknya.

Pemulihan hubungan baik itu mempunyai berbagai alasan. Pertama, Amerika Serikat mempunyai seorang presiden baru yang dipilih oleh orang-orang kulit hitam, menyatakan bermaksud untuk memperjuangkan hak-hak azasi manusia, dan menunjuk seorang kulit hitam sebagai Dubes untuk PBB, dan secara demikian memulai suatu politik Afrika yang tidak mendukung rezim-rezim minoritas kulit putih. Langkah-langkah itu telah memperbaiki wajah Pemerintah Amerika Serikat di Afrika, khususnya di Lagos. Kedua, Nigeria adalah pensuplai minyak yang terbesar sesudah Arab Saudi bagi Amerika Serikat. Sekitar 60% produksi minyaknya diekspor ke Amerika Serikat. Dalam dua tahun terakhir perdagangan antara kedua negara itu meningkat dua kali. Dengan sengaja Amerika Serikat memilih Nigeria sebagai sekutu utamanya di Afrika. Pendekatan itu dipermudah dengan adanya bahasa bersama (bahasa Inggris) dan usaha Amerika Serikat untuk membiarkan Nigeria mengklaim mampu menyakinkan diplomasi Amerika untuk menempuh jalan progresif.¹

Negara-negara tetangga menghadapi Nigeria yang kuat itu dengan hormat campur ketakutan. Untuk melancarkan strategi Afrikanya, Nigeria mensponsori pembentukan *Masyarakat Negara-negara Afrika Barat* dengan 16 negara anggota pada bulan Mei 1975, suatu organisasi untuk kerjasama dan pembangunan regional. Masyarakat ini tidak hanya bermaksud membentuk suatu uni duane dalam 15 tahun mendatang menurut model MEE, tetapi juga suatu daerah koordinasi pertumbuhan ekonomi.² Dia memberikan berbagai keuntungan kepada

1 Mengenai hubungan antara Nigeria dan Amerika Serikat lihat karangan "The Nigeria Factor", *Foreign Report*, 19 Oktober 1977; lebih lanjut lihat Oye Ogundadejo, "Nigeria and the Great Powers: The Impact of the Civil War on Nigerian Foreign Relations", *African Affairs*, 75 (1976), hal. 14-32

2 Lihat Levi A. Nwachuku, "Nigeria's Uncertain Future", *Current History*, Nopember 1976, hal. 165-169; lihat juga John Howe dan Richard Syngé, "Nigeria: Political Issues" *Africa Guide 1978* (Saffron Walden, 1977), hal. 245

Nigeria. Antara lain dia merupakan pasaran bagi industri Nigeria yang berkembang seperti terlihat dalam meningkatnya perdagangan antara Nigeria dan Pantai Gading yang meliputi minyak lawan hasil-hasil pertanian. Lebih penting lagi, masyarakat itu memungkinkan Nigeria, yang terkepung oleh negara-negara Frankofon yang homogin, keluar dari isolasi politik dan kebudayaannya. Sebaliknya Nigeria memberikan bantuan tidak langsung kepada negara-negara tetangganya. Untuk menghindari larangan OPEC untuk menjual minyak dengan rabat, Nigeria membentuk suatu dana dalam kerangka Bank Pembangunan Afrika, yang memberikan pinjaman-pinjaman dengan bunga rendah.

Negara-negara tetangga merasa bahwa kemurahan serupa itu dimaksud untuk melicinkan jalan bagi dominasi Nigeria. Dan Pemerintah Nigeria sendiri sulit menghilangkan rasa takut itu dengan tindakan yang diambilnya baru-baru ini di PPB. Menurut giliran, Niger akan menduduki kursi tidak tetap di Dewan Keamanan. Namun Nigeria mengabaikan hal itu dan dengan dukungan Amerika Serikat mencalonkan dirinya dan mengalahkan Niger pada pungutan suara kelima. Niger mengecam Nigeria tak tahu terima kasih dan ingin menguasai kawasan.

Sejak lama Lagos memimpin perjuangan untuk membebaskan rakyat kulit hitam di Afrika bagian selatan dari kekuasaan minoritas kulit putih. Dalam pidato pembukaannya pada pertemuan anti apartheid yang diadakan di Lagos bulan Agustus 1977, Jendral Obasanjo mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan Barat yang mempunyai bisnis di Afrika Selatan tidak boleh beroperasi di Nigeria. Tetapi politik itu kenyataannya dilakukan dengan hati-hati. Nigeria tidak dapat mengusir 4/5 dari perusahaan-perusahaan yang berkantor di wilayahnya. Tetapi Pemerintah hanya mengundang perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai hubungan dengan Afrika Selatan untuk mengadakan suatu kontrak.¹

1 Lihat *Antara*, 29 Agustus 1977

MENUJU PEMERINTAHAN SIPIL

Perkembangan lain yang menarik ialah rencana pemerintah militer untuk memulihkan pemerintahan sipil dan langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Belum lama berselang Konstituante Nigeria yang terdiri atas 232 orang bersidang untuk membahas rancangan konstitusi yang disusun oleh suatu tim ahli 50 orang di bawah pimpinan ahli hukum terkemuka F.R.A. Williams. Selama 10 minggu mereka mengulas, menimbang dan mengkritik naskahnya dengan leluasa. Rancangan konstitusi ini banyak menyimpang dari sistim Westminster, yang dianut Nigeria sejak kemerdekaan sampai kaum militer mengambil alih kekuasaan, dan secara mendalam diilhami sistem pemerintahan Amerika Serikat. Suatu lembaga eksekutif yang kuat diimbangi dan diawasi suatu lembaga legislatif yang terdiri atas dua majelis. Seorang presiden dan wakil presiden akan dipilih pada daftar yang sama oleh rakyat untuk paling lama dua masa jabatan 4 tahun. Dewan Perwakilan yang dipilih oleh rakyat diimbangi dan dilengkapi oleh suatu Senat yang terdiri atas wakil-wakil negara-negara bagian, 5 orang dari masing-masing negara bagian.¹

Untuk memahami perkembangan itu kita harus kembali ke tanggal 13 Pebruari 1976 ketika Kepala Negara Jendral Murtala tewas dalam suatu usaha kudeta yang dipimpin oleh Letkol Bukar S. Dimka dan gagal merebut kekuasaan karena pemerintah militer langsung bertindak untuk menumpasnya. Berkat vitalitas, kepribadian, kesederhanaan cara hidup dan tekadnya untuk melenyapkan korupsi yang tersebar luas di bawah pemerintahan Jendral Gowon, Jendral Murtala menjadi sangat populer dan disanjung sanjung oleh rakyat. Kematianannya telah menjadikannya seorang pahlawan, suatu perkembangan yang lebih berarti karena rakyat Nigeria sebelumnya terlalu pecah untuk bersatu sekitar seorang pemimpin. Untuk pertama kalinya orang-orang Yoruba dari barat daya menangisi seorang pemimpin yang berasal dari suku Hausa di sebelah utara. Kawan-kawan

1 Lihat Jean Pierre Langellier, "Nigeria: The Apprenticeship of Power", *The Guardian*, 26 Maret 1978; lihat juga John Howe dan Richard Syngé, "Nigeria: Political Issues", *Africa Guide 1978* (Saffron Walden, 1977), hal. 245-246

Murtala dalam pemerintah tidak membuang-buang waktu untuk memajukan legenda Murtala. Di seluruh negeri namanya diberikan kepada banyak gedung pemerintah, sekolah, stadion dan lapangan terbang. Para penulis, pengarang dan penyanyi mengagungkan 201 hari pemerintahannya. Potretnya dibiarkan berbulan-bulan di kantor-kantor pemerintah di samping potret penggantinya Jendral Olusegun Obasanjo. Beberapa orang ideolog bahkan menyusun suatu doktrin yang disebut "Ramatisme" atas dasar azas-azas politik yang dilaksanakannya.¹

Segera setelah mengambil alih kekuasaan, pemerintah baru yang dipimpin Jendral Murtala mendapat wajah yang memancarkan ketegasan dan kepemimpinan. Pola pemerintahan diubah. Dewan Militer Tertinggi menjadi pusat kekuasaan sebenarnya, dan gubernur-gubernur militer bukan lagi anggota melainkan menerima perintah-perintah dari Dewan lewat Kepala Staf Markas Besar Angkatan Bersenjata. Gubernur-gubernur dihimpun dalam Dewan Nasional Negara-negara yang dibentuk sebagai badan penasihat Dewan Militer Tertinggi. Kebanyakan gubernur ditunjuk untuk negara bagian lain dari negara bagian asal mereka sehingga dapat menghadapi kelompok-kelompok dan daerah-daerah dalam negara bagian secara tidak memihak dan juga tidak tergoda untuk menyusun suatu dasar kekuasaan. Akibat praktis sistem baru ini ialah bahwa keputusan-keputusan pemerintah menjadi tanggung jawab Dewan Militer Tertinggi.

Hanya dalam waktu 6 bulan Pemerintah Murtala berhasil menyusun suatu program politik yang terperinci dan menetapkan bahwa pemerintahan sipil akan dipulihkan pada 1 Oktober 1979. Keputusan-keputusan Pemerintah Gowon yang paling tidak populer dicabut kembali, antara lain hasil sensus 1973 yang menurut banyak orang dipalsukan dan menimbulkan ketegangan utara selatan dan perpecahan. Festival Kulit Hitam Sedunia ditangguhkan dan disederhanakan. Beberapa masalah sulit yang dihindari oleh Pemerintah Gowon ditangani dengan cepat. Antara lain dibentuk suatu mekanisme untuk menyusun Nigeria kembali menjadi 19 negara bagian, dan atas rekomendasi suatu

1 Lihat karangan Jean Pierre Langellier, "Nigeria: The Apprenticeship of Power", *The Guardian*, 26 Maret 1978

komisi ahli diputuskan untuk memindahkan ibukota. Tindakan-tindakan diambil untuk mengatasi kongesti pelabuhan Lagos, menekan inflasi, dan mengatasi kekurangan bensin dan bahan-bahan pokok. Tetapi tindakan yang paling dramatis ialah penerbitan instansi-instansi pemerintah, termasuk pengadilan, polisi, tentara, perguruan-perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan negara dengan memecat atau memensiunkan pejabat-pejabat yang korup, tidak becus atau tidak cocok karena telah lanjut usia, terganggu kesehatannya atau mempunyai urusan-urusan lain. Tindakan itu dibarengi dengan pemeriksaan dan penyitaan kekayaan gubernur-gubernur dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang terbukti menggelapkan uang negara. Dalam-pembersihan itu sepuluh dari dua belas gubernur militer dipecat dan kekayaan mereka yang berjumlah puluhan juta dollar disita. Selain itu lebih dari sepuluh ribu orang pegawai negeri karena berbagai alasan dibebastugaskan.¹

Kepercayaan rakyat pada pemerintah meningkat dengan ditepatinya janji-janjinya satu per satu, dan dengan diambilnya langkah-langkah untuk memulihkan pemerintahan sipil sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Dalam pada itu pemerintah menggunakan segala kesempatan untuk memberikan jaminan kepada rakyat bahwa janji itu akan ditepati sepenuhnya. Sejauh ini tiada sesuatu dalam tingkah laku pemimpin-pemimpin militer yang memberikan alasan untuk meragukan kejujuran mereka. Segala batas waktu ditepati secara saksama. Pada bulan September 1976 komisi 50 orang ahli menyerahkan rancangan konstitusi. Bulan Desember berikutnya telah dipilih 8.000 orang dewan-dewan lokal yang sebagai dewan pemilih pada 31 Agustus 1977 memilih 203 dari 232 anggota konstituan-te, sedangkan 29 orang lainnya, termasuk 9 orang dari Dewan Militer Tertinggi, ditunjuk oleh pemerintah. Dua langkah lain masih harus diambil, yaitu pencabutan larangan terhadap partai-partai politik bulan Oktober 1978 dan pemilihan dewan legislatif setahun kemudian. Rupanya para pemimpin militer takut kehilangan kepercayaan rakyat dengan mengambil suatu langkah yang salah. Di lain pihak mereka menolak segala tekanan dari

1 Lihat J.F. Ade Ajayi, "Nigeria: Recent History", *Africa South of the Sahara 1976—1977* (London, 1976), hal. 627

sedikit orang yang kurang sabar dan ingin mempercepat normalisasi keadaan. Bulan Nopember 1976 polisi misalnya membubarkan suatu pertemuan para penentang pemerintah yang diadakan di Kano, Nigeria Utara. Kemudian pemerintah memperingatkan kaum politisi jangan membentuk partai politik dengan nama jenis organisasi lain sebelum waktunya. Dengan demikian era baru Nigeria kiranya akan mulai bulan Oktober 1979.¹

PEMERINTAH SEKARANG

Pemerintahan kini dipegang oleh orang-orang muda. Kepala Negara Jendral Obasanjo adalah yang paling tua dan dia baru berusia 41 tahun. Rekan-rekan terkemukanya seperti Brigjen Shehu Yar'adua, Kepala Staf AB, dan Brigjen Joseph N. Garba, Menteri Luar Negeri baru berusia 35 tahun. Mereka mendapat pendidikan di Sandhurst dan lembaga-lembaga Inggris yang terkenal lainnya. Sementara di antara mereka pernah bertugas dalam Pasukan Perdamaian PBB: Obasanjo di Kongo (kini Zaire) dan Garba di Kashmir. Mereka adalah juga pragmatis dan nasionalis.

Di atas kertas kekuasaan eksekutif dibagi antara tiga lembaga pengambilan keputusan, yaitu Dewan Militer Tertinggi 23 orang, Dewan Eksekutif Federal atau kabinet 25 orang termasuk 15 orang sipil, dan Dewan Nasional Negara-negara yang secara teoritis mengkoordinasi prakarsa-prakarsa 19 gubernur dan mewakili Dewan Militer Tertinggi. Tetapi de facto Nigeria kini diperintah oleh tiga serangkai yang terdiri atas Jendral Obasanjo, Brigjen Yar'adua dan Letjen Theophilus Y. Danyuma. Obasanjo mula-mula rupanya adalah primus inter pares, tetapi segera berhasil menegakkan kekuasaannya. Dia mendapatkan wajah seorang pemimpin yang tegas dan realistis. Di sampingnya, Yar'adua, anggota suatu keluarga terkemuka di Nigeria Utara, mengendalikan politik dalam negeri dan berfungsi sebagai perdana menteri. Dilaporkan bahwa dia adalah seorang ambisius

1 Lihat Jean Pierre Langellier, "Nigeria: The Apprenticeship of Power", *The Guardian*, 26 Maret 1978

dan merupakan teoritikus rezim, tetapi loyalitasnya tidak pernah dipersoalkan. Anggota tiga serangkai yang ketiga adalah Danyuma, seorang Kristen dari Nigeria Tengah.

Keputusan-keputusan penting disiapkan oleh Dewan Eksekutif Federal dan diserahkan kepada Dewan Militer Tertinggi yang mengambil tanggung jawab.

Dalam pada itu sementara cendekiawan muda tidak percaya bahwa pemerintah sipil, setelah dibentuk, akan bertahan lama. Menurut seorang wartawan di Lagos, pada tanda bahaya pertama Angkatan Bersenjata akan kembali dan mengambil alih kekuasaan. Mereka akan merasa bangga telah memberikan kesempatan kepada orang-orang sipil. Dan mereka akan mendapatkan suara rakyat untuk berkuasa lagi. Benar atau tidak pendapat itu, kelangsungan pemerintah sipil akan bergantung pada kemampuannya untuk menguasai perkembangan ekonomi Nigeria dan mewujudkan tujuan-tujuan nasionalnya.

PERSATUAN NASIONAL

Di samping pembangunan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan pemanfaatannya demi kesejahteraan rakyat, pembinaan persatuan nasional merupakan tugas utama pemerintah Nigeria. Dalam waktu yang cukup singkat Nigeria berhasil mengatasi akibat-akibat buruk perang saudara (1967—1970) dan bangun kembali untuk menjadi suatu kekuatan politik dan ekonomi yang dominan di Afrika. Hal itu adalah hasil kekayaan minyak Nigeria dan politik perdamaian nasional Pemerintah Gowon, yang tidak hanya melarang pembalasan-pembalasan terhadap bekas pemberontak, tetapi juga berusaha untuk mengintegrasikan mereka dalam masyarakat. Pengangkatan kembali pegawai-pegawai negeri Biafra dan pengembalian pangkat kepada banyak militer ikut menyembuhkan perasaan-perasaan yang tersinggung. Dalam suasana itu orang-orang Ibo berkat vitalitas, bakat organisasi dan kegairahan kerja mereka serta bantuan keuangan pemerintah,

1. *Ibid.*

berhasil menempati kembali kedudukan mereka dalam perekonomian negeri. Banyak orang pedagang dan bisnis makmur kembali, tidak hanya di negeri mereka, tetapi juga di Lagos. Namun tidak terjadi diaspora baru. Mereka belum melupakan pembantaian orang-orang Ibo di Nigeria Utara tahun 1966. Misalnya Universitas Zaira, salah satu yang terkemuka di Nigeria, praktis tidak mempunyai mahasiswa Ibo.¹

Namun orang-orang Ibo mengeluh bahwa mereka kurang diwakili pada eselon teratas pimpinan politik maupun militer, dan keluhan ini rupanya beralasan. Beberapa Dubes dan Menteri, kepala Perusahaan Kereta Api, seorang kepala Pengadilan Tinggi dan pejabat-pejabat lain adalah orang Ibo, tetapi kasus-kasus yang ditonjolkan oleh pemerintah itu dapat menyesatkan. Dari 25 orang Dewan Eksekutif Federal hanya terdapat 2 orang Ibo, dan Dewan Militer Tertinggi dikuasai oleh perwira-perwira dari kedua suku besar lain, yaitu suku Hausa dari Nigeria Utara dan suku Yaruba dari Nigeria Barat.

Delapan tahun sesudah kapitulasi Biafra, loyalitas etnis yang tersirat dalam perlawanan itu masih kuat. Tetapi pelajaran Biafra nampak dalam harapan umum bahwa bangsa Nigeria tidak akan mengalami tragedi serupa itu lagi. Godaan untuk memisah rupanya telah hilang, dan pembinaan semangat nasional merupakan tugas utama pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah meneruskan re-organisasi pemerintahan yang dimulai oleh Jendral Gowon. Karena persatuan Nigeria selalu diancam oleh persaingan antara ketiga regio besar yang perbatasannya hampir sama dengan perbatasan etnis, pemecahan pengelompokan-pengelompokan lama menjadi lebih banyak negara bagian ikut mengurangi permusuhan itu, khususnya antara umat Muslim di Nigeria Utara dan umat Kristen di daerah pantai Nigeria Selatan. Itulah alasan keputusan Pemerintah Gowon untuk menambah jumlah negara bagian dari 7 menjadi 12. Oleh sebab ditantang oleh suku Ibo, keputusan itu

¹ Lihat Jean Pierre Langellier, "Nigeria: The Apprenticeship of Power", *The Guardian*, 4 April 1978; dan Jean Herskovitz, "One Nigeria", *Foreign Affairs*, Januari 1973, hal. 393-407

mengobarkan perang saudara. Sesuai dengan rekomendasi suatu komisi yang dibentuk segera setelah mengambil alih pemerintahan, Jenderal Murtala memperluas politik Gowon itu dan bulan Pebruari 1976 mengumumkan keputusan pemerintahnya untuk membagi Nigeria kembali menjadi 19 negara bagian dan memindahkan ibukota dari Lagos ke Abuja, yang terletak di luar kekuasaan salah satu suku besar.

Pemerintah juga berusaha memperkuat kekuasaan pemerintahan federal atas negara-negara bagian. Kesembilanbelas gubernur selaku wakil Dewan Militer Tertinggi mempunyai status semacam pro-konsul. Kekuasaan federal itu lebih terasa dalam bidang ekonomi. Menentukan harga komoditi ekspor pertanian seperti kapas, kakao, dan minyak nabati dahulu adalah hak negara bagian masing-masing, tetapi kini dilakukan oleh pemerintah federal. Lagi pula, pendapatan minyak hampir seluruhnya masuk kas federal. Dan pada tahun 1973 pemboran lepas pantai dijadikan tanggung jawab federal secara eksklusif. Pemerintah Federal juga memiliki monopoli atas pajak yang dipungut dari perusahaan-perusahaan asing dan membaginya lewat suatu dana bersama, tetapi 4/5 tinggal di kas federal. Secara kasar, pendapatan 19 negara bagian adalah kurang dari 1/3 pendapatan federal. Sebagai akibatnya negara-negara bagian sering mengalami kesulitan-kesulitan keuangan.¹

Akan tetapi satu hal adalah pasti : wajah pemerintah federal yang lemah dan dirong-rong oleh feodalisme regional sudah merupakan sejarah. Dengan menguasai keuangan negara, pemerintah federal dapat memajukan kepentingan-kepentingan nasional. Bulan Desember 1977 pemerintah mengumumkan bahwa mulai April 1978 semua stasiun radio akan dikuasai pemerintah federal. Pemerintah juga melaksanakan suatu politik pendidikan yang ambisius demi persatuan nasional. Program pendidikan dasar yang umum dan cuma-cuma, yang dimulai bulan September 1976, tidak hanya dimaksud untuk mendemokrasikan pendidikan, tetapi juga untuk memperkuat

1 Lihat Jean Pierre Langellier, "Nigeria: The Apprenticeship of Power", *The Guardian*, 4 April 1978

federasi Nigeria dan mengembangkan kebanggaan sipil serta nasionalisme di kalangan kaum muda. Setiap pagi berjuta-juta anak sekolah memberi hormat kepada bendera, berjanji akan setia kepada negara dan menyanyikan lagu kebangsaan. Dengan demikian nasionalisme berkembang secara berangsur-angsur.

Untuk mencegah berkobarnya kembali pertengkaran-pertengkaran lama, rezim militer Nigeria mengadakan beberapa jaminan yang efisiensinya masih harus dibuktikan. Antara lain rancangan konstitusi menganjurkan agar perkumpulan-perkumpulan didorong untuk menerobos tembok-tembok etnis, bahasa dan agama. Selain itu partai-partai politik harus terbuka untuk semua warganegara atas "dasar nasional sejati". Rancangan konstitusi juga menentukan bahwa presiden dan wakil presiden paling tidak harus memenangkan 1/4 suara yang diberikan di minimal dua pertiga jumlah negara bagian. Selain itu semua orang muda Nigeria wajib menjalani dinas militer dan jika mungkin ditempatkan jauh dari daerah kelahirannya. Tentara reguler akan diorganisasi dengan semangat yang sama. Semuanya itu bukan suatu tugas yang dapat dilaksanakan dengan cepat. Apalagi benih pertentangan-pertentangan lama itu lebih sulit dilenyapkan karena selalu ada orang yang ingin mengobarkannya demi kepentingan pribadi atau golongan.¹

Lagi pula memang terdapat perbedaan-perbedaan regional segala macam. Pada tahun 1975 mahasiswa utara adalah kurang dari 6% seluruh mahasiswa. Jabatan-jabatan pemerintah sejak beberapa tahun menjadi sasaran persaingan yang meningkat. Selain itu terdapat kepineangan-kepineangan ekonomi: boom minyak terutama menguntungkan Nigeria Selatan. Menurut suatu survey tahun 1976, di negara bagian kecil Lagos terjadi 35% omzet di sektor swasta. Negara bagian ini mengerjakan 43% tenaga kerja negeri, menangani 80% pelayaran dan seterusnya. Pembagian pendapatan nasional juga merupakan sumber kontroversi yang tak habis habisnya dan masing-masing negara bagian merasa diabaikan demi keuntungan negara-negara bagian lain. Setiap keputusan ekonomi yang penting melibatkan

1 *Ibid.*

pemerintah federal dalam maneuver-maneuver yang delikat untuk menjaga perdamaian, antara lain keputusan untuk membangun kilang ketiga di Kaduna, Nigeria Utara.¹

Untuk beberapa bulan suatu kontroversi lain menunjukkan betapa sentral masalah hubungan etnis dalam politik Nigeria. Sejak kedatangan Islam, di Nigeria Utara selalu ada pengadilan sharia tempat orang-orang Islam dapat mengadu jika bersengketa dengan seorang Muslim lain. Inggris mempertahankan pengadilan-pengadilan sharia itu di Nigeria Utara dan rancangan konstitusi baru menentukan bahwa sistem itu akan diperluas ke seluruh negeri bagi umat Muslim. Usul itu memancing banyak protes dari orang-orang non-Muslim. Namun mereka tidak menghadapi risiko legal apapun karena pengadilan-pengadilan sharia itu terbatas pada orang-orang Muslim. Akan tetapi usul itu telah membangkitkan prasangka-prasangka lama dan berubah menjadi benturan Utara-Selatan.² Kepékaan tribal itu juga merupakan alasan mengapa sensus ditangguhkan untuk waktu tak terbatas. Pemerintah takut bahwa suatu sensus akan mengungkapkan penyebaran etnis baru dan menimbulkan frustrasi-frustrasi baru. Namun hal itu adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi suatu hari.

PENUTUP

Sebagai negara Afrika yang paling banyak penduduknya dan mempunyai kekayaan minyak yang besar, Nigeria mempunyai potensi pengaruh yang besar dalam percaturan politik internasional, khususnya mengenai masalah-masalah Afrika. Sejauh ini pemerintah militer Jendral Obasanjo berhasil memberantas atau menekan korupsi yang tersebar luas di bawah pemerintahan Jendral Gowon dan menertibkan aparatur pemerintahan, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan

1 Lihat John Howe dan Richard Syngé, "Nigeria: Political Issues", *Africa Guide* 1978 (Saffron Walden, 1977), hal. 243-251

2 Lihat Jean Pierre Langellier, "Nigeria: The Apprenticeship of Power", *The Guardian*, 4 April 1978

dapat berjalan dengan baik. Antara lain dia telah berhasil mempercepat perluasan dan peningkatan prasarana, mengatasi atau mengurangi kemacetan-kemacetan perhubungan, stagnasi pertanian, dan laju inflasi, meletakkan dasar pembangunan industri dan mencapai kemajuan-kemajuan dalam industri-industri strategis seperti industri besi dan baja, semen, pengilangan minyak, pengolahan gas bumi, petrokimia dan dalam industri-industri ringan dan sedang. Selain itu Pemerintah Obasanjo berhasil mengukuhkan perdamaian nasional dan mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang sehat. Terdapat banyak petunjuk bahwa pada 1 Oktober 1979 Nigeria akan mendapatkan suatu pemerintah sipil pilihan rakyat sesuai dengan janji rezim militer. Kita belum tahu apakah sesudah itu Nigeria akan mampu mengembangkan suatu pemerintahan demokratis yang mantap dan meneruskan pelaksanaan pembangunan nasionalnya dengan baik. Di bawah suatu pemerintah yang kompeten, jujur dan tegas, Nigeria akan berkembang menjadi negara besar yang dapat memainkan peranan penting, tidak hanya di Afrika tetapi juga dalam forum-forum internasional, khususnya dalam rangka perjuangan Dunia Ketiga untuk menyusun suatu tertib dunia baru yang lebih baik.



INDONESIA DAN DUNIA INTERNASIONAL

Diterbitkan setiap tahun oleh CSIS; memuat ringkasan peristiwa dalam negeri dan dunia internasional. Buku ini penting sekali untuk referensi dan dokumentasi bagi para petugas pemerintahan, mahasiswa, sarjana maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang ingin mendalami permasalahan yang dihadapi di Indonesia khususnya dan dalam dunia internasional pada umumnya. Masih tersedia:

Indonesia dan Dunia Internasional 1974 a Rp. 1.750,-
 Indonesia dan Dunia Internasional 1975 a Rp. 4.000,-
 Indonesia dan Dunia Internasional 1976 a Rp. 5.000,-
 Indonesia dan Dunia Internasional 1977 a Rp. 5.000,-
 Indonesia dan Dunia Internasional 1978

Pesanan luar kota tambah ongkos kirim 15%

PERTARUNGAN DI AFRIKA TIMUR LAUT

B. WIROGUNO

Perang Tanzania-Uganda yang berakhir dengan jatuhnya rezim Idi Amin dan dibentuknya pemerintah baru Yussufu Lule bukan saja melibatkan kedua negara itu melainkan juga merupakan bagian suatu pertarungan yang lebih luas yang sejak beberapa waktu berlangsung antara dua kelompok negara. Yang pertama terdiri atas Ethiopia, Uganda dan Libia, dan didukung oleh Uni Soviet dengan sekutu-sekutunya. Yang kedua mencakup Mesir dan Sudan dan didukung oleh Amerika Serikat. Dengan demikian pertarungan itu juga mempunyai dimensi regional dan bahkan global. Hasilnya tidak hanya penting bagi negara-negara kawasan itu melainkan juga bagi perimbangan kekuatan Timur-Barat.

PEREBUTAN AIR SUNGAI NIL

Salah satu segi pertarungan itu ialah perebutan air sungai Nil yang vital bagi perekonomian Mesir sejak jaman Pharao. Sebagian besar potensi pertanian dan industri Mesir dan Sudan masih bergantung padanya. Sebagai akibatnya penguasaan sungai Nil dan anak-anaknya menjadi suatu isu yang semakin bersifat politik. Sejak pergantian abad yang lalu Mesir dan Sudan berusaha mencapai sepakat kata mengenai pembagian airnya. Berdasarkan persetujuan tahun 1959, alokasi Sudan

adalah 18,5 milyar m³ dari 84 milyar m³ dan Mesir sebagian 55,5 milyar m³. Menurut perkiraan 10 milyar m³ menguap pada Bendungan Aswan. Akan tetapi sejak itu kebutuhan Sudan akan air banyak meningkat. Pada tahun 1959 Sudan baru menggunakan 4 milyar m³, sebagian besar untuk proyek irigasi sejuta acre di Gezira. Selama 20 tahun terakhir ini tanah irigasi Sudan tambah 3,5 juta acre dan bila proyek-proyek pembangunan dilaksanakan, Sudan akan membutuhkan lebih banyak air daripada alokasinya itu.

Mesir juga menghadapi suatu kekurangan air yang parah. Bertahun-tahun orang mengira bahwa potensi untuk memenuhi kebutuhan itu terletak dalam penyadapan sungai Nil Putih yang mengalir dari Uganda. Mesir dan Sudan sudah lama membicarakan suatu rencana untuk menggali suatu terusan yang akan mengalihkan air Nil dari daerah rawa-rawa Sudd di Sudan Selatan. Selama perang saudara berkobar usaha serupa itu tidak mungkin. Tetapi setelah perang itu berakhir, kedua negara tersebut dengan cepat menghidupkan kembali rencana mereka untuk menggali apa yang kemudian dikenal sebagai Terusan Jonglei, yang membujur 200 mil dari Bor ke Malakal. Terusan itu akan mencegah air menguap di Sudd dan menyalurkan tambahan 4,7 milyar m³ di Malakal atau 3,8 milyar m³ di Aswan.

Sehubungan dengan penggunaan air Nil itu Mesir menginginkan adanya pemerintah-pemerintah stabil sepanjang sungai itu. Itulah sebabnya mengapa Presiden Sadat sangat berkepentingan dengan perimbangan kekuatan di Afrika Tengah dan Timur. Pengiriman pasukan Mesir ke Zaire dua tahun yang lalu dan pembendungan pengaruh Libia di Uganda mengungkapkan politik Kairo untuk mengamankan sumber-sumber Nil. Presiden Nimeiri mendukung politik itu. Kunjungannya keliling di Afrika Timur tahun yang lalu dilakukan dalam rangka itu.

Sekalipun fokus diplomasi Mesir dan Sudan adalah Nil Putih, tidak dilupakan bahwa arti Nil Biru yang mengalir dari Ethiopia adalah jauh lebih penting. Sadat dan Nimeiri dengan cemas mengikuti perkembangan di Ethiopia di bawah rezim

Mengistu yang pro Soviet. Volume air yang mengalir dari Ethiopia adalah jauh lebih besar dari volume air dari Uganda. Rata-rata Nil Biru menyumbangkan 59% seluruh volume air Nil, sungai Sobat 14%, sungai Atbara 13% dan Nil Putih 14%. Ethiopia kerap kali mengancam akan memanfaatkan penguasaannya atas air Nil Biru. Pada awal 1960-an Cina menawarkan untuk membangun sejumlah bendungan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian Ethiopia dan sekaligus melawan kegiatan Soviet di Mesir Hulu dan Sudan. Akan tetapi Kaisar Haile Selassie kurang setuju karena tidak ingin mengancam penghidupan umat Kristen Koptis di Mesir yang seagama. Di bawah rezim Mengistu gagasan bendungan-bendungan itu dihidupkan kembali. Kali ini Uni Soviet menawarkan jasanya dan Addis Abeba mendekati Khartoum. Mesir telah memperingatkan Ethiopia mengenai kewajiban-kewajibannya dalam soal air dan akan berperang bila arus Nil Biru dihentikan. Akan tetapi Kolonel Mengistu mempunyai gagasan baru yang disampaikan kepada Presiden Nimeiri dalam pertemuan mereka di Sierra Leone pada pertengahan Pebruari 1979. Dalam rangka mengamankan revolusinya Mengistu bermaksud menggunakan air Nil guna memberikan tambahan pekerjaan dan pangan bagi rakyatnya. Oleh sebab dataran tinggi Ethiopia kurang baik untuk pertanian irigasi, Mengistu mengusulkan kepada Nimeiri agar menyerahkan sebagian propinsi Nil Birunya kepada Ethiopia, dan sebagai imbalan akan menjamin suplai air Nil untuk Sudan dan akan menghentikan kegiatan militernya di perbatasan. Bulan Desember 1978 pasukan-pasukan Ethiopia memasuki wilayah Sudan sampai 15 mil dengan dalih untuk mengejar kaum pemberontak Eritrea, tetapi sebenarnya untuk menekan Nimeiri. Untuk menghadapi invasi itu, Mesir atas permintaan Sudan mengerahkan empat brigade panser dan infanteri, dan sedang bersiap-siap untuk melancarkan suatu ofensif balasan guna mengusir pasukan-pasukan Ethiopia tersebut. Akan tetapi usul Mengistu itu ditolak dengan tegas oleh Nimeiri.¹

Selain itu, Uganda berkomplot dengan Libia dan Uni Soviet

¹ Mengenai perebutan air sungai Nil itu lihat karangan "The Nile: Diplomatic Eddies", dalam *Africa Confidential*, 28 Maret 1979

untuk menguasai sumber Nil Putih dan membangun sejumlah pangkalan militer di perbatasan Sudan-Uganda untuk aksi-aksi gerilya melawan rezim Nimeiri. Libia telah berulang kali mendalangi kudeta untuk menggulingkannya tetapi sejauh ini sia-sia. Namun Kaddafi tidak putus asa dan mencari jalan lain untuk mencapai sasarannya, khususnya karena menyadari bahwa Sudan merupakan kelemahan Mesir. Suatu kudeta yang berhasil melawan Nimeiri akan berarti suatu pukulan berat bagi Presiden Sadat. Sehubungan dengan itu selain membantu Ethiopia dan Uganda, Pemerintah Kaddafi juga mengambil langkah-langkah sendiri dalam koordinasi dengan kedua negara itu. Dilaporkan bahwa bila Nimeiri menolak usul Mengistu, Ethiopia dan Libia akan menyerang Sudan dari dua jurusan, sedangkan Uni Soviet dan sekutu-sekutunya akan memberikan bantuan mereka.¹

TANGKISAN MESIR

Presiden Sadat menyadari bahaya yang mengancam Sudan serta Mesir dan dengan cepat mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya. Seperti diuraikan di muka, atas permintaan Nimeiri dia dengan cepat mengirimkan empat brigade ke Sudan untuk menghentikan serbuan pasukan-pasukan Ethiopia. Pasukan-pasukan Mesir itu segera membentuk suatu garis pertahanan yang membujur dari Kassala ke jurusan tenggara sampai Doka dan Gallabat dan berhasil menghentikan gerak maju pasukan-pasukan Ethiopia. Mereka kini bersiap-siap untuk mengusir pasukan-pasukan Ethiopia dari Sudan. Sehubungan dengan itu selain mendatangkan satu brigade infanteri tambahan, Pemerintah Mesir juga mengerahkan banyak kapal perangnya ke Port Sudan, termasuk kapal-kapal perusak, kapal rudal dan kapal selam. Langkah ini khususnya dimaksud sebagai peringatan bagi Ethiopia dan Uni Soviet serta Kuba pendukungnya bahwa suatu serangan terhadap garis pertahanan di Sudan akan dibalas dengan serangan terhadap sasaran-sasaran Ethiopia dan Soviet di pantai Eritrea. Untuk mengisi kekosongan

¹ Lihat karangan "Sadat takes on Qaddafi in Uganda", dalam *Foreign Report*, 4 April 1979. Mengenai keterlibatan Uni Soviet lihat lebih lanjut karangan Peter Vanneman dan Martin James, "Soviet Thrust into the Horn of Africa : The Next Targets", *Strategic Review*, Spring 1978, hal. 33-40

di Laut Tengah akibat keberangkatan armada Mesir itu, satuan-satuan armada Amerika ke-6 berpatroli sepanjang pantai Mesir. Selain itu beberapa kali sehari pesawat-pesawat pengintai tinggal landas dari armada ke-6 itu untuk melakukan pengintaian dan pemotretan di atas daerah sengketa Ethiopia-Sudan. Informasi yang diperoleh secara demikian disalurkan ke Kairo.¹

Namun Ethiopia belum mau mundur tetapi bahkan mendatangkan lebih banyak panser, artileri dan infantri ke daerah Sudan yang didudukinya. Menurut sebuah laporan, pasukan-pasukan Ethiopia itu diperkuat oleh satuan-satuan panser Kuba. Pesawat-pesawat pengintai Amerika juga menemukan team-team teknisi, rupanya dari Jerman Timur dan Hungaria, yang sibuk membangun lapangan-lapangan untuk helikopter di belakang garis Ethiopia. Hal itu mengingatkan para analis Barat akan taktik tempur orang-orang Soviet dan Kuba yang terlibat dalam perang Ogaden tahun yang lalu. Waktu itu helikopter-helikopter M-16 dan M-18 Uni Soviet digunakan untuk mengangkut tank-tank dan pasukan-pasukan secara kilat dari front yang satu ke front yang lain. Sebagai tanggapan, Mesir mengerahkan meriam-meriam penangkis udara otomatis yang mobil dan melengkapi pasukan-pasukannya dengan roket-roket darat-ke-udara buatan Soviet.²

Untuk menghadapi ancaman yang datang dari Uganda tersebut, Mesir memanfaatkan permusuhan dan perang perbatasan Tanzania-Uganda, yang berkobar sejak Oktober 1978 ketika Uganda memasuki wilayah Tanzania. Seperti dilaporkan oleh *Foreign Report*, pada awal Januari 1979 suatu delegasi Mesir di bawah pimpinan Wakil Presiden Mubarak pergi ke Dar-es Salaam untuk menawarkan senjata, amunisi dan tenaga, termasuk 10 MIG-17. Berdasarkan suatu persetujuan rahasia yang dicapai dalam pertemuan itu, bulan Pebruari 1979 Mesir mulai mengangkut senjata dengan sejumlah perwira, penerbang dan teknisi ke Tanzania. Sebagai tanggapan Uni Soviet mengirimkan senjata ke Uganda.³

1 Lihat karangan "Sadat Defends Sudan", dalam *Foreign Report*, 21 Maret 1979

2 *Ibid*

3 Lihat karangan "Sadat Takes on Qaddafi in Uganda", *Foreign Report*, 4 April 1979

Dengan bantuan militer Mesir itu, tentara Tanzania dan orang-orang Uganda di pengasingan meningkatkan operasi militer mereka dan pada 19 Pebruari 1979 melintasi perbatasan untuk menggulingkan rezim Idi Amin. Tentara Uganda yang sangat merosot mentalnya akibat kekurangan senjata serta perlengkapan dan macetnya gaji-gaji sejak beberapa bulan tidak bersemangat untuk bertempur dan buyar. Untuk menyelamatkan Idi Amin, Kolonel Kadafi mengirimkan 2.600 pasukan dan senjata ke Uganda, sedangkan Uni Soviet mengangkut pasukan Kuba dari Angola dan Ethiopia ke Libia untuk menggantikan mereka. Rupanya Libia tidak dapat berbuat lebih banyak karena tentaranya ditempatkan di perbatasan Libia-Mesir untuk menghadapi konsentrasi kekuatan militer Mesir. Dengan demikian bantuan militer Libia itu tidak dapat menyelamatkan rezim Idi Amin. Setelah menderita banyak korban tewas dan luka-luka, pasukan-pasukan Libia diangkut pulang.¹ Pada 11 April 1979 tentara Tanzania dan pejuang-pejuang Uganda yang anti Idi Amin berhasil menduduki ibukota Kampala tanpa perlawanan dan beberapa hari kemudian Pemerintah baru di bawah pimpinan Yussufu Lule disumpah dan menggantikan rezim Idi Amin.² Dengan demikian jatuhnya Idi Amin itu juga berarti suatu kemenangan Mesir atas Libia dan sekutu-sekutunya. Hal ini bisa mengobarkan peperangan baru antara Libia dan Mesir. Kadafi bisa menyerbu Mesir untuk menebus kekalahannya di Uganda, tetapi Mesir juga bisa mengambil inisiatif untuk menyerbu Libia dan menggulingkan rezim Kadafi. Dalam kenyataan ketegangan Libia-Mesir meningkat dan kedua kepala negara itu sejak lama bertekad untuk saling menyingkirkan.

PERMUSUHAN LIBIA—MESIR

Permusuhan Libia-Mesir itu mulai pada tahun 1973 ketika Presiden Sadat menolak usul Presiden Kadafi untuk menyatukan kedua negara. Sebagai reaksi Kadafi memutuskan untuk menyingkirkan Sadat sebagai hambatan pokok untuk

1 Lihat berita AP dalam *Kompas*, 10 April 1979

2 Lihat berita AP dalam *Kompas*, 12 April 1979

realisasi visinya mengenai Dunia Arab dan pelaksanaan apa yang dilihatnya sebagai panggilannya. Visinya itu meliputi tiga unsur pokok. Yang pertama ialah Nasserisme dan sejak Nasser meninggal pada 1970 harapan serta keinginan untuk menggantikan Nasser mempersatukan dan memimpin Dunia Arab. Kadafi merasa bahwa dia lebih tepat daripada Sadat untuk mengklaim warisan spiritual Nasser berupa sikap anti Barat, Pan-Arabisme dan himbauan kepada massa. Nasser sendiri rupanya merasakannya juga. Pada tahun 1969 ketika untuk pertama kalinya bertemu dengan Kadafi, yang 23 tahun lebih muda daripada dirinya sendiri, dia berkata kepadanya : "Anda mengingatkan saya akan diri saya sendiri ketika saya seusia anda". Unsur pokok kedua ialah agama Islam dalam salah satu bentuknya yang paling fundamentalis, yang bersumber pada Quran dan tradisi Islam untuk filsafat, hukum, pemikiran politik dan teori sosial. Di dalamnya termasuk penolakan Kadafi terhadap kapitalisme maupun sosialisme sebagai isme asing dan nonIslam. Yang ketiga adalah aksi massa yang dikendalikan menurut model gagasan-gagasan Mao Tse-tung, Kuba dan Dunia Ketiga, yang dicampur dengan campuran Islam-Nasserisme. Trend itu antara lain terungkap dalam perubahan nama negara Libia dari Jumhuriyya atau republik menjadi Jamahiriyya atau negara massa.

Karena menyadari bahwa Libia adalah terlalu kecil dan terlalu marginal di Dunia Arab, lagi pula tidak mempunyai arti historis dalam sejarah Arab, untuk menjadi batu loncatan propaganda gagasan-gagasannya, pada 1972 Kadafi mengusulkan kepada Sadat untuk menggabungkan Libia dan Mesir menjadi satu negara. Dalam negara baru itu Sadat akan menjadi orang pertama sedangkan dia puas dengan kedudukan kedua. Menurut perhitungannya, dari basis kedudukan itu dia lambat laun akan bisa menjadi Nasser baru. Oleh sebab itu ketika Sadat pada musim panas 1973 akhirnya menolak gagasan penyatuan Libia-Mesir itu, Kadafi memutuskan untuk menyingkirkannya. Sejak itu dia tidak henti-hentinya berusaha untuk menjatuhkan pemerintah Sadat.¹

1 Mengenai permusuhan antara Presiden Sadat dan Presiden Kadafi serta latar belakangnya lihat karangan Daniel Dishon, "Neighbourhood Rivalry", dalam *The Jerusalem Post Magazine*, 5 Agustus 1977

Hidup dengan tetangga serupa itu jelas tidak mudah. Namun dalam keadaan normal Sadat mungkin tidak akan mempedulikan kampanye propaganda, pemboman-pemboman dan tindakan-tindakan permusuhan lain dari Libia, dan menganggap semuanya itu sebagai gangguan-gangguan kecil yang tidak banyak mempengaruhi Mesir, suatu negeri yang jauh lebih banyak penduduknya dan lebih maju daripada Libia. Akan tetapi karena alasan-alasan yang berkaitan dengan situasi dalam negeri Mesir, Sadat tidak dapat mengambil sikap serupa itu. Banyak orang Mesir yang paling terasing dari pemerintah dan politiknya sangat terbuka bagi gagasan-gagasan Kadafi, biarpun hal itu tidaklah berarti bahwa mereka itu tertarik pada pribadi Kadafi atau ingin melihatnya berkuasa di Kairo.

Mereka itu dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Pertama kaum Nasseris yang merasa bahwa Sadat mengkhianati warisan politik Nasser dengan melepaskan sosialisme Arab dan memilih liberalisasi ekonomi, meninggalkan Uni Soviet dan berpaling kepada Amerika Serikat, dan menempuh taktik luwes dalam sengketa Arab-Israel. Justru dalam hal-hal itu Kadafi menjunjung tinggi pandangan Nasser. Kelompok kedua adalah kaum tradisional Islam yang merasa bahwa Mesir telah menjadi terlalu modern, terlalu sekuler, terlalu liberal dalam moralitas umum maupun perorangan dan terlalu jauh dari apa arti Islam bagi mereka. Mereka sebagian besar adalah rakyat pedesaan dan kota kecil serta mahasiswa dari keluarga-keluarga petani di desa-desa. Bagi mereka usaha-usaha Sadat untuk menekankan kembali nilai-nilai tradisional tidak memadai, bentuk Islam al-Azhar yang resmi terlalu reformis, dan bahkan Tarekat Muslim yang disahkan kembali oleh Sadat setelah dilarang selama 25 tahun adalah jinak dan penurut. Visi Islam mereka, yang dalam banyak hal mirip dengan visi Kadafi, menjadi semakin kuat. Mereka mendukung restorasi Khalifat, ditegakkannya shari'at Islam dengan semua hukumannya seperti amputasi, perajaman dan sebagainya, dihancurkannya sistem perbankan sebagai pemakan riba, dilarangnya minuman keras dan dibentuknya negara teokrasi. Tiadanya pemimpin karismatis di Mesir sejak Nasser meninggal, dan kekosongan ideologi Sadat, telah menolong mereka menyebarluaskan gagasan-gagasan mereka. Mereka

sama sekali tertutup bagi pengaruh rezim sekarang ini, tetapi sebaliknya tertarik pada gagasan-gagasan Kadhafi.¹

Politik Sadat dijiwai oleh ketakutan akan apa yang dapat menimpa pemerintahnya apabila unsur-unsur serupa itu menanjak. Pada tahun 1973, tidak lama sebelum Mesir mengubur gagasan penyatuan Libia-Mesir, Kadhafi mengadakan kunjungan lama di Mesir untuk mencari dukungan bagi gagasan itu. Sadat membiarkan pemimpin Libia itu berbicara dengan anggota-anggota parlemen, pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin buruh, hakim-hakim, wartawan-wartawan, akademisi dan lain sebagainya, tetapi menolak permintaan Kadhafi untuk berpidato kepada rakyat Mesir lewat radio dan televisi. Dia melihat filsafat politik, politik dan potensi pengaruh Kadhafi sebagai ancaman bagi pemerintahnya.²

Permusuhan Sadat terhadap Kadhafi itu menjadi lebih mendalam akibat terjalinnya hubungan erat antara Libia dan Uni Soviet. Sejak PM Jalloud mengunjungi Moskwa pada tahun 1974 dan mengadakan suatu transaksi senjata, antara kedua negara itu terjalin hubungan baik yang menjadi semakin erat seperti terungkap dalam pertukaran kunjungan pemimpin-pemimpin dan ditandatanganinya persetujuan-persetujuan suplai senjata dan kerjasama ekonomi serta teknis pada tahun 1975 dan 1976. Transaksi senjata itu meliputi bermilyar-milyar dollar Amerika dan jauh melebihi kebutuhan angkatan bersenjata Libia maupun kemampuannya untuk menyerapnya. Menurut *Foreign Report*, suplai senjata itu meliputi 1200 tank T-62, 3000 panser, ratusan meriam berbagai kaliber, suku cadang pesawat terbang dan perlengkapan militer untuk 60.000 orang, padahal angkatan bersenjata Libia waktu itu hanya terdiri atas 29.800 orang. Secara demikian Libia menjadi suatu gudang senjata Soviet. Untuk membantu angkatan bersenjata Libia menyerap dan merawatnya, Uni Soviet juga mengirimkan ratusan ahli.³ Berkat semuanya itu Libia dapat bekerjasama dengan Uni Soviet dan

1 *Ibid*

2 *Ibid*

3 Lihat *Foreign Report*, 4 Agustus 1976

Kuba membantu Ethiopia menghadapi pemberontakan-pemberontakan di Ogaden dan Eritrea.

Oleh sebab itu Presiden Sadat melihat rezim Kadafi juga sebagai kaki tangan Uni Soviet yang mendukung usaha negara komunis itu untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dan Afrika, dan dalam rangka itu menumbangkan pemerintah-pemerintah moderat pro Barat serta mengganti mereka dengan rezim-rezim radikal pro Soviet. Dengan demikian di mata Mesir rezim Kadafi menjadi lebih berbahaya. Hal ini membulatkan tekadnya untuk menyingkirkannya. Secara demikian Sadat dan Kadafi menjadi musuh satu sama lain dan sejak itu tidak henti-hentinya berusaha untuk saling menjatuhkan. Dalam rangka itu mereka melancarkan perang propaganda, menggunakan sabotase, teror serta intimidasi dan melakukan tindakan-tindakan lain. Mereka juga menggunakan warganegara lawan yang tidak puas untuk melawan pemerintahnya.

Ketika Persetujuan Sinai II antara Mesir dan Israel ditandatangani (September 1975), Kadafi berseru kepada tentara Mesir agar memberontak dan mencegah Sadat mendatangkan "malu", "kapitulasi" dan "defaitisme" lebih lanjut bagi bangsa Mesir khususnya dan bangsa Arab umumnya.¹ Dalam rangka usaha untuk menumbangkan pemerintah Sadat itu, pemerintah Kadafi rupanya juga mendalangi atau paling tidak membantu suatu kudeta yang pada 2 Juli 1976 dilancarkan untuk menggulingkan pemerintah Nimeiri sebagai pembalasan terhadap penolakannya untuk menentang Mesir. Sudan merupakan titik kelemahan Mesir karena negara ini untuk sebagian besar bergantung pada sungai Nil yang mengalir dari Sudan. Pemerintah Nimeiri dengan bantuan Mesir berhasil menumpas usaha kudeta itu dan pada 6 Juli memutuskan hubungan diplomasi dengan Libia sebagai tanggapan atas keterlibatan rezim Kadafi dalam kudeta itu.²

Keterlibatan Libia itu memperkuat anggapan bahwa rezim

1 Lihat karangan Daniel Dishon, *loc. cit.*

2 Lihat *Antara*, 4 Juli 1976; lihat juga *Merdeka*, 13 Juli 1979

Kadafi merupakan ancaman bagi pemerintah-pemerintah moderat di Dunia Arab. Sehubungan dengan itu Mesir mencapai sepakat kata dengan Sudan dan Arab Saudi untuk menyingkirkannya dan secara demikian membendung perluasan pengaruh Soviet, yang mereka lihat sebagai bahaya bagi agama Islam dan kebudayaan Arab.¹ Dengan dukungan Arab Saudi dan Sudan, sejak Agustus 1976 Mesir mengerahkan pasukan-pasukan ke perbatasan dengan Libia dan bersiap-siap untuk menyerbunya. Akan tetapi sebelum Sadat memberikan perintah untuk serbuan itu, Kadafi mendahuluinya menyerang kedudukan-kedudukan perbatasan Mesir dan terjadi suatu peperangan selama lima hari. Berkat intervensi negara-negara Arab lain, dicapai gencatan senjata sebelum Mesir berhasil memberikan pukulan yang menentukan. Namun permusuhan berlangsung terus dan kedua pihak mengerahkan lebih banyak pasukan dan senjata ke perbatasan, sedangkan Libia menerima lebih banyak senjata dari Uni Soviet.

Selama perang perbatasan itu Kadafi mengulangi seruannya kepada angkatan bersenjata Mesir agar memberontak dan menumbangkan pemerintah Sadat. Perwira-perwira Mesir yang ditangkap dipaksa menceritakan kepada pers, bahwa dalam tubuh angkatan bersenjata Mesir terdapat rasa tidak puas dengan perintah untuk bertempur melawan Libia. Sebaliknya harian-harian Mesir menyatakan yakin "bahwa lambat laun angkatan bersenjata Libia akan menjadi sarana untuk menggulingkan mereka (Kadafi dan pendukung-pendukungnya) yang bertindak sebagai musuh bangsa Arab".²

PERMUSUHAN LIBIA—MESIR MENINGKAT

Permusuhan Libia-Mesir itu di satu pihak merupakan salah satu faktor yang mendorong Presiden Sadat untuk mengambil prakarsa perdamaian yang berani dan penuh imajinasi dengan mengunjungi Israel dan berunding dengan pemimpin-

1 Lihat *Antara*, 26 Juli 1976; dan *Newsweek* 25 Juli 1979; lihat juga *Al Ahram*, 22 Juli 1977;

2 Lihat karangan "Egypt's War with Libya", *Foreign Report*, 27 Juli 1977

pemimpinnya. Dia mengambil langkah itu karena merasa memerlukan perdamaian dengan Israel bukan saja untuk memperbaiki perekonomian Mesir yang parah tetapi juga untuk menghadapi rezim Kadafi yang mengancam pemerintahnya dan berkomplot dengan Ethiopia, Uganda dan Uni Soviet untuk mengepung Mesir dan menumbangkan kekuasaannya. Akan tetapi prakarsa perdamaian itu sebaliknya meningkatkan permusuhan Libia-Mesir. Kadafi mengecamnya sebagai kejahatan serta pengkhianatan terhadap bangsa Arab dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir. Atas prakarsanya dibentuk suatu Front Pan Arab yang terdiri atas Aljazair, Libia, Suriah, Yaman Selatan dan PLO, untuk menentang prakarsa perdamaian Sadat itu dan menghapus akibat-akibatnya. Selain itu dia berseru lagi kepada angkatan bersenjata Mesir agar memberontak. Bahkan sebelum Sadat pergi ke Israel, dia bersumpah lagi untuk menumbangkan kekuasaannya. Sesuai dengan itu dia meningkatkan usahanya untuk menjatuhkan pemerintah Sadat dalam komplotan dengan sekutu-sekutunya tersebut.¹ Lagi pula dia minta dan selama 1978 menerima suplai senjata baru secara besar-besaran dari Uni Soviet.²

Menurut sumber intelijen Barat, kampanye Ethiopia melawan Sudan tersebut dan ofensif Yaman Selatan melawan Yaman Utara dibicarakan pada suatu pertemuan yang diadakan di Moskwa pada 22 Pebruari 1979 dan dihadiri oleh Brezhnev, Kosygin, Menhan Soviet Ustinov dan Kastaf Ogarkov dari pihak Uni Soviet, Kolonel Mengistu dari pihak Ethiopia, Menhan Kuba Raul Castro, Kastaf Libia Abu Bakr Jabar dan komandan-komandan pasukan-pasukan ekspedisi Soviet dan Kuba di Libia, Ethiopia dan Yaman Selatan. Pada pertemuan itu disetujui prakarsa-prakarsa berikut. Pasukan-pasukan Ethiopia akan menghentikan gerak majunya di Sudan. Kepada Nimeiri akan ditawarkan untuk mengadakan pertemuan dengan Mengistu dan

1 Lihat *Antara*, 6 Desember 1977; dan karangan "Sadat's Stormy Wake", *Newsweek*, 12 Desember 1977

2 Menurut laporan *Foreign Report*, 21 Maret 1979, suplai senjata Soviet itu seharga 3-4 milyar dollar Amerika dan meliputi banyak tank, meriam berbagai kaliber, rudal dan lain sebagainya. Jumlah tank meningkat dari 2000 pada awal 1978 menjadi 3000 pada awal 1979.

menandatangani suatu persetujuan persahabatan. Sebagai imbalan Ethiopia akan menarik mundur pasukan-pasukannya tetapi hanya dengan syarat bahwa Nimeiri berjanji akan menyingkirkan pasukan-pasukan Mesir. Bila pada akhir Maret 1979 tawaran itu belum diterima, Ethiopia akan meneruskan gerak majunya dan Libia akan melancarkan serangan-serangan dari jurusan lain. Pada tahap berikutnya Libia akan menyiapkan suatu kampanye besar-besaran guna merebut Sudan bagian selatan. Baru-baru ini diketemukan banyak cadangan minyak di daerah itu.¹

Selain itu Libia mengerahkan lebih banyak pasukan ke perbatasan dengan Mesir sekitar waktu ditandatanganinya perjanjian perdamaian Mesir-Israel, dan Mesir menanggapinya dengan tindakan serupa. Kedua pihak kini berada dalam keadaan siap siaga dan suatu insiden bisa mengobarkan suatu peperangan baru yang lebih dasyat.² Apabila perang itu berkobar, kedua pihak akan bertempur sampai salah satu berhasil menumbangkan pemerintah lawan.

KEMUNGKINAN PERANG LIBIA—MESIR

Biarpun riskan meramalkan jalannya kejadian-kejadian, terdapat tanda-tanda bahwa cepat atau lambat akan berkobar perang total antara Libia dan Mesir. Suatu insiden perbatasan seperti terjadi bulan Juli 1977 kiranya cukup untuk mengobarkan perang serupa itu. Biarpun memiliki persenjataan lengkap dan modern, angkatan bersenjata Libia bukan tandingan bagi angkatan bersenjata Mesir, dan kiranya hanya akan mampu memberikan suatu perlawanan simbolis, sehingga tentara Mesir dapat menduduki Libia dengan cepat. Berkat adanya perdamaian dengan Israel, Mesir akan dapat mengerahkan sebagian besar kekuatan militernya. Walaupun telah memberikan janji-janji, Uni Soviet diperkirakan tidak akan berbuat sesuatu untuk menolong Libia selain mengecam Mesir dan mengeluarkan ancaman-ancaman karena tidak akan berani mengambil resiko

1 Lihat karangan "Sadat Defends Sudan", *Foreign Report*, 21 Maret 1979

2 Lihat berita AP dalam *Kompas*, 31 Maret 1979 dan 2 April 1979

konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat yang kiranya akan turun tangan bila dia melakukan intervensi militer di pihak Libia.

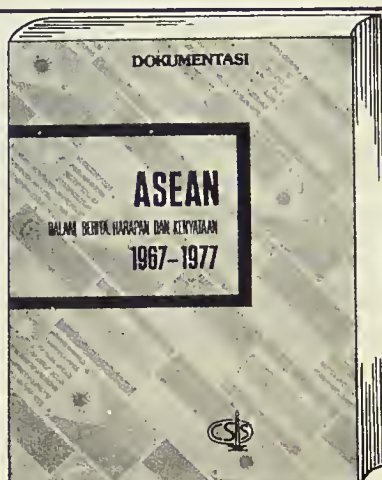
Bila perang Libia-Mesir pecah, kemungkinan besar Mesir akan mensponsori dibentuknya suatu front pembebasan Libia dan mengikutsertakannya dalam kampanye melawan rezim Kadhafi seperti dilakukan oleh Tanzania dalam perangnya melawan Uganda. Setelah berhasil menumbangkan kekuasaan Kadhafi, Mesir akan mensponsori pembentukan suatu pemerintah baru untuk menggantikannya dan menarik pasukan-pasukannya setelah pemerintah baru berhasil menguasai keadaan. Hal itu kiranya akan memuaskan semua pihak, khususnya karena akan mencegah timbulnya kesan bahwa suatu negara Arab menduduki negara Arab lain. Dengan penarikan pasukan-pasukan itu kiranya akan berakhir pula kecaman-kecaman yang mula-mula dilontarkan terhadap Pemerintah Sadat. Karena usahanya untuk mengeksplor revolusi ke mana-mana dan kesenangannya untuk mencampuri urusan negara-negara lain, Kolonel Kadhafi kiranya akan mengalami nasib seperti dialami oleh Presiden Idi Amin.

PENUTUP

Jatuhnya rezim Kadhafi dan dibentuknya pemerintah baru yang moderat dan pro Barat bukan saja akan mempengaruhi kedua negara yang bersangkutan, melainkan juga seluruh kawasan dan bahkan perimbangan kekuatan global Timur-Barat. Hal itu akan merupakan suatu pukulan berat bagi Uni Soviet dan strateginya di Timur Tengah serta Afrika, tetapi memperkuat kedudukan Amerika Serikat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan prospek perdamaian Mesir-Israel sebagai awal dan sokoguru perdamaian Arab-Israel yang menyeluruh. Rupanya terdapat suatu interaksi kuat antara perdamaian Mesir-Israel dan pembendungan pengaruh Soviet di kawasan. Berkat tercapainya perdamaian Mesir-Israel, Mesir dengan bantuan Amerika Serikat yang memadai akan mampu menjamin keamanan serta kestabilan dan membendung

pengaruh merah di Timur Tengah. Sebaliknya keberhasilan Mesir dan Amerika Serikat untuk membela sekutu-sekutu mereka terhadap ancaman merah dan ancaman radikal, akan menunjang perdamaian Mesir-Israel, dalam arti bahwa negara-negara Arab moderat akan mendukungnya dan ikut dalam proses perdamaian selanjutnya, khususnya Arab Saudi yang sejak lama cemas karena merasa dikepung oleh kekuatan-kekuatan komunis dan radikal, sedangkan kekuatan militernya sendiri tidak begitu

BUKU BARU!



ASEAN DALAM BERITA, HARAPAN DAN KENYATAAN 1967—1977.

Disusun oleh CSIS, memuat langkah-langkah para pemimpin Indonesia, Malaysia, Muangthai, Pilipina dan Singapura dalam mempersiapkan pembentukan suatu organisasi regional di Asia Tenggara dan perkembangan organisasi itu sejak berdiri tanggal 8 Agustus 1967 sampai Maret 1978 secara menyeluruh.

Berita-berita dan peristiwa-peristiwa ASEAN dapat ditemui di dalam penyajian buku ini, *harapannya* akan kita temui/terungkap di dalam deklarasi-deklarasi, persetujuan-persetujuan dan ataupun pernyataan-pernyataan ASEAN, sedangkan *kenyataannya* terungkap di dalam apa yang telah dihasilkan oleh organisasi tersebut.

Buku ini dilengkapi pula dengan lampiran-lampiran yang memuat data politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta indeks personalia dan masalah.

Penting sekali dan wajib dimiliki para peneliti, lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah, perpustakaan-perpustakaan, mahasiswa dan umum!

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES, tebal 634 hal., kertas HHI, harga Rp. 4.500,—

Persediaan terbatas! Dapatkanlah segera di toko-toko buku atau pesan langsung disertai pembayaran tambah ongkos kirim 15% ke :

BIRO PUBLIKASI CSIS, Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telp. 349489.

AFRIKA DAN TALI-TALI PENYE- LAMAT BARAT*

Dunia Barat dengan cemas menyadari ketergantungannya pada impor bahan-bahan mentah. Afrika Selatan adalah sumber utama suplai banyak mineral kritis bagi bangsa-bangsa industri. Masuknya Uni Soviet yang semakin meningkat di Afrika sebagian besar mengungkapkan ambisi lamanya untuk menguasai "mata-mata rantai lemah" suplai Barat yang rawan karena negara itu swadaya dalam bahan-bahan mentah. Orang-orang Soviet dapat mencapai sasaran itu tidak mesti lewat serangan langsung tetapi dengan berbagai cara lain seperti pengekikan perlahan-lahan, teror, serangan-serangan oleh sekutu-sekutunya dan isolasi fisik. Bahaya yang mengancam negara-negara Barat bukan saja berasal dari pemotongan suplai kritis melainkan juga dari akselerasi pengkartelan dan lain-lain trend di seluruh dunia yang memperlemah.

Tahun-tahun belakangan ini menyaksikan meningkatnya kesadaran akan masalah-masalah yang berkisar pada kebutuhan kebutuhan dunia akan bahan-bahan tambang di masa depan. Laporan-laporan yang mencemaskan tentang kekurangan mendatang akan sumber-sumber daya alam berasal dari Klub Roma yang berpengaruh dan dari instansi-instansi pemerintah di berbagai negeri. Misalnya Komisi Politik Bahan Mentah di Amerika Serikat meramalkan bahwa defisit neraca pembayaran mineral Amerika Serikat akan meningkat, dan perkiraan-perkiraan itu dikukuhkan oleh laporan-laporan tahunan yang disusun oleh

* Saduran karangan W.C.J. Van Rensburg, "Africa and Western Lifelines", dalam *Strategic Review*, Spring 1978, hal. 41-50. Dr. Van Rensburg adalah Direktur Lembaga Studi Energi dan Profesor dalam Ekonomi Energi pada Rand Afrikaans University Johannesburg

Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat berdasarkan Undang-undang Pertambangan dan Mineral tahun 1970. Menurut proyeksi-proyeksi itu defisit akan melebihi US\$ 100 milyar pada akhir abad ini. Negara-negara Eropa Barat nyaris menjadi bergantung sama sekali pada impor kebutuhan-kebutuhan mineral mereka.

Akhir jaman kolonial membawa janji bahwa negara-negara berkembang akan menjadi sumber bahan-bahan mentah yang murah dan berlimpah-limpah. Cadangan-cadangan baru di negara-negara itu dibuka dalam keadaan yang umumnya menguntungkan negara-negara industri. Namun negara-negara Dunia Ketiga sejak itu menjadi semakin tidak puas dengan harga-harga komoditi yang sedikit banyak statis sedangkan biaya impor mereka untuk barang-barang industri meningkat secara tajam. Dalam frustrasi mereka, banyak di antara mereka mengambil tindakan ekstrem dan menggunakan meningkatnya ketergantungan Barat akan impor bahan-bahan mentah untuk memperbaiki kedudukan mereka sendiri. Kekayaan asing dinasionalisasi, pajak-pajak sangat dinaikkan dan secara paksa diadakan re-negosiasi persetujuan-persetujuan.

RONG-RONGAN POLITIK PASARAN BAHAN MENTAH

Kini jelas bahwa suplai bahan-bahan mentah mineral dan sumber-sumber energi akan semakin menjadi mangsa kekuatan-kekuatan sosial dan politik, bahwa gagasan-gagasan mengenai faktor-faktor yang menguasai kelangkaan mineral harus ditinjau kembali, dan bahwa mungkin akan terjadi perubahan-perubahan dramatis dalam pola-pola perdagangan mineral dunia. Juga menjadi semakin jelas, bahwa kompetisi untuk mendapatkan bahan-bahan mentah mineral akan memainkan peranan yang semakin besar dalam perkembangan ekonomi negara-negara dan dalam perimbangan kekuatan. Penyadaran ini ikut menggeser tekanan dalam sengketa Timur-Barat. Uni Soviet mengetahui bahwa suplai bahan-bahan mentah industri merupakan suatu kelemahan pokok negara-negara industri Barat. Sesuai dengan itu dia meningkatkan usahanya untuk memperbaiki kedudukannya sehubungan dengan tali-tali penyelamat suplai bagi Barat,

mula-mula dengan sarana-sarana diplomasi dan ekonomi, tetapi belakangan ini juga secara yang lebih langsung dan agresif.

Dalam lima negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Kanada, Afrika Selatan dan Australia, terdapat lebih dari seperempat cadangan enam belas mineral strategis yang paling penting seluruh dunia.¹ Uni Soviet sebagian besar swadaya dalam suplai komoditi-komoditi itu, tetapi Amerika Serikat dalam tingkat-tingkat yang berbeda-beda bergantung pada impor kebanyakan mineral ini. Tidaklah sukar membayangkan reperkusi-reperkusi pemotongan suplai mineral dari Afrika Selatan untuk Barat. Hal serupa itu akan memperbaiki kedudukan tawar menawar pengeskor mineral lain-lain, memperkuat kecenderungan menuju dibentuknya kartel-kartel produsen yang kuat, mendorong kenaikan harga berbagai mineral dan produk mineral, dan mempunyai akibat buruk atas keamanan suplai bahan-bahan itu untuk Barat.

Afrika Selatan adalah penghasil metal dan mineral berharga, termasuk emas, platinum dan intan, yang penting di dunia. Dia mempunyai cadangan besar mineral industri yang penting lain seperti fluospar, asbestos, limestone, fosfat dan vermiculite. Di negara ini juga terdapat cadangan metal-metal penting yang paling besar di dunia, termasuk manganese, chroom dan vanadium. Terdapat pula cadangan besar bijih besi kadar tinggi dan cadangan praktis tak terbatas bijih besi kadar menengah atau rendah, dan cadangan metal-metal lain seperti niobium, tantalum, tungsten dan molybdenum yang lebih kecil tetapi berarti.

Afrika Selatan telah banyak menghasilkan tembaga, dan diharapkan bahwa produksinya, bersama sama dengan produksi tembaga hitam dan seng, akan meningkat secara dramatis akibat penemuan suatu daerah tambang metal baru yang luas di Propinsi Cape belum lama berselang. Afrika Selatan juga mempunyai cadangan besar batubara kadar rendah dan merupakan pemilik

¹ G.J.S. Govett dan M.H. Govett, Ed., *World Mineral Supplies : Assessment and Perspective* (Amsterdam, 1976), hal. 100

cadangan uranium yang ketiga di dunia. Ketergantungan negeri yang berat akan batubara, yang memenuhi sekitar 76% kebutuhan enerjinya, sangat menguntungkan menyusul krisis minyak.

Biarpun tidak memiliki sumber minyak, gas alam, bauksit, potash dan beberapa mineral lain, Afrika Selatan boleh jadi merupakan penghasil mineral yang paling swasembada di dunia kecuali mungkin Uni Soviet. Seperti dibuktikan oleh sasol (pabrik minyak dari batubara), Afrika Selatan mempunyai kemampuan untuk mengatasi kekurangan akan sumber-sumber mineral yang konvensional dengan mengembangkan teknik-teknik untuk memproses yang mengagumkan. Perkembangan-perkembangan serupa itu mungkin pula dalam hal alumina dan potash. Laboratoria riset privat, pemerintah dan semi pemerintah di Afrika Selatan telah banyak menyumbangkan keahlian dalam teknologi pertambangan, metallurgi dan industri. Dengan demikian pengembangan sumber-sumber mineral yang melimpah didukung oleh fasilitas-fasilitas riset dan pengembangan maju yang akan memungkinkan Afrika Selatan memenuhi tuntutan-tuntutan khusus suatu pasaran yang semakin sophisticated.¹

KEKAYAAN MINERAL AFRIKA SELATAN

Dewasa ini belum diketahui sepenuhnya besarnya cadangan kebanyakan mineral Afrika Selatan. Sedikit perusahaan pertambangan mengetahui seluruh cadangan, bahkan di daerah operasi mereka sendiri. Biasanya perusahaan-perusahaan itu melakukan eksplorasi pendahuluan dalam usaha untuk meramalkan luasnya cadangan mereka sampai 20 atau 30 tahun mendatang, tetapi prospeksi dan re-evaluasi cadangan-cadangan secara terperinci umumnya tidak dilakukan untuk lebih dari lima sampai sepuluh tahun mendatang. Namun tidak dapat disangkal, bahwa Afrika Selatan mempunyai bagian sangat besar cadangan sejumlah mineral yang sangat strategis di dunia (lihat Tabel 1).

1 W.C.J. van Rensburg dan D.A. Pretorius, *South Africa's Strategic Minerals — Pieces on a Continental Chessboard* (Johannesburg, 1977)

Tabel 1

CADANGAN MINERAL AFRIKA SELATAN (1975)

Nama Mineral	% Cadangan Dunia	Nomor di Dunia	Ton
Kelompok Platinum	86	1	30.000
Bijih Chroom	83	1	3.000.000.000
Vanadium	64	1	14.000.000
Emas	49	1	15.000
Bijih Manganese	48	1	3.000.000.000
Fluospar	46	1	200.000.000
Intan	7	2	10.000
Nikel	10	3	5.000.000
Uranium	17	4	250.000
Seng	9	4	12.000.000
Batu Fosfat	8	4	1.400.000.000
Asbestos	10	5	9.000.000
Antimony	4	5	200.000
Timah hitam	4	5	5.000.000
Bijih besi	4	6	10.000.000.000
Batubara	2	6	32.000.000.000
Titanium	5	8	8.000.000
Tembaga	2	10	8.000.000

Sumber : W.C.J. van Rensburg dan D.A. Pretorius, *South Africa's Strategic Minerals — Pieces on a Continental Chess board* (Johannesburg, 1977)

Arti cadangan mineral tidak dapat diukur semata mata dari luasnya. Lain-lain aspek yang sangat penting meliputi hal-hal berikut: kadar cadangan; kemungkinan untuk mengembangkannya secara ekonomis; kemungkinan cara-cara menambang; lokasinya sehubungan dengan pasaran dan prasarana; kebutuhan dalam negeri akan mineral-mineral ini; cadangan-cadangan dunia; harga-harga dan pasaran-pasaran dunia; permintaan dunia dan pola-pola permintaan; pertumbuhan permintaan dalam negeri dan asing; teknologi baru; substitusi mineral yang satu untuk yang lain; pertimbangan-pertimbangan ekonomi lain; dan faktor-faktor politik.

Penilaian cadangan-cadangan mineral di dunia dikaburkan oleh perbedaan keadaan di antara negara-negara, bersama sama dengan banyaknya variasi tingkat pengetahuan mengenai besarnya dan viabilitas ekonomi cadangan-cadangan di banyak

negara. Masalahnya dipersulit dengan adanya bermacam-macam pendekatan terhadap perkiraan cadangan dan banyaknya rencana klasifikasi untuk sumber-sumber daya. Oleh sebab itu suatu perbandingan sumber-sumber mineral berbagai negara penuh dengan hal-hal yang tidak cocok, dan setiap data kuantitatif yang digunakan dalam hubungan ini paling banter berperan sebagai suatu petunjuk mengenai potensi suatu negara tertentu untuk menghasilkan suatu mineral tertentu.

Banyak pemerintah tidak menyadari bahwa suatu politik mineral nasionalistis yang berlebihan dapat menghambat secara serius pengembangan potensi mineral suatu negeri dan membiarkan sementara cadangan mineral sebagai cadangan semata-mata. Terdapat beberapa contoh di negara-negara Dunia Ketiga di mana sebagai akibat politik nasionalistis serupa itu — bersama sama dengan kurangnya infrastruktur, keragu-raguan mengenai keamanan penguasaan dan eksploitasi struktur biaya intern yang tinggi dan kurangnya tenaga terdidik — proyek-proyek yang didasarkan atas endapan mineral yang luar biasa ditinggalkan. Di samping masalah-masalah itu, terdapat banyak perbedaan antara angka-angka cadangan yang diterbitkan oleh berbagai sumber resmi, dan suatu kecurigaan mendalam bahwa banyak angka yang diterbitkan mengenai cadangan-cadangan "nasional" tidak melebihi perkiraan, pindah dari penerbitan sumber yang satu ke penerbitan sumber yang lain dan dalam proses itu menjadi sangat ketinggalan.

Bagaimana pun juga tidak dipersoalkan bahwa politik mineral realistik suatu negeri, stabilitas politik, tingkat pajak yang wajar dan reputasi permainan wajar sangat mempengaruhi viabilitas perusahaan-perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral, dan oleh sebab itu juga besarnya cadangan mineral. Namun hanya sedikit negara di Dunia Non Komunis telah menggariskan suatu politik mineral yang jelas atau menyeluruh. Khususnya di dunia dengan inflasi tinggi, stagnasi ekonomi, harga rendah metal, meningkatnya keresahan buruh dan harga energi, faktor-faktor serupa itu sangat mempengaruhi besarnya cadangan mineral dan proses pengolahan sumber-sumber menjadi cadangan.

STRATEGI "MATA RANTAI LEMAH" UNI SOVIET

Meningkatnya usaha Uni Soviet untuk memasuki Afrika tahun-tahun belakangan ini seperti terungkap dalam keterlibatan Uni Soviet dan Kuba dalam konflik di Angola dan Tanduk Afrika telah memancing reaksi mendua di Barat. Di satu pihak terdapat pendapat-pendapat bahwa Uni Soviet semata-mata mengejar sasaran-sasaran yang muncul dalam usaha untuk "menangkis" pengaruh Barat dan memamerkan surat-surat kepercayaan "sah" Uni Soviet sebagai suatu kekuatan global. Implikasi-implikasi dasar pandangan ini ialah (1) bahwa Uni Soviet tidak mengikuti sesuatu yang mirip dengan suatu strategi koheren di Afrika, dan (2) bahwa tidak banyak alasan bagi Barat untuk menjadi cemas secara berlebihan dengan petualangan-petualangan Moskwa di Afrika. Pandangan yang enak ini banyak berpangkal pada kemunduran-kemunduran Soviet yang menyolok, seperti di Somalia.

Namun terdapat pula penafsiran-penafsiran yang semakin cemas mengenai apa yang kini harus diakui sebagai suatu ofensif Soviet yang tekun. Dalam kata-kata seorang pengamat Amerika :

"Intervensi Soviet-Kuba di Afrika bagian selatan mengisyaratkan bahwa akan terjadi suatu konfrontasi Timur-Barat skala blokade Berlin tahun 1948 dan krisis rudal tahun 1962. Dalam kedua tindakan itu Uni Soviet berusaha mengubah perimbangan kekuatan global dan mendesak Amerika Serikat ke suatu posisi yang lebih rendah. Dalam konfrontasi strategis yang sedang berkembang di Afrika bagian selatan, Uni Soviet jelas bermaksud memotong suplai kekayaan mineral kawasan bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dan menguasai area tanah yang dapat digunakan sebagai pangkalan untuk menguasai jalur minyak Barat yang vital."¹

Demikian pun Patrick Wall, seorang anggota parlemen Inggris dan Komisi Pertahanan Uni Eropa Barat memperingatkan, bahwa Uni Soviet bila berhasil mencapai sasaran itu akan benar-benar menguasai Samudera Hindia dan sebagian besar bahan mentah dan pangan dunia yang paling penting, dan Barat akan dilempar ke Atlantik Utara untuk pertempuran

¹ Anthony Harrigan, "The Ultimate Target", *National Review*, Winter 1976, hal. 49-50

terakhir’’¹ Dan Ray Vicker, koresponden *African Affairs Wall Street Journal*, mendesak bahwa ’’Amerika kini lebih dari pada di masa lampau harus mengerti harga yang harus kita bayar berupa hilangnya bahan mentah dan kepemimpinan apabila Afrika bagian selatan hilang untuk Barat.’’²

Krisis minyak tahun 1973 oleh Presiden Nixon disusul dengan usul ’’Project Independence’’ yang tergesa-gesa, yang mula-mula menjanjikan swasembada energi pada tahun 1980 bagi Amerika Serikat. Rencana ini sejak itu dilepaskan karena disadari bahwa suatu injeksi bermilyar milyar dollar dana riset yang mendadak pun tidak akan mencapai sasaran itu dan paling banter hanya akan memperlambat laju meningkatnya ketergantungan Amerika Serikat akan impor sumber-sumber energi. Sebagian besar impor itu akan berupa minyak yang diangkut lewat jalur Tanjung Harapan yang strategis sekitar Afrika Selatan.

Meningkatnya kesadaran Amerika akan ketergantungan pada sumber-sumber asing mineral-mineral strategis, dan akan masalah-masalah sehubungan dengan usaha untuk mendapatkan suplai bahan-bahan serupa itu yang memadai, terungkap dengan baik dalam kutipan dari *Mineral Resource Perspectives 1975* :

’’Masalah kita hanyalah bahwa Amerika Serikat tidak mempunyai suplai domestik semua mineral yang memadai yang dibutuhkan untuk mempertahankan masyarakat kita di masa depan ini. Kita tidak pernah mempunyai segala sesuatu yang kita perlukan, tetapi di masa lampau kita dapat memperoleh bahan-bahan dari luar negeri dengan mudah. Kini kita memenuhi prosentase yang lebih kecil dari kebutuhan-kebutuhan kita dengan suplai domestik dan mineral dari luar negeri menjadi semakin mahal dan dalam beberapa hal tidak pasti tersedia. Nasionalisasi tambang-tambang di sementara negara menghambat partisipasi oleh perusahaan-perusahaan tambang Amerika; persetujuan-persetujuan kartel antara negara-negara produsen yang penting dapat secara mendadak dan dramatis menaikkan harga-harga atau bahkan menghentikan suplai seperti terjadi baru-baru ini dengan minyak; dan negara-negara berkembang kini bersaing di pasaran dunia untuk membeli bahan-bahan mentah mineral’’.³

1 Patrick Wall, ’’The Vulnerability of the West in Southern Hemisphere’’, *Strategic Review*, Winter 1976, hal. 49-50

2 Seperti dikutip dalam G. Roos, ’’The Importance of Southern Africa’s Resources to the West’’ suatu karangan yang tidak diterbitkan

3 U.S. Geological Survey, *Mineral Resource Perspectives 1975* (Prof. Paper 940, 1976)

Laporan ini memberikan ulasan mengenai prospek untuk memperbaiki swasembada Amerika Serikat dalam suplai mineral sebagai berikut :

"Dari perspektif dasawarsa 1970-an, rupanya kita harus meningkatkan suplai domestik mineral kita. Akan tetapi menurut suatu salah pengertian yang luas hal ini semata mata suatu soal ekonomi dan teknologi, bahwa perut bumi adalah suatu gudang tak terbatas yang siap untuk digali untuk suplai baru segala jenis bahan mentah dengan menaikkan harga atau mengembangkan suatu teknologi baru. Bila suatu mineral tidak tersedia secara geologis, maka perekonomian dan teknologi yang menguntungkan tidaklah pertinen."¹

Prospek-prospek yang suram ini berlawanan dengan prospek-prospek Uni Soviet, yang selama lima dasawarsa terakhir telah melakukan investasi-investasi raksasa dalam riset dan prospeksi geologi, dan secara relatif menjadi swasembada dalam kebanyakan komoditi. Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan-pertanyaan mengenai sikap pasif Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Baratnya terhadap meningkatnya ofensif Soviet di dan sekitar benua Afrika. Bukankah tercantum dalam definisi suatu Negara Besar bahwa dia mengambil langkah-langkah yang perlu dan bijaksana untuk melindungi kepentingan-kepentingan vitalnya?

Memang, taruhan-taruhan vital ini terdesak ke belakang oleh kesibukan dengan masalah-masalah rasial Afrika bagian selatan dan emosi-emosi mendalam akibat masalah-masalah itu. Akan sia-sia menyangkal bahwa Afrika Selatan telah mengundang perhatian dengan menimbulkan keributan-keributan dalam usahanya mencari penyelesaian masalah-masalah manusiawi, betapa sukar pun masalah-masalah itu. Memang benar bahwa politik rasial pemerintah Afrika Selatan dapat diserang dan bahwa diperlukan secara mendesak perubahan-perubahan drastis dan penting menuju penghapusan diskriminasi atas dasar warna kulit dan pemberian suatu peranan yang berarti kepada kelompok-kelompok penduduk kulit hitam dalam pemerintahan negara.

1 *Ibid*

Namun persoalannya tetaplah : Apakah Negara-negara Besar membiarkan dirinya dibijs sama sekali oleh masalah-masalah semacam itu secara yang merugikan kepentingan-kepentingan dasar mereka? Dalam rumusan yang berlainan : Apakah mereka membiarkan diri mereka begitu tenggelam dalam persoalan-persoalan suatu konflik regional sehingga mengabaikan manipulasi persoalan-persoalan itu oleh seorang lawan?

Uni Soviet jelas tidak menunjukkan keberatan serupa itu. Kesadaran akan pentingnya Dunia Ketiga sebagai medan pertarungan Timur-Barat sejak lama mendasari strategi Soviet. Dalam bukunya *Imperialisme : Puncak Kapitalisme*, Lenin mengemukakan sebagai postulat bahwa menghilangnya secara berangsur-angsur kesempatan investasi domestik akan memaksa negara-negara kapitalis untuk semakin bersaing mendapatkan koloni-koloni dengan buruh dan sumber-sumber daya yang berlimpah.¹ Pada tahun-tahun sejak itu ahli-ahli strategi Soviet terus menekankan keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari sengketa-sengketa antara Dunia Ketiga dan Barat mengenai bahan-bahan mentah. Seorang Soviet yang mendukung perang ekonomi serupa itu menulis pada tahun 1974 :

" perdagangan bahan-bahan mentah, khususnya bahan bakar tahun-tahun belakangan ini adalah pusat goncangan-goncangan krisis dan mata rantai yang paling lemah dalam sistem hubungan ekonomi internasional kapitalis."² Seorang juru bicara Soviet lain menulis pada tahun yang sama : "Afrika adalah terkemuka dalam cadangan dan produksi banyak jenis bahan mentah di dunia. Endapan-endapan sementara mineral di Afrika adalah unik kebanyakan terpusat di Afrika bagian selatan"³

Intervensi besar-besaran Uni Soviet di Angola dan Tanduk Afrika jelas mengungkapkan munculnya negara itu sebagai superpower global yang mampu melakukan operasi-operasi militer penting di negeri-negeri jauh. Operasi di Angola juga menunjukkan kesabaran Uni Soviet mengejar strategi globalnya; minat Uni Soviet untuk Angola sudah mulai pada pertengahan

1 Walter F. Hahn dan Alvin J. Cottrell, *Soviet Shadow over Africa* (Coral Gables, 1976), hal. 4

2 D. Kostiukhin, "New Shocks for the Economics of Imperialism", *Communist*, Oktober 1974, hal. 98

3 V. Baryshnikov, "Raw Materials Resources of Africa" *International Affairs* (Moskwa), Desember 1974, hal. 135

tahun 1950-an, dan agen-agen intelijennya telah aktif di Angola sejak awal 1950-an.

Apa pun tujuan-tujuan Moskwa yang lebih luas dalam ofensifnya di benua Afrika, suatu sasaran sentral jelaslah untuk mendapatkan jalan masuk menuju kekayaan bahan mentah yang luar biasa di Afrika bagian selatan dan jika mungkin menguasainya. Karena Uni Soviet kaya akan kebanyakan bahan mentah yang paling vital dan menggunakannya untuk mendapatkan valuta asing, menjadi semakin menarik baginya untuk menyimpan sumber-sumber daya itu dan membeli kebutuhannya di lain tempat untuk mempertahankan swadainya pada waktu-waktu krisis. Misalnya bukan rahasia lagi bahwa secara diam-diam Uni Soviet membeli banyak chrom Rhodesia sambil dengan keras mengecam Amerika Serikat melakukannya secara terbuka, dan menjual chrom kepadanya dengan harga tinggi.¹

PERKEMBANGAN BARU PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Menyusul keberhasilan OPEC, negara-negara penghasil komoditi-komoditi lain berusaha mendapatkan kekuasaan yang lebih besar atas pasaran lewat perhimpunan-perhimpunan produsen internasional. Perkembangan yang paling baru dalam bidang ini ialah pembentukan organisasi-organisasi internasional oleh produsen-produsen bauksit dan bijih besi. Walaupun organisasi-organisasi produsen yang baru dibentuk itu sejauh ini bukan merupakan ancaman kartel seperti semula ditakutkan, sebagai akibatnya kekuasaan negara atas produksi, pengolahan dan pemasaran mineral meningkat.

Kecenderungan untuk meningkatkan keterlibatan negara dalam industri pertambangan waktu belakangan ini menjalar ke sementara negara industri yang maju. Misalnya Kanada pada tahun 1975 menetapkan serangkaian kriteria formal mengenai perusahaan-perusahaan yang dikuasai pihak asing, termasuk suatu ketentuan bahwa mayoritas dewan direktur harus orang Kanada. Bulan September 1975 PM Australia mengeluarkan

1 Van Rensburg dan Pretorius, *op. cit.*, hal. 126

suatu pernyataan politik bahwa pemerintahnya mengharapkan usul-usul agar dalam seluruh perkembangan mineral baru di Australia partisipasi Australia lebih kuat. Tetapi implementasi kebijaksanaan-kebijaksanaan ini diragukan sebagai akibat pergantian pemerintah dan meningkatnya kesadaran bahwa Australia tidak mempunyai cukup modal untuk mempertahankan suatu program eksplorasi dan pengembangan mineral yang sehat.

Suatu hal penting dalam usaha-usaha baru untuk melepaskan hubungan perdagangan bebas yang tradisional ialah disahkannya di Majelis Umum PBB tahun 1974 "Piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi", yang mengukuhkan hak negara-negara penghasil atas harga bahan mentah yang menguntungkan dan atas pengembalian kekayaan milik asing tanpa kompensasi. Amerika Serikat memberikan suara menentang resolusi itu. Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat menyadari bahwa perkembangan ini, dalam periode bila akibat habisnya suplai domestik beberapa mineral investasi dalam fasilitas-fasilitas produksi luar negeri akan meningkat, akan semakin kondusif untuk mengurangi suplai dari sumber-sumber asing atau paling tidak menimbulkan semakin banyak kesulitan untuk mendapatkan suplai itu.

Rupanya pemerintah Amerika Serikat menjadi semakin peka terhadap bahaya-bahaya pola-pola perdagangan dan investasi yang berubah, dan merundingkan posisi-posisi gabungan dengan anggota-anggota OECD lain. Jenis-jenis persetujuan yang dicapai mengatur pembagian suplai dalam hal embargo dan pertukaran teknologi baru untuk mengurangi ketergantungan pada suatu komoditi yang diberi harga di atas tingkat yang bersaing. Bidang-bidang lain yang diteliti meliputi politik penimbunan bersama dan persetujuan-persetujuan bagi aksi bersama untuk menghadapi praktek-praktek anti kompetitif.

Sekalipun prakarsa-prakarsa itu menunjukkan meningkatnya kekawatiran Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dengan meningkatnya kesulitan untuk mendapatkan suplai bahan-bahan mentah strategis yang memadai, mau tak mau orang skeptis

terhadap efektivitas tindakan-tindakan serupa itu pada waktu krisis, khususnya karena OECD dan NATO bukan lagi organisasi kohesif seperti satu atau dua dasawarsa yang lalu. Kurangnya kohesi itu terungkap dengan jelas dalam sikap negara-negara Barat menyusul krisis minyak tahun 1973.

Apakah arti perkembangan-perkembangan itu bagi dunia Barat dan apakah pengaruhnya atas arti Afrika Selatan sebagai pemasok bahan-bahan mentah? Pertama-tama adalah jelas, bahwa Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang menghadapi semakin banyak masalah untuk mendapatkan pasokan bahan-bahan mentah strategis yang memadai. Sebagai akibat keengganan kebanyakan penghasil mineral untuk mengizinkan investasi Barat dalam pengembangan sumber-sumber mineral mereka, dan tiadanya sumber-sumber investasi lain, masalahnya kiranya akan menjadi lebih serius di masa depan.

Kedua, seperti dikemukakan oleh seorang ahli terkemuka Eropa Barat, investasi besar-besaran Afrika Selatan dalam prasarana akan memungkinkannya dalam waktu sepuluh tahun untuk memasok 8% bijih besi, 60% manganese, lebih dari 50% krom, lebih dari 15% titanium, dan 12% asbestos dan fluorspar dunia untuk mempertahankan kedudukan dominannya dalam hal emas, platinum dan palladium; dan untuk memasok sebagian penting pasokan uranium dunia.¹ Dia juga mencatat bahwa kondisi untuk mengembangkan tambang-tambang di Afrika Selatan kiranya lebih unggul dari pada kondisi di lain-lain kawasan pertambangan di dunia. Hal ini adalah akibat mutu teknologi tinggi industri pertambangan Afrika Selatan, kemampuan untuk membiayainya sendiri dan prasarana fisik yang telah berkembang. Sambil mencatat bahwa "Afrika Selatan mempunyai kedudukan untuk menghancurkan usaha-usaha semua negara lain untuk menghentikan pasokan platinum, chromite, vanadium, manganese, antimony, uranium, fluorspar, titanium dan emas untuk Eropa Barat", dia menyimpulkan bahwa :

"Eropa harus meninjau kembali bukan saja politik pendatangnya terhadap benua Afrika dan secara lebih khusus Afrika bagian selatan, melainkan juga kepentingan strategisnya dalam bidang bahan mentah sebagai keseluruhan, dalam kerangka

¹ W. Ulbrich, *Bergbauliche Ressourcen in Südlichen Afrika* (Hamburg, 1976), hal. 168

hubungan-hubungan internasionalnya. Lambat laun kegagalan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan di kawasan akan mempunyai akibat-akibat yang sangat buruk di masa depan".¹

SKENARIO-SKENARIO PEMOTONGAN

Sekalipun campur tangan langsung Uni Soviet dalam arus bahan mentah strategis dari Afrika Selatan menjadi suatu ancaman nyata, hal itu sama sekali bukanlah satu-satunya cara dengan mana suplai mineral Afrika Selatan dapat hilang untuk selamanya bagi dunia Barat. Suplai mineral dari Afrika Selatan dapat dikurangi secara serius sebagai akibat politik ekonomi, keuangan dan politik negara itu sendiri. Lagi pula, lawan-lawan Afrika Selatan telah mencapai banyak sukses dalam usaha mencegah Afrika Selatan mencapai potensinya secara penuh dalam ekspor mineral dengan mendorong gereja-gereja, bank-bank, perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi lain agar tidak menanamkan modal di Afrika Selatan, dengan menutup banyak pasaran potensial bagi ekspor mineralnya, dan bahkan dengan mengorganisasi protes-protes terhadap ekspor mineral Afrika Selatan ke kawan-kawan dagang tradisional, seperti terjadi dengan ekspor batubara ke Amerika Serikat.

Mengingat politik mineral liberal dan potensi mineralnya — di dunia di mana hampir semua penghasil mineral menganut politik yang lebih nasionalistis — Afrika Selatan mengharapkan bagian yang lebih besar dari investasi-investasi internasional dalam perusahaan-perusahaan mineral baru daripada kenyataannya. Kini nampak bahwa investasi asing dalam industri tambang Afrika Selatan akan menurun di masa depan ini.

Oleh sebab itu skenario pertama ialah pengecikan ekonomi Afrika Selatan secara perlahan-lahan. Meningkatnya tekanan yang dipelopori oleh negara-negara komunis lewat badan-badan internasional seperti PBB dan OPA dapat mengakibatkan menurunnya investasi asing dalam industri tambang Afrika Selatan. Juga akan dilakukan usaha-usaha baru untuk mengenakan embargo atas ekspor mineral Afrika Selatan seperti

¹ *Ibid.*, hal. 172

telah dilakukan terhadap Rhodesia — dan melakukan tekanan atas kawan-kawan dagang tradisional Afrika Selatan untuk mengurangi perdagangan mereka dengan negara itu. Khususnya Jepang akan lemah terhadap tekanan-tekanan serupa itu. Tekanan juga akan dilakukan untuk menakut-nakuti calon-calon imigran agar tidak menetap di Afrika Selatan dan untuk mendorong tenaga kerja terlatih dan golongan profesi di Afrika Selatan untuk pindah, dan secara demikian menimbulkan kekurangan tenaga ahli dalam industri tambang.

Skenario kedua ialah skenario teror dalam negeri. Kekuatan-kekuatan luar negeri mengobarkan dan memanfaatkan kekecewaan-kekecewaan rakyat hitam dan berusaha menyebarkan keresahan di perkotaan kulit hitam sekarang ini ke ujung-ujung kota kulit putih, dan secara demikian menciptakan iklim ketakutan dan putus asa. Kemudian akan dilakukan usaha-usaha untuk mengacaukan prasarana fisik negara dan menghancurkan fasilitas-fasilitas tenaga listrik, air dan pengangkutan industri tambang. Jaringan listrik terpadu Afrika Selatan, yang didasarkan atas sejumlah kecil stasiun tenaga listrik yang sangat besar, dapat menjadi sasaran yang rawan. Suplai air untuk kompleks industri Witwatersrand bisa menjadi sasaran penting yang lain.

Skenario ketiga ialah meningkatnya infiltrasi dari negara-negara tetangga. Hal ini bisa menjadi serius kalau di Rhodesia muncul suatu pemerintah Marxis dan kalau di Namibia tidak dicapai suatu transisi menuju kemerdekaan yang cepat yang dapat diterima. Meningkatnya aksi-aksi teroris ke Afrika Selatan akan memaksa pemerintah meningkatkan pengeluaran militernya dan secara demikian mengurangi kemampuannya untuk melakukan investasi dalam prasarana sosial bagi kelompok-kelompok penduduk hitam atau dalam perusahaan-perusahaan produktif lain. Hal itu akan mengakibatkan pajak yang lebih tinggi dan secara demikian mengurangi kemampuan sektor swasta untuk menanam modal dalam perusahaan-perusahaan mineral. Hal itu juga akan mengalihkan orang, material dan fasilitas-fasilitas dari sektor swasta, dan secara demikian lebih lanjut mengurangi kemampuannya untuk menggali dan mengolah

mineral untuk ekspor atau untuk mengimpor perlengkapan baru bagi perkembangan.

Skenario keempat ialah isolasi fisik di mana armada Uni Soviet dengan pangkalan-pangkalan di Mozambik dan Angola, akan mampu menguasai arus kapal sekitar Afrika Selatan. Hal ini akan dibarengi dengan suatu kampanye politik untuk membenarkan tindakan-tindakan Soviet dengan dalih mendukung gerakan-gerakan "pembebasan" Afrika Selatan. Uni Soviet akan berpatroli sepanjang pantai Afrika selatan dan mencegah ekspor mineral atau impor senjata dan perlengkapan. Dia akan mempunyai kedudukan yang sangat menguntungkan untuk mengambil tindakan-tindakan itu bila PBB mengenakan sanksi-sanksi terhadap Afrika Selatan. Pada permulaan Uni Soviet tidak akan mengganggu suplai minyak Timur Tengah untuk Eropa Barat dan Amerika Serikat, tetapi akan melakukannya bilamana memandangnya tepat. Dalam keadaan itu Uni Soviet akan mencegah seluruh suplai mineral Afrika Selatan mencapai Barat.

Skenario terakhir ialah intervensi langsung Uni Soviet di Afrika Selatan. Hal ini kiranya akan didahului dengan peningkatan serangan-serangan teroris, disusul dengan suatu serangan konvensional secara besar-besaran oleh suatu "tentara pembebasan". Sesudah itu akan dibentuk suatu pemerintah Marxis menurut pola Mozambik dan Angola. Maka akan terjadi emigrasi kulit putih secara besar-besaran dan timbul keresahan yang parah antara suku-suku kulit hitam dan lain-lain kelompok penduduk. Ini akan membuka jalan bagi masuknya secara berbondong-bondong "penasihat-penasihat militer" komunis dan teknisi Soviet, yang akan mengambil alih operasi tambang-tambang dan pabrik-pabrik pengolahan mineral.

Biarpun semua skenario itu mungkin, manakah yang akan menjadi kenyataan bergantung pada perkembangan-perkembangan. Dalam negeri terdapat tanda-tanda positif bahwa penduduk kulit putih *bersedia menerima perubahan politik*, yang akan memberikan suara yang lebih besar dalam pemerintahan negara kepada lain-lain kelompok penduduk. Di antara

berbagai kelompok itu berlangsung suatu dialog yang semakin berarti. Di bidang ekonomi, terdapat petunjuk-petunjuk yang memberi hati bahwa industri swasta mengerahkan sumber-sumber dayanya yang berlimpah untuk mempertahankan suatu perekonomian bebas. *Namun keadaan sosial, ekonomi dan politik kelompok-kelompok kulit hitam di Afrika Selatan harus diperbaiki dengan cepat dan secara efektif*, suatu tugas yang hanya dapat diselesaikan dengan banyak biaya. Negara-negara Barat bisa menunjang tugas itu — dan secara demikian mengamankan kepentingan-kepentingan dasar mereka sendiri — dengan melangsungkan suatu dialog terbuka dengan Afrika Selatan, dan bahkan dengan bantuan keuangan, untuk mewujudkan perubahan sosial, ekonomi dan politik yang memadai di negara itu.

AKIBAT-AKIBAT PENGUASAAN SOVIET

Apabila berhasil menguasai sumber-sumber daya mineral Afrika Selatan, Uni Soviet akan menguasai prosentase tinggi cadangan mineral strategis kunci di dunia. Dari kedudukannya sekarang ini sebagai negara industri yang paling swadaya di dunia dalam cadangan mineral dalam negerinya, Uni Soviet akan menjadi negara dominan mengenai banyak mineral yang mempunyai arti strategis yang menentukan. Hal ini paling menyolok dalam bahan mentah untuk industri baja : Uni Soviet akan menguasai hampir separuh cadangan bijih besi dunia yang dapat digali, 84% cadangan chromnya (98% bila dia juga menguasai cadangan chrom Rhodesia), 93% cadangan manganese, bagian besar cadangan nikel, separuh cadangan fluospar dan hampir seluruh cadangan vanadium dunia. Sebaliknya Amerika Serikat khususnya dan Barat umumnya akan menghadapi kesulitan dalam suplai banyak bahan mentah itu dari sumber-sumber yang dapat digali secara ekonomis.

Mengenai metal bukan besi, kedudukan Uni Soviet tidak akan sedominan itu, tetapi dia akan mempunyai cadangan yang memadai dan kemampuan produksi semua metal bukan besi yang penting. Sedikit mineral bukan metal menduduki tempat terkemuka dalam perdagangan dunia, dan penyebarannya umumnya lebih merata dari pada metal. Tetapi di sini pun Uni

Soviet akan mempunyai suplai yang memadai dalam waktu perang maupun damai apabila berhasil menguasai endapan mineral itu di Afrika Selatan.

Uni Soviet sebagian besar mendasarkan ekonomi enerjinya atas bahan bakar fosil, dan menurut segala petunjuk, cadangannya adalah memadai untuk menghadapi segala keadaan darurat. Oleh sebab itu penguasaan cadangan batubara Afrika Selatan tidak akan banyak menyumbang kepada cadangan bahan bakar fosilnya, kecuali sejauh hal itu akan memungkinkan Uni Soviet mengolah lain-lain mineral Afrika Selatan di tempat dan mendapatkan keahlian teknik berharga mengenai konversi dan preparasi batubara.

Penguasaan sumber-sumber daya Afrika Selatan akan menempatkan Uni Soviet dalam kedudukan dominan dalam metal-metal dan mineral-mineral bernilai yang penting, emas, intan, dan kelompok metal platinum. Penguasaan jalur pelayaran Tanjung Harapan akan memungkinkan Uni Soviet mengganggu suplai vital dari sumber-sumber energi Eropa dan Amerika Utara yang paling penting.

Perkiraan-perkiraan itu belum melukiskan arti penuh penguasaan Uni Soviet, langsung atau tidak langsung, atas industri mineral Afrika Selatan. Kendati kemajuan-kemajuan impresif Uni Soviet dalam banyak bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah suatu fakta yang juga diakui oleh orang-orang Soviet itu sendiri bahwa Uni Soviet menderita kekurangan-kekurangan serius dalam keahlian pertambangan dan metallurgis. Dalam bidang-bidang itu Afrika Selatan menonjol, dan Uni Soviet akan dapat memperoleh keahlian berharga di samping sumber-sumber daya mineral. Lagi pula Uni Soviet telah membentuk satuan tugas eksplorasi yang paling besar di dunia. Menurut sumber-sumber Soviet, terdapat lebih dari 500.000 tenaga dalam organisasi-organisasi geologi dan prospeksi Uni Soviet pada tahun 1975, termasuk 65.000 spesialis dan lebih dari 53.000 teknisi.¹ Ahli-ahli Afrika Selatan telah menggariskan bidang-bidang yang paling memberi harapan untuk eksplorasi

1 V.V. Strishkov, "Soviet Union, Mining Annual Survey 1976, hal. 480

berbagai mineral di hari depan, dan suatu usaha eksplorasi Soviet yang substansial akan bisa menemukan lebih banyak cadangan mineral-mineral Afrika Selatan itu.

Kalau kehilangan suplai mineral Afrika Selatan, negara-negara konsumen Barat harus mengadakan suatu re-evaluasi drastis mengenai sumber-sumber alternatif energi dan apa yang dapat menggantikannya. Bagi mineral-mineral yang kini Afrika Selatan merupakan suatu pensuplainya yang penting, sebagai akibat terputusnya suplai, harga-harga akan langsung naik. Substitusi mineral lain, kalau mungkin, akan dipercepat dan akan memantabkan harga-harga biarpun pada tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi hal itu akan memerlukan waktu.

Untuk sementara mineral akibatnya akan jauh lebih dramatis. "Bijih chromite, khususnya kadar tertinggi chromium kadar metallurgis, yang lebih dari 90% cadangan dunianya yang diketahui terdapat di Afrika Selatan, adalah perlu untuk produksi baja alloy tertentu dan tidak dapat diganti dengan unsur lain. Satu-satunya substitut Afrika Selatan sebagai sumber chromium adalah Uni Soviet. Juga tiada substitut yang dapat diterima untuk platinum maupun untuk manganese kadar metallurgis. Permintaan akan mineral-mineral ini kiranya tidak akan menurun".¹

Penghentian suplai chromo Afrika Selatan dan Rhodesia akan menempatkan pengaturan harga di tangan Uni Soviet. Biarpun sikap Moskwa terhadap penetapan harga bisa diubah oleh kebutuhan-kebutuhan dagangnya dalam lain-lain komoditi, khususnya gandum, Uni Soviet kiranya akan menggunakan penguasaannya atas komoditi vital ini sebagai ujian yang menentukan dari strategi "mata rantai lemah" itu.

Bagaimana dominasi Soviet atas Afrika bagian selatan akan mempengaruhi sikap pensuplai-pensuplai mineral lain bagi dunia Barat? Kendati keberhasilan OPEC, terdapat suatu kecenderungan untuk meremehkan ancaman kartel-kartel mineral lain. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan arti kedudukan Afrika

1 Hahn dan Cottrell, *op. cit.*, hal. 30

Selatan sekarang ini sehubungan dengan itu. Afrika Selatan menentang pembentukan kartel-kartel serupa itu dalam rangka usahanya untuk memajukan image-nya sebagai suatu pensuplai mineral yang zakelijk dan dapat diandalkan bagi dunia Barat. Dominasi Soviet atas Afrika bagian selatan akan mendorong usaha-usaha untuk menghidupkan kembali organisasi-organisasi produsen yang telah ada dan membentuk suatu kartel di bawah pimpinan Uni Soviet. Uni Soviet juga akan memberikan dukungan efektif kepada usaha-usaha baru, lewat UNCTAD dan badan-badan lain PBB, untuk memajukan konsep-konsep seperti persetujuan komoditi, indeksasi harga komoditi dan Tata Ekonomi Internasional Baru. Uni Soviet kiranya tidak mendukung usaha-usaha itu secara jujur karena sasaran utamanya tetaplah memotong suplai bahan-bahan mentah strategis untuk Barat, atau membuat usaha mendapatkan bahan-bahan itu semahal dan sesulit mungkin.

Penghentian suplai mineral dari Afrika Selatan dalam kebanyakan hal akan mempunyai akibat yang lebih serius atas tersedianya komoditi-komoditi itu bagi Barat daripada atas harga-harganya. Dengan perkataan lain, negara-negara Barat harus lebih meninjau kemungkinan penyisihan Afrika Selatan sebagai suatu pensuplai penting bahan-bahan mineral strategis karena akibatnya atas keamanan suplainya daripada karena akibatnya atas biaya.

Diakui sepenuhnya bahwa peringatan-peringatan ini bertentangan dengan pendapat menyenangkan yang dibina oleh satu generasi kemakmuran di negara-negara industri dan dengan asumsi mengenai suatu dunia yang terus berfungsi, secara kompetitif tetapi pada dasarnya damai, sesuai dengan aturan-aturan detente dan keuntungan ekonomi. Akan tetapi sejak fajar sejarah modern persaingan negara-negara berkisar pada sumber-sumber kekuatan nasional, pertama-pertama kekuatan ekonomi. Apakah yang berubah? Pertanyaan ini menjadi lebih tajam dengan latar belakang ramalan-ramalan ekonomi yang suram dan akumulasi bukti bahwa sedang berlangsung suatu pertarungan baru untuk memperebutkan unsur-unsur kekuatan global.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku yang membahas masalah-masalah sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, strategi, pemerintahan, ideologi dan hubungan internasional yang sangat luas.

ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—

RINGKASAN PERISTIWA

majalah dwipekan, berisikan ringkasan peristiwa di dalam negeri (politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan dan hankam) dan dunia internasional yang kompleks sifatnya, bersumberkan surat kabar, buletin serta majalah dalam dan luar negeri. Majalah ini merupakan salah satu sumber penulisan buku 'Indonesia dan Dunia Internasional' yang diterbitkan setiap tahun oleh CSIS. Harga per eks Rp. 350,— langganan setahun (24 nomor) Rp. 8.400,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 6.720,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,— Jilidan Vol. I, II, III, V a Rp. 4.000,—, Vol IV Rp. 2.500,—

CSIS juga menyediakan perpustakaan dan clippings yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada: Biro Publikasi — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489